



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan Dr.Cipto No.64 Semarang 50126 – Jawa Tengah
Telepon: (024) 3543063 - Faksimili: (024) 3546795
Laman: jateng.kemenkumham.go.id Pos-el:kanwil.jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PR.03 - 6 9 Januari 2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Tahun 2025

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum
di tempat

1. Rujukan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020/2024;
- f. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum;
- g. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum;
- h. Peraturan Menteri Hukum Nomor 42 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025/2029;
- i. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.PR.03 TAHUN 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- j. Surat Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Nomor SEK.1-PR.03-851 tanggal 22 Desember 2025 hal Pemberitahuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2025.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana terlampir.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah



Heni Susila Wardoyo

Tembusan:

1. Menteri Hukum;
2. Wakil Menteri Hukum;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum;
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
5. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
6. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual;
7. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional;
8. Kepala Badan Strategi Kebijakan;
9. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal.



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

TAHUN 2025

BerAKHLAK
Berorientasi, Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kooperatif



SEMAKIN
PASTI

#bangga
melayani
bangsa

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Tahun 2025 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah selama Tahun 2025. Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah juga merupakan alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas. Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang didokumentasikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja menjadi dasar dalam menganalisa pencapaian program atas kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah. Capaian kinerja Tahun 2025 yang tertuang dalam Laporan Kinerja merupakan cerminan kinerja dari seluruh komponen pegawai yang ada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.

Laporan Kinerja ini memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan mencapai kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Tahun 2025. Perjanjian Kinerja tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah 2020 – 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah 2025 – 2029. Laporan Kinerja Tahun 2025 menggambarkan Capaian Kinerja Kantor Wilayah Jawa Tengah Tahun 2025. Kami berharap Laporan Kinerja ini menjadi media informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, sehingga dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.



Semarang, 9 Januari 2026
Kepala Kantor Wilayah



Heni Susila Wardoyo

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar tata pemerintahan yang baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Berangkat dari pemikiran tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah menyusun Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah. Proses penyusunan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Tahun 2025 berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang pada intinya melaporkan hasil sebagai kinerja program dan keluaran sebagai kinerja kegiatan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini berfungsi sebagai alat akuntabilitas kinerja bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah selama Tahun 2025 dengan melandaskan pada pelaksanaan mandat yang diemban oleh organisasi. Selain fungsi akuntabilitas, Laporan Kinerja ini sekaligus memenuhi kebutuhan internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah guna melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka penyempurnaan kinerja organisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Laporan Kinerja ini menyajikan dan mengupas capaian kinerja sasaran program dan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.

Sebagai wujud pemerintahan yang baik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah menyampaikan laporan kinerja instansi pemerintah pada Tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pemerintah. Dalam laporan ini dijelaskan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah pada Tahun 2025 sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia khususnya dalam melaksanakan tugas teknis dan fasilitatif dibidang hukum.

**Perbandingan Alokasi Anggaran Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Jawa Tengah Tahun 2025 dengan Alokasi Tahun 2024**

No	PROGRAM (UNIT ESELON I)	2024		2025	
		Rp.		Rp.	
1.	Program Dukungan Manajemen (Sekretariat Jenderal)	Rp.	29,919,895,000	Rp.	29,254,089,000
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum)	Rp.	4,811,600,000	Rp.	4,811,600,000
3.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)	Rp.	2,573,011,000	Rp.	2,805,803,000
4.	Program Pembentukan Regulasi (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan)	Rp.	467,600,000	Rp.	592,000,000
5.	Program Pembentukan Regulasi (Badan Pembinaan Hukum Nasional)	Rp.	5,350,995,000	Rp.	6,245,168,000
6.	Program Dukungan Manajemen (Badan Strategi Kebijakan Hukum)	Rp.	354,104,000	Rp.	443,051,000
Jumlah		Rp.	43,477,205,000	Rp.	44,151,711,000

Dari perbandingan alokasi anggaran Tahun 2025 dan Tahun 2024 diatas, terdapat beberapa Program yang mengalami kenaikan dan ada pula Program yang mengalami penurunan. Terdapat 4 (empat) alokasi anggaran yang mengalami kenaikan yaitu pada Program (Eselon I): a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual); b. Program Pembentukan Regulasi (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan); c. Program Pembentukan Regulasi (Badan Pembinaan Hukum Nasional); d. Program Dukungan Manajemen (Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM)

Alokasi anggaran yang mengalami penurunan yaitu pada Program Dukungan Manajemen (Sekretariat Jenderal) yang merupakan pelaksanaan kebijakan penghematan anggaran.

Sedangkan alokasi anggaran yang tidak mengalami perubahan yaitu pada Program (Eselon I): a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum).

Total realisasi anggaran 6 Petikan DIPA dari Unit Eselon 1 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah yaitu Rp. 26,194,064,820,- atau 96,20% dari total Pagu Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 27,227,406,000,-, dengan total sisa anggaran Rp. 1,033,341,180,-

Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Jawa Tengah Tahun 2025

NO	PROGRAM (ESELON I)	ALOKASI ANGGARAN (RP)	PAGU REVISI (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%	SISA TOTAL (RP)
1	Program Dukungan Manajemen (Sekretariat Jenderal)	29,254,089,000	19,060,535,000	18,102,407,825	94,97	958,127,175
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum)	4,811,600,000	2,270,828,000	2,270,798,569	100	29,431
3	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)	2,805,803,000	923,825,000	922,509,110	99,86	1,351,890
4	Program Pembentukan Regulasi (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan)	592,000,000	196,040,000	193,843,101	98,88	2,196,899
5	Program Pembentukan Regulasi (Badan Pembinaan Hukum Nasional)	6,245,168,000	4,676,178,000	4,604,517,719	98,47	71,660,281
6.	Program Dukungan Manajemen (Badan Strategi Kebijakan Hukum)	443,051,000	100,000,000	99,988,496	99,99	11,504
Jumlah		44,151,711,000	27,227,406,000	26,194,064,820	96,20	1,033,341,180

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL (RP)	PAGU REVISI (RP)	REALISASI	KET
1	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	29,254,089,000	19,060,535,000	18,102,407,825	94,97
2	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	4,811,600,000	2,270,828,000	2,270,798,569	100
3	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,805,803,000	923,825,000	922,509,110	99,86
4	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	443,051,000	100,000,000	99,988,496	99,99
5	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	592,000,000	196,040,000	193,843,101	98,88
6	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	157,549,000	15,000,000	14,999,500	100
7	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	6,087,619,000	4,661,178,000	4,589,518,219	98,46
Jumlah		44,151,711,000	27,227,406,000	26,194,064,820	96,20

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah selalu berusaha mengupayakan kinerja yang optimal dalam mencapai sasaran program dan kegiatannya. Capaian tersebut ditunjukkan melalui capaian masing-masing indikatornya.

Di Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah melaksanakan 4 Program dari 6 Unit Eselon I yang terdiri dari 14 Sasaran Kegiatan dan 18 Indikator Kinerja Kegiatan untuk Bulan Januari – Oktober :



dan 13 Sasaran Kegiatan dan 14 Indikator Kinerja Kegiatan untuk Bulan November – Desember sebagaimana gambar berikut:



PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

1. SEKRETARIAT JENDERAL
2. BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

PROGRAM PEMBENTUKAN REGULASI

1. DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
2. BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM

1. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
2. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Realisasi Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Jawa Tengah

Bulan Januari - Oktober Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Percentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	100%	100%
2	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Percentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	4,82%	80,33%
3	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	Percentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	100%	111%
4	Terwujudnya penyelesaian Layanan BHP	Percentase permohonan Layanan BHP yang diselesaikan	90%	100%	111%
5	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	1. Percentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP 2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	100% 3,1 Indeks	100% 3,83 Indeks	100% 123%
6	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Percentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	100%	333%
7	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Percentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah 2. Percentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	70% 20%	95% 33%	135% 165%
8	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Percentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%	87,78%	109%
9	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	22 Orang	22 Orang	100%
10	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan 2. Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	100% 100%
11	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Percentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	75,25%	301%

12	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	98%	119%
		2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	98%	122%
13	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Percentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70	100%	142%
14	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Percentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	100%	125%

Dari 18 indikator kinerja kegiatan tersebut, ada indikator kinerja kegiatan yang tercapai dengan optimal dan ada juga yang belum tercapai secara maksimal, belum tercapainya indikator tersebut disebabkan beberapa hal, antara lain:

1. Kurangnya koordinasi dan sinergi dalam melakukan pemantauan, dan evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya untuk dilakukan tindak lanjut yang konkret dan segera khususnya terkait dengan lembaga/instansi dan organisasi diluar lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah;
2. Masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan organisasi dengan ketersediaan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang dibebankan;
3. Masih diperlukan penambahan sarana dan prasarana pendukung;

Atas kekurangan capaian kinerja dimaksud, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah akan melakukan peningkatan pada Tahun 2026, antara lain dengan:

1. Melaksanakan kegiatan secara optimal;
2. Pemberdayaan dan pengelolaan SDM secara efektif yaitu dengan penempatan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan, serta mengembangkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk menunjang pelaksanaan tugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.

Realisasi Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Jawa Tengah

Bulan November - Desember Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,86 Indeks	3,87 Indeks	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,22 Indeks	3,45 Indeks	107%
4	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,2%	100%	101%
5	Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	100%	117%
6	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahannya	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahannya yang Selesai Ditangani	31%	50%	161%
7	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,50 Level	2,35 Level	94%
8	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	1. Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum 2. Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100% 100%	100% 100%	100% 100%
9	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	15%	20%	133%

10	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Percentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	89%	95,48%	107%
11	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	70%	100%	142%
12	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Percentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	11%	100%	909%
13	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Percentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95,5%	100%	104%

Dari 14 indikator kinerja kegiatan tersebut, ada indikator kinerja kegiatan yang tercapai dengan optimal dan ada juga yang belum tercapai secara maksimal, belum tercapainya indikator tersebut disebabkan beberapa hal, antara lain:

1. Kurangnya koordinasi dan sinergi dalam melakukan pemantauan, dan evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya untuk dilakukan tindak lanjut yang konkret dan segera khususnya terkait dengan lembaga/instansi dan organisasi diluar lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah;
2. Masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan organisasi dengan ketersediaan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang dibebankan;
3. Masih diperlukan penambahan sarana dan prasarana pendukung;

Atas kekurangan capaian kinerja dimaksud, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah akan melakukan peningkatan pada Tahun 2026, antara lain dengan:

1. Melaksanakan kegiatan secara optimal;
2. Pemberdayaan dan pengelolaan SDM secara efektif yaitu dengan penempatan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan, serta mengembangkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk menunjang pelaksanaan tugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	2
Ikhtisar Eksekutif	3
Daftar Isi.....	7
BAB I Pendahuluan	8
A. Latar Belakang	9
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	10
C. Maksud dan Tujuan.....	14
D. Aspek Strategis.....	15
E. Isu Strategis	16
F. Sistematika Pelaporan.....	16
BAB II Perencanaan Kinerja	17
A. Rencana Strategis.....	18
1. Visi.....	18
2. Misi	20
3. Tata Nilai BerAkhlas.....	21
4. Tata Nilai Kemenkumham	22
B. Perjanjian Kinerja	24
BAB III Akuntabilitas Kinerja	26
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	27
B. Realisasi Anggaran	109
C. Capaian Kinerja Anggaran	111
D. Capaian Kinerja Lainnya	120
BAB IV Penutup	131
A. Simpulan.....	132
B. Saran	133
Lampiran-lampiran.....	134
Perjanjian Kinerja Kakanwil dengan Eselon I Tahun 2025	
Perjanjian Kinerja Kakanwil dengan Eselon I Tahun 2024	
Perjanjian Kinerja Kakanwil dengan Eselon I Tahun 2023	
Perjanjian Kinerja Kakanwil dengan Eselon I Tahun 2022	
Realisasi Anggaran Seluruh Program Eselon I	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk menjadikan instansi pemerintah akuntabel dengan harapan:

1. dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
2. mewujudkan transparansi pada instansi pemerintah;
3. mewujudkan partisipasi masyarakat didalam pelaksanaan pembangunan nasional; dan
4. memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Hal Ini dimungkinkan karena dengan menerapkan SAKIP setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (*Performance Report*) yang secara sistematis akan mengarahkan instansi pemerintah dalam pencapaian tujuannya, pelaksanaan tugas dan fungsinya sampai dengan pertanggungjawaban atas hasil kinerjanya.

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Tahun 2025 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Laporan Kinerja ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan juga Rencana Strategis tahun 2020-2024 serta tahun 2025-2029. Laporan ini juga digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah di masa yang akan datang.

Berdasarkan 14 sasaran kegiatan yang tertuang dalam perjanjian kinerja Kantor Wilayah Jawa Tengah Periode Januari – Oktober Tahun 2025 dan 13 sasaran kegiatan yang tertuang dalam perjanjian kinerja Kantor Wilayah Jawa Tengah Periode November – Desember Tahun 2025 tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja dengan sumber anggaran yang berasal dari:

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kemenkum RI Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-135.01.2.692006/2025 Tanggal 2 Desember 2024;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-135.04.2.692046/2025 Tanggal 2 Desember 2024;

3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-135.05.2.692993/2025 Tanggal 2 Desember 2024;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (PP) Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-135.03.2.693026/2025 Tanggal 2 Desember 2024;
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-135.11.2.693094/2025 Tanggal 2 Desember 2024;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK) Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-135.12.2.693128/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas

Berdasarkan susunan Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bertransformasi menjadi satu Kementerian Koordinator, dan tiga Kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pemisahan Kemenkumham menjadi empat kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, tentu akan berdampak ke dalam banyak aspek.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
- c. fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- d. pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;

- e. koordinasi dan pelaksanaan pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah;
- f. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
- g. pengoordinasian dan pengendalian penilaian kepatuhan hukum pemerintah daerah;
- h. koordinasi dan sinkronisasi analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan pada instansi daerah;
- i. fasilitasi pemantauan dan peninjauan serta analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundangundangan di daerah;
- j. fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah; dan
- k. pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Sejalan dengan upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatnya pelayanan publik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah melaksanakan kegiatan pelayanan publik sebagai berikut:

- 1. Pelayanan Jasa Hukum
 - a. Di bidang Kenotariatan (pengambilan sumpah notaris)
 - b. Di bidang Fidusia (permohonan sertifikat jaminan fidusia-*online*)
 - c. Di bidang kewarganegaraan (Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia)
- 2. Pelayanan Kekayaan Intelektual
 - Permohonan di bidang Kekayaan Intelektual:
 - a. Pendaftaran Merek
 - b. Permohonan Hak Cipta
 - c. Pendaftaran Paten
 - d. Pendaftaran Desain Industri
- 3. Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- 4. Pemberian Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin
 - Menyediakan anggaran Bantuan Hukum cuma-cuma melalui Organisasi Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin yang sedang berperkara di Pengadilan.

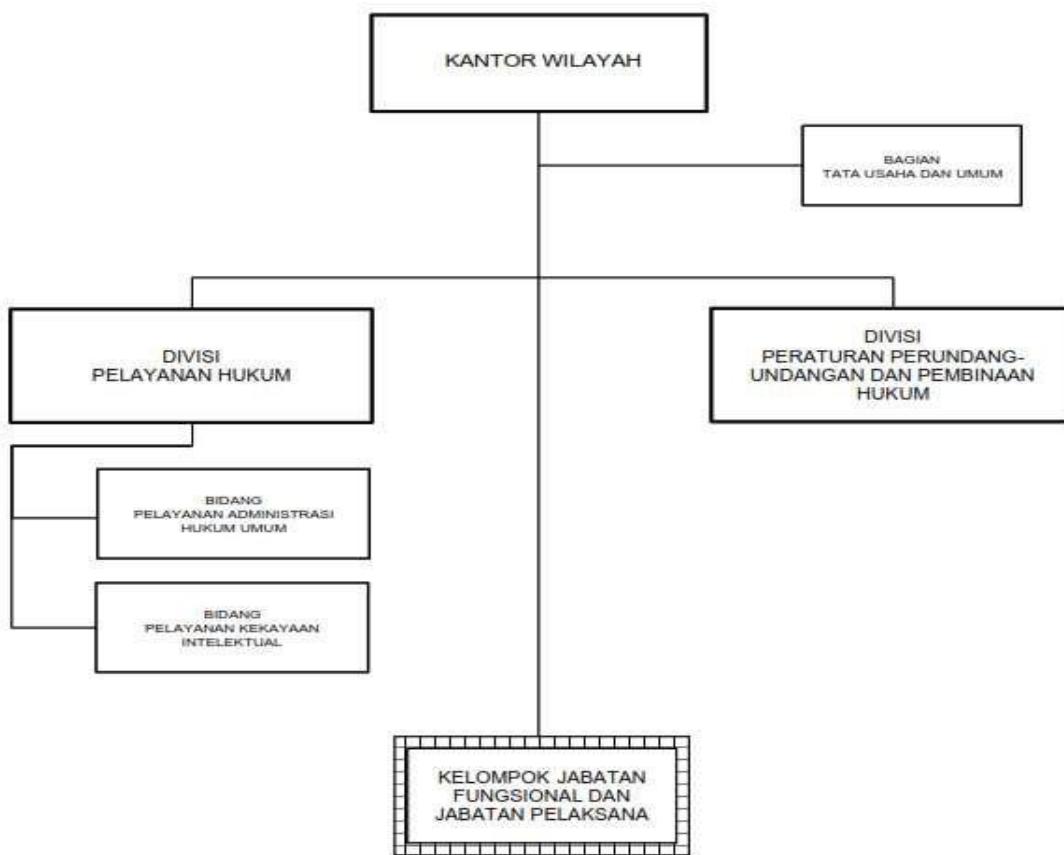
3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, terdiri dari:

- 1. 1 (satu) orang Kepala Kantor Wilayah;
- 2. 2 (dua) orang Kepala Divisi:

- a. Kepala Divisi Pelayanan Hukum;
 - b. Kepala Divisi Peraturan Perundang Undangan dan Pembinaan Hukum.
3. 1 (satu) orang Kepala Bagian:
 - a. Bagian Tata Usaha dan Umum.
 4. 2 (dua) orang Kepala Bidang:
 - a. Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum;
 - b. Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah



Satuan Kerja / Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum Republik Indonesia yang berkedudukan di Provinsi Jawa Tengah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah terdiri dari 2 (dua) Divisi dan 1 (satu) Bagian yaitu:

1. Divisi Pelayanan Hukum,
2. Divisi Peraturan Perundang Undangan dan Pembinaan Hukum.
3. Bagian Tata Usaha dan Umum.

Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) sejumlah 2 UPT yang terdiri dari:

- 1 (Satu) UPT Balai Harta Peninggalan (BHP).
- 1 (Satu) UPT Balai Diklat Hukum Jawa Tengah.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar tata kepemerintahan yang baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Berangkat dari pemikiran tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah. Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Tahun 2025 berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang pada intinya melaporkan hasil sebagai kinerja program dan keluaran sebagai kinerja kegiatan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini berfungsi sebagai alat akuntabilitas kinerja bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah selama Tahun 2025 dengan melandaskan pada pelaksanaan mandat yang diemban oleh organisasi. Selain fungsi akuntabilitas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini sekaligus memenuhi kebutuhan internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah guna melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka penyempurnaan kinerja organisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menyajikan dan mengupas capaian kinerja sasaran program dan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.

2. Tujuan

Sebagai wujud pemerintahan yang baik, Kantor Wilayah Jawa Tengah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pemerintah. Dalam laporan ini dijelaskan capaian kinerja Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah pada Tahun 2025 sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum RI khususnya dalam melaksanakan tugas teknis dan fasilitatif dibidang hukum.

D. Aspek Strategis

Aspek Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah yang dalam melaksanakan tugas Kantor Wilayah juga menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

1. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual dan

- pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
 4. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

E. Isu Strategis

Beberapa kendala yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Tahun 2025 diantaranya:

1. Adanya masa transisi pemecahan Kementerian yang sebelumnya Kementerian Hukum menjadi beberapa Kementerian baru, sehingga membutuhkan penyesuaian di Tingkat wilayah baik dari segi teknis, nonteknis, anggaran, sdm, hingga sarana prasarana;
2. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pemberian layanan publik;
3. Keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah.

F. Sistematika Laporan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 ini sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Aspek Strategis
- E. Isu Strategis
- F. Sistematika Pelaporan

BAB II Perencanaan Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
- C. Capaian Kinerja Anggaran
- D. Capaian Kinerja Lainnya

BAB IV Penutup

- A. Simpulan
- B. Saran

Lampiran-lampiran



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A.

B. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran RPJM ke-3 yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Dalam mendukung prioritas Presiden, program dan kegiatan Kementerian/ Lembaga ditujukan untuk: menciptakan supremasi hukum; memberdayakan masyarakat untuk sadar Hukum; memperkuat manajemen dan kelembagaan secara nasional; dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program dan kegiatan tersebut dijadikan kerangka dasar dan arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan di Kementerian Hukum.

Pada tanggal 10 Oktober 2025 bertempat di Jakarta telah diundangkan dan berlaku Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025-2029 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025-2029.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah mengadopsi Renstra Kementerian Hukum Tahun 2025-2029 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum RI No. 42 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025-2029 sebagaimana amanah Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap instansi wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Renstra juga memuat Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

1. Visi

Untuk merumuskan kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Kementerian Hukum, disusunlah Visi Kementerian Hukum. Penyusunan Visi dimaksudkan untuk:

- a. mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh organisasi
- b. memberikan arah dan fokus strategi yang jelas
- c. menjadi perekat dan menyatukan gagasan strategis yang terdapat pada organisasi
- d. memiliki orientasi kepada masa depan
- e. mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran organisasi
- f. menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

- a. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
- c. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
- d. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
- e. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, Visi Pembangunan Nasional untuk tahun 2025-2029 adalah:

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 8 Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Astacita yaitu:

- a. Memperkokoh ideologi Pancasila demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
- b. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi baru;
- c. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
- d. Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
- e. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

- f. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
- g. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
- h. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi astacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

- a. membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
- b. melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
- c. menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
- d. memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
- e. melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 adalah:

**“Terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju
Menuju Indonesia Emas Tahun 2045”**

2. Misi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Tahun 2025-2029. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

Misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 2 (dua) misi Kementerian Hukum sebagai berikut:

- a. Mewujudkan kepastian Hukum bagi seluruh rakyat Indonesia;
- b. Melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mewujudkan tata Kelola pemerintah yang bersih.

3. Tata Nilai BerAkhhlak



merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Adanya *Core Values* ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Sedangkan *#banggamelayanibangsa* merupakan *Employer Branding* ASN yang melayani sepenuh hati.

Core Values ASN menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja, yang tidak hanya dilakukan pada ASN tingkat pusat namun juga pada tingkat daerah, "ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai *core values* yang sama". Adapun Panduan Perilaku *Core Values* ASN BerAKHLAK sebagai berikut:

a. Berorientasi Pelayanan

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
- Melakukan perbaikan tiada henti.

b. Akuntabel

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

c. Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- Membantu orang lain belajar.
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

d. Harmonis

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- Suka menolong orang lain.
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

e. Loyal

- Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
- Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

f. Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.
- Bertindak proaktif.

g. Kolaboratif

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

4. Tata Nilai Kementerian Hukum

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2025-2029, Kementerian Hukum mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2025-2029 yaitu **“PASTI”** yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi *problem solver* bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.

Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan dengan insititusi terkait.

Transparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Inovatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

C. Perjanjian Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan dan anggaran, mengacu pada Peraturan Menteri Hukum Nomor: No.42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025-2029 dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah. Target kinerja pada tingkat Rencana Strategis akan menjadi tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam pencapaian visi misi seperti terlihat pada lampiran Perjanjian Kinerja.

Berikut merupakan rangkuman dari Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah dengan 6 Unit Eselon I yang terdiri dari 3 Program, 14 Sasaran Kegiatan dan 18 Indikator Kinerja Kegiatan untuk Periode Januari-Oktober 2025:

Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Periode Januari – Oktober 2025
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah dengan Unit Eselon I

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%
2	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%
3	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%
4	Terwujudnya penyelesaian Layanan BHP	Persentase permohonan Layanan BHP yang diselesaikan	90%
5	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP 2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	100% 3,1 Indeks
6	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%
7	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah 2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	70% 20%
8	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80 %
9	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	22 Orang
10	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan 2. Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen 1 Dokumen
11	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25 %
12	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi 2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	82 % 80 %
13	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang	Peningkatan 70 %

		Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	
14	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80 %

Berikut merupakan rangkuman dari Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah dengan 6 Unit Eselon I yang terdiri dari 3 Program, 13 Sasaran Kegiatan dan 14 Indikator Kinerja Kegiatan untuk Periode November - Desember 2025:

Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Periode November – Desember 2025
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah dengan Unit Eselon

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%
2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,86 Indeks
3	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,22 Indeks
4	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,2%
5	Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%
6	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayah yang Selesai Ditangani	31%
7	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,50 Level
8	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	1. Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum 2. Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100% 100%

9	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Percentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	15%
10	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Percentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	89%
11	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	70%
12	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Percentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	11%
13	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Percentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95,5%

Berikut merupakan alokasi anggaran untuk masing-masing program di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Tahun 2025:

No	PROGRAM (UNIT ESELON I)	2025	
1.	Program Dukungan Manajemen (Sekretariat Jenderal)	Rp.	29,254,089,000
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum)	Rp.	4,811,600,000
3.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)	Rp.	2,805,803,000
4.	Program Pembentukan Regulasi (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan)	Rp.	592,000,000
5.	Program Pembentukan Regulasi (Badan Pembinaan Hukum Nasional)	Rp.	157,549,000
6.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Badan Pembinaan Hukum Nasional)	Rp.	6,087,619,000
7.	Program Dukungan Manajemen (Badan Strategi Kebijakan Hukum)	Rp.	443,051,000
Jumlah		Rp.	44,151,711,000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum RI yang berkedudukan di Provinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dengan berdasarkan dari kebijakan Menteri Hukum RI dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berpedoman peraturan yang berlaku.

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Kantor Wilayah Jawa Tengah yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil/terlaksana pada periode/tahun tersebut.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Untuk dapat menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan dasar hukum Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah diukur berdasarkan tingkat capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi. Begitu pula dengan Kinerja Kegiatan, dimana tingkat pencapaiannya diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang menjadi indikator kinerja yaitu meliputi *Input*, *Output*, dan *Outcome*.

1. *Input*: segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM, dan sebagainya.
2. *Output*: segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik
3. *Outcome*: indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek langsung).

Selama Tahun Anggaran 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah telah berkinerja dan berupaya sebaik mungkin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga Kantor Wilayah Jawa Tengah memperoleh beberapa penghargaan dan apresiasi diantaranya:

Terbaik III dalam Pelaksanaan Kinerja Program Kekayaan Intelektual



Penyusunan Laporan Keuangan Terbaik Tingkat UAPPA-W Tahun 2024 lingkup Kanwil DJPB Jawa Tengah



Satker Pelaksana Penyelesaian Hak dan Kewajiban Satker Terdampak Likuidasi Paling Responsif oleh Kanwil DJKN Jateng dan DIY



Penghargaan atas Pembentukan Posbankum terbanyak se Indonesia oleh MURI



Kantor Wilayah dengan "Capaian Kinerja Terbaik II" di lingkungan Kementerian Hukum tahun 2025



Capaian kinerja ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah dana yang terserap atau urgensi dalam pencapaian sasaran sehingga diperoleh bobot indikator kegiatan, program dan kebijakan. Capaian kinerja Tahun 2025 merupakan realisasi dari rencana kinerja Tahun 2025 dan diperoleh angka realisasi dan presentasi pencapaian rencana tingkat capaian/target berdasarkan indikator kinerja *outcome*.

Realisasi Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Jawa Tengah

Periode Januari – Oktober Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Percentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	100%	100%
2	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Percentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	4,82%	80,33%
3	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	Percentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	100%	111%
4	Terwujudnya penyelesaian Layanan BHP	Percentase permohonan Layanan BHP yang diselesaikan	90%	100%	111%
5	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	1. Percentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP 2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	100% 3,1 Indeks	100% 3,83 Indeks	100% 123%
6	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Percentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	100%	333%
7	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Percentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah 2. Percentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	70% 20%	95% 33%	135% 165%
8	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Percentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%	87,78%	109%
9	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	22 Orang	22 Orang	100%
10	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan 2. Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	100% 100%
11	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di	Percentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total	25%	75,25%	301%

12	Wilayah Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Anggota JDIHN di Wilayah	<div style="width: 82%;">82%</div>	98%	119%
		1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	<div style="width: 80%;">80%</div>	98%	122%
13	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	<div style="width: 70%;">70</div>	100%	142%
14	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	<div style="width: 80%;">80%</div>	100%	125%

Realisasi Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Jawa Tengah

Periode November – Desember Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,86 Indeks	3,87 Indeks	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,22 Indeks	3,45 Indeks	107%
4	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,2%	100%	101%

5	Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	100%	117%
6	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Percentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	31%	50%	161%
7	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,50 Level	2,35 Level	94%
8	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	1. Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum 2. Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100% 100%	100%	100%
9	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Percentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	15%	20%	133%
10	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Percentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	89%	95,48%	107%
11	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	70%	100%	142%
12	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Percentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	11%	100%	909%
13	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Percentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95,5%	100%	104%

SASARAN KEGIATAN 1

Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Program Dukungan Manajemen. yang diturunkan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Tahun 2025 yaitu sebanyak 1 sasaran kegiatan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagaimana dalam tabel berikut:

1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Reformasi Birokrasi merupakan tulang punggung dan langkah awal untuk mencapai kemajuan sebuah Negara dimana Reformasi Birokrasi diperlukan untuk membangun pondasi yang diperlukan. Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek Kelembagaan (organisasi), Ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Manusia Aparatur.

Dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019, dimana seluruh Kementerian dan Lembaga untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi dengan menjalankan 8 area perubahan, yaitu:

- a. Manajemen Perubahan
- b. Penataan Peraturan Perundang-Undangan
- c. Penataan Sistem Manajemen SDM
- d. Penataan dan Penguatan Organisasi
- e. Penataan Ketatalaksanaan
- f. Penguatan Pengawasan
- g. Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan
- h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

SASARAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	100%	100%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Kantor Wilayah Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh rencana aksi reformasi birokrasi dengan menjalankan 8 area perubahan baik pada tingkat Kantor Wilayah maupun pada UPT di lingkup Kantor Wilayah Jawa Tengah.

Indikator kinerja kegiatan (IKK) Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dihitung dengan menggunakan formulasli sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Rencana aksi RB terkait Kantor Wilayah yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB terkait Kantor Wilayah}} \times 100\% \\ &= \frac{82}{158} \times 100\% = 51,89\% \end{aligned}$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	100%	100%

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023-2024

INDIKATOR KINERJA	2023		2024		2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	-	-	100%	100%	100%	100%

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum pada tahun 2025 memiliki target sebesar 100% dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Perubahan Kemenkumham Tahun 2024 sesuai PerMenkumham No.7 Tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun 2023.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2021-2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Indikator Kinerja Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	-	-	-	100%	100%

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum pada tahun 2025 memiliki target sebesar 100% dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Perubahan Kemenkumham Tahun 2024 sesuai PerMenkumham No.7 Tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun-tahun sebelumnya.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2025 karena adanya dukungan dari jajaran baik Kantor Wilayah Jawa Tengah maupun seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah dalam menyelenggarakan rencana aksi reformasi birokrasi.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang terbatas Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

g. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Kegiatan penunjang keberhasilan Kantor Wilayah yaitu adanya kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi Kantor Wilayah Jawa Tengah dengan Unit Pelaksana Teknis dalam pelaksanaan rencana aksi.

h. Manajemen Risiko

Potensi penyebab risiko yaitu Integritas Yang Belum Terbangun Dengan Baik dengan Indikator Risiko Pola Pikir dan Budaya Kerja. Pengendalian risiko yang dilaksanakan berupa Internalisasi serta penanaman pola pokir dan budaya kerja yang berintegritas.

SASARAN KEGIATAN 2

Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Percentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	4,82 %	80,33%

Sasaran kegiatan Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah mempunyai 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator ini mengukur kenaikan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Layanan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah tahun 2025. PNBP Layanan Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah Jawa Tengah meliputi:

- 1) Layanan Administrasi Jaminan Fidusia;
- 2) Layanan Administrasi Badan Hukum dan Badan Usaha;
- 3) Layanan Wasiat;
- 4) Layanan Apostille;
- 5) Layanan Administrasi Partai Politik; dan
- 6) Layanan Status Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan.

Indikator kinerja pada sasaran kegiatan ini adalah Persentase Persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah dengan target perolehan PNBP tahun 2025 sebesar 6%. Sampai dengan bulan Desember 2025 berikut perolehan PNBP per triwulan Kantor Wilayah Jawa Tengah:

TRIWULAN	PNBP	Rata-rata PNBP	Jumlah Layanan
TRIWULAN I	5.117.775.000	1.705.925.000	52.014
TRIWULAN II	3.205.100.000	1.068.366.666	43.290
TRIWULAN III	16.647.000.000	5.549.000.000	257.179
TRIWULAN IV	20.099.025.000	6.699.675.000	218.792
TOTAL	45.068.900.000	3.755.741.667	571.275

Sumber data: Diolah dari Dashboard Monitoring PNBP Kantor Wilayah (kanwil.ahu.go.id)



■■■ Tabel Jumlah Permohonan

Total 1 item.

Permohonan	Total Transaksi	Target PNBP	Total Penerimaan PNBP Kanwil
PNBP	571,275	Rp. 0	Rp. 45.068.900.000

Sumber data: Dashboard Monitoring PNBP Kantor Wilayah (kanwil.ahu.go.id)

Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
Volume Layanan	Jumlah Penerimaan (Rp)	Volume Layanan	Jumlah Penerimaan (Rp)	Volume Layanan	Jumlah Penerimaan (Rp)
563,734	53,388,150,000	544,348	51,491,400,000	516,933	49,441,055,642

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sum \text{PNBP 2025} - (\text{Rata-rata Realisasi PNBP 2024 (T3)})}{\text{Rata-rata Realisasi PNBP (T3)}} \times 100\% \\
 &= \frac{45,068,900,000 - 51,440,201,880}{51,440,201,880} \times 100\% = 4,82\%
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan nilai persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah diatas, maka perhitungan capaian realisasi indikator tersebut dapat dihitung menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{4,82}{6} \times 100\% = 80,33\%
 \end{aligned}$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Percentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	4,82%	80,33%

Indikator kinerja pada sasaran kegiatan ini adalah persentase peningkatan PNBP dari pelayanan administrasi hukum umum di wilayah dengan target perolehan PNBP tahun 2025 sebesar 6% lebih tinggi dari pada target perolehan PNBP tahun 2023. Perolehan PNBP di wilayah provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2025 senilai Rp 45.068.900.000 atau sebesar 4,82%, sedangkan perolehan PNBP di wilayah provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2024 senilai Rp 49.441.055,642-.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan capaian kinerja pada tahun 2024 dan tahun 2023:

INDIKATOR KINERJA	2023		2024		2025	
	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN
Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	10,39%	207%	2,89%	48%	4,82%	80,33%

Berdasarkan perbandingan realisasi tahun-tahun sebelumnya, jika perolehan nilai PNBP Tahun 2025 dibandingkan dengan perolehan PNBP Tahun 2024, nilai perolehan PNBP Tahun 2024 lebih tinggi 7,5% dari pada nilai perolehan PNBP Tahun 2025.

Berdasarkan perbandingan realisasi diatas, capaian kinerja Kantor Wilayah Jawa Tengah pada indikator kinerja kegiatan Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah dengan target sebesar 6% di tahun 2025 hanya terealisasi sebesar 4,82%. Masih dibawah dari target.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Indikator Kinerja Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	5%	5%	6%	6%

Perbandingan indikator persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 sebesar 5% sesuai dengan target jangka menengah tahun 2021-2024 telah tercapai sebesar 5% pada tahun 2022, dan di tahun 2023 belum tercapai dikarenakan beberapa kendala, sedangkan pada tahun 2024 sesuai dengan Rencana Strategis Perubahan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2024 target peningkatan PNBP AHU di Wilayah menjadi 6% sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 7 Tahun 2024, belum tercapai sesuai target.

Untuk mencapai target kenaikan perolehan PNBP sebesar 6% (enam persen), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah perlu meraih total PNBP senilai Rp 54.953.853.611 (lima puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga ratus delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah enam ratus sebelas rupiah) sampai dengan akhir tahun 2025.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Ketidakberhasilan

Jumlah realisasi penerimaan PNBP tahun 2025 sebesar Rp. 45.068.900.000 atau sebesar 4,82%, dengan jumlah volume layanan 571.275 tidak dapat mencapai target 6%.

Penyebab tidak tercapainya realisasi sesuai dengan target karena terdapat penurunan jumlah transaksi penggunaan layanan AHU pada tahun 2025 sebagaimana diketahui melalui laman *kanwil.ahu.go.id*. Jumlah volume layanan tahun 2025 sebesar 571.275

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang terbatas, Kantor Wilayah belum mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

g. Analisis Kegiatan penunjang ketidakberhasilan

Perolehan PNBP sampai dengan akhir tahun 2025 senilai Rp. 45.068.900.000. Untuk mencapai target kenaikan perolehan PNBP tahun 2025 sebesar 6% (enam persen) sama dengan PNBP tahun 2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah perlu memulai penyelenggaraan pelayanan administrasi hukum umum secara langsung di loket pelayanan Kantor Wilayah maupun loket pelayanan pada Mall Pelayanan Publik yang tersebar pada beberapa wilayah di Jawa Tengah. Pelayanan administrasi hukum umum yang tersedia pada loket pelayanan meliputi yaitu: pencetakan dan pelekatan sertifikat apostille pada dokumen publik yang telah diverifikasi, pelekatan sticker pada dokumen yang dilegalisasi, dan permohonan pelantikan notaris. Sehingga, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi hukum umum mengalami peningkatan

h. Manajemen Risiko

Potensi penyebab risiko yaitu Terdapat celah dalam pelayanan untuk melakukan pungutan liar maupun pemberian gratifikasi. Pengendalian risiko yang dilaksanakan yaitu penerapan sistem pelayanan yang mencegah terjadinya KKN dan pemasangan cctv pada ruang layanan.

SASARAN KEGIATAN 3

Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	Percentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	100%	111,11%

Sasaran kegiatan Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah mempunyai 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan

Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah terhadap seluruh laporan pengaduan yang masuk, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Layanan dianggap selesai apabila pengaduan masyarakat yang diterima telah diselesaikan oleh Kantor Wilayah atau telah ditindaklanjuti ke tingkat Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan/atau Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah selaku Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Tengah telah menerima laporan hasil pemeriksaan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan/atau perilaku yang dilakukan oleh para Notaris terlapor, yaitu:

No	Notaris	Jenis Pelanggaran	Status pengaduan (selesai/belum)
1.	Notaris W A H C, S.H.	Dugaan pelanggaran terhadap kewajiban untuk bertindak Amanah, jujur, saksama, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait terhadap perbuatan hukum	Selesai

2.	Notaris P R, S.H., M.Kn.	Dugaan pelanggaran terhadap kewajiban untuk bertindak Amanah, jujur, saksama, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait terhadap perbuatan hukum	Selesai
3.	Notaris A W Y.S.H., M.Kn.	Dugaan pelanggaran terhadap kewajiban untuk bertindak Amanah, jujur, saksama, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait terhadap perbuatan hukum	Selesai
4.	Notaris R F D, S.H., M.Kn.	Dugaan pembuatan Akta Surat Kuasa Menjual tanpa sepengetahuan Ahli Waris	Selesai
5.	Notaris N., S.H., M.Kn.	Dugaan pembuatan Akta Pelepasan Hak dan Akta Pengikatan Jual Beli tanpa persetujuan pihak yang berkepentingan	Selesai
6.	Notaris F A., S.H., M.Kn.	Dugaan pengabaian hak Pelapor untuk memperoleh salinan akta	Selesai

Laporan hasil pemeriksaan dari MPD Kabupaten Banyumas, Purbalingga, putusan MPW menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama terhadap Notaris WAHC. Putusan MPW terhadap notaris Kota Surakarta RFD menyatakan bahwa Notaris terbukti melakukan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan/atau perilaku Notaris. Dengan demikian, tingkat penyelesaian penyelesaian pengaduan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan/atau perilaku Notaris selama semester pertama adalah 100% (seratus persen).

Pada indikator persentase penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah dengan target sebesar 90% terealisasi sebesar 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa Kantor Wilayah telah berhasil mencapai target kinerjanya dengan menyelesaikan jumlah pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris yang masuk ke Kantor Wilayah.

Perhitungan persentase realisasi capaian indikator kegiatan ini dapat dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yg diselesaikan}}{\text{jumlah seluruh pengaduan masyarakat yg diterima}} \times 100\% \\
 &= \frac{6}{6} \times 100\% = 100\%
 \end{aligned}$$

Sedangkan formulasi persentase perhitungan capaian realisasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{100}{90} \times 100\% = 111,11\%
 \end{aligned}$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Percentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	100%	111,11%

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan capaian kinerja pada tahun 2024, 2023 dan tahun 2022:

INDIKATOR KINERJA	2022		2023		2024		2025	
	TARGET	REALI SASI						
Percentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	84%	100%	86%	88,88	90%	100%	90%	100%

Percentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan tahun 2022 dengan target sebesar 84%, terealisasi sebesar 100%, tahun 2023 dengan target sebesar 86% terealisasi sebesar 88.88%, Tahun 2024 dengan target sebesar 90% terealisasi 100%, dan tahun 2025 dengan target sebesar 90% terealisasi sebesar 100%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Indikator Kinerja Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025
Percentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	82%	84%	86%	90%	90%

Percentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan pada tahun 2025 sebesar 90% tidak mengalami kenaikan target dibandingkan target tahun

2024. Target sebesar 90% di tahun 2025 tersebut jika dibandingkan dengan target yang tertuang dalam Renstra Kemenkumham 2020-2024 mengalami kenaikan sebesar 2% sebagaimana tertuang dalam Renstra Perubahan Kemenkumham Tahun 2024 sesuai PerMenkumham No.7 Tahun 2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah dalam merealisasikan target kinerja pada tahun 2025 dikarenakan koordinasi aktif antara Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Pengawas Daerah Notaris sehingga pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di wilayah Jawa Tengah dapat terselesaikan dengan baik.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang terbatas Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

g. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Adanya Sekretariat Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Jawa Tengah. Dibentuknya kantor Sekretariat Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris secara permanen tersebut sebagai perwujudan penanganan pengaduan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan/atau perilaku Notaris secara optimal, profesional, dan akuntabel sehingga setiap warga masyarakat pengguna jasa Notaris memperoleh kepastian hukum

h. Manajemen Risiko

Potensi penyebab risiko yaitu Kurangnya kualitas dan integritas notaris dalam menjalankan jabatan / profesi. Pengendalian risiko yang dilaksanakan yaitu Monitoring dan evaluasi kinerja Majelis Pengawas Daerah Notaris dan Memberikan teguran kepada notaris yang tidak menjalankan tugasnya dengan maksimal.

SASARAN KEGIATAN 4

Terwujudnya penyelesaian Layanan BHP

1. Persentase permohonan Layanan BHP yang diselesaikan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan (BHP) terhadap seluruh permohonan yang diterima, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Layanan BHP, meliputi:

- 1) Layanan Perwalian;
- 2) Layanan Pengampuan;
- 3) Layanan Pengurusan Harta Kekayaan Orang Tidak Hadir (Afwezigheid);
- 4) Layanan Pengurusan Harta Peninggalan Tak Terurus (Onbeheerde Nataleschap);
- 5) Layanan Pendaftaran Wasiat Terdaftar;
- 6) Layanan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW);
- 7) Layanan Kepailitan;
- 8) Layanan Pengelolaan Uang Pihak Ketiga.

Layanan dianggap selesai apabila permohonan telah selesai diproses dan menghasilkan produk layanan, baik untuk permohonan yang diterima maupun ditolak.

Berikut merupakan matrik jumlah permohonan layanan pada Balai Harta Peninggalan Semarang sampai dengan Tahun 2025:

No.	Layanan	Jumlah Permohonan	Realisasi
1	Perwalian	5	5
2	Pengampuan	4	4
3	Surat Keterangan Hak Waris (SKHW)	15	15
4	Akta Wasiat	11	11
5	Ketidakhadiran	-	-
6	Harta Peninggalan Tak Terurus	-	-
7	Kepailitan	-	-
8	Penatausahaan Uang Pihak Ketiga	-	-
TOTAL		35	35

Layanan Penatausahaan Harta Peninggalan Tak Terurus masih dalam proses sidang di Pengadilan Negeri sehingga masih butuh proses dalam penyelesaian. Layanan Kepailitan merupakan kepailitan baru dan masih dalam tahap penelitian dan pendataan aset kepailitan.

Adapun formulasi perhitungan capaian indikator kegiatan ini sebagai berikut:

$$= \frac{\sum \text{permohonan layanan BHP yang ditindaklanjuti} \frac{\text{dan}}{\text{atau}} \text{ diselesaikan}}{\sum \text{seluruh permohonan layanan BHP yang diterima}} \times 100\%$$

$$= \frac{35}{35} \times 100\% = 100\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase permohonan Layanan BHP yang diselesaikan	90%	100%	111%

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan capaian kinerja pada tahun 2024 dan tahun 2023:

INDIKATOR KINERJA	2023		2024		2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase permohonan Layanan BHP yang diselesaikan	86%	88,88	90%	90%	90%	100%

Persentase permohonan Layanan BHP yang diselesaikan tahun 2023 dengan target sebesar 86% terealisasi sebesar 88%, sedangkan di Tahun 2024 dengan target 90% terealisasi 90%, pada Tahun 2025 sesuai dengan Renstra Perubahan Kemenkumham tahun 2024 (Permenkumham no.7 tahun 2024) dimana target 90% dan telah terealisasi 100%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Indikator Kinerja Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase permohonan Layanan BHP yang diselesaikan	82%	84%	86%	90%	90%

Persentase permohonan Layanan BHP yang diselesaikan pada Tahun 2025 sebesar 90% yang tidak mengalami kenaikan target dibandingkan target tahun 2024.

Target sebesar 90% di tahun 2025 tersebut jika dibandingkan dengan target yang

tertuang dalam Renstra Kemenkumham 2020-2024 mengalami kenaikan sebesar 2% sebagaimana tertuang dalam Renstra Perubahan Kemenkumham Tahun 2024 sesuai PerMenkumham No.7 Tahun 2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Terdapat dukungan dari jajaran Balai Harta Peninggalan Semarang atas permohonan layanan BHP pada tahun 2025.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang terbatas Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

g. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Adanya kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi menjadi penunjang keberhasilan capaian kinerja

h. Manajemen Risiko

Potensi penyebab risiko yaitu Terdapat celah dalam pelayanan untuk melakukan pungutan liar maupun pemberian gratifikasi. Pengendalian risiko yang dilaksanakan yaitu penerapan sistem pelayanan yang mencegah terjadinya KKN dan pemasangan cctv pada ruang layanan.

SASARAN KEGIATAN 5

Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP

1. Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup BHP

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator ini merepresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada Road Map Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Balai Harta Peninggalan.

Reformasi Birokrasi merupakan tulang punggung dan langkah awal untuk mencapai kemajuan sebuah Negara dimana Reformasi Birokrasi diperlukan untuk membangun pondasi yang diperlukan. Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek Kelembagaan (organisasi), Ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Manusia Aparatur.

Dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019, dimana seluruh Kementerian dan Lembaga untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi dengan menjalankan 8 area perubahan, yaitu:

- a. Manajemen Perubahan
- b. Penataan Peraturan Perundang-Undangan
- c. Penataan Sistem Manajemen SDM
- d. Penataan dan Penguatan Organisasi
- e. Penataan Ketatalaksanaan
- f. Penguatan Pengawasan
- g. Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan
- h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Adapun formulasi perhitungan capaian indikator kegiatan ini sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Rencana aksi RB terkait BHP yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB terkait BHP}} \times 100\% \\ &= \frac{6}{6} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup BHP	100%	100%	100%

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan capaian kinerja pada tahun 2024 dan tahun 2023:

INDIKATOR KINERJA	2023		2024		2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup BHP	-	-	100%	100%	100%	100%

Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Harta Peninggalan pada Tahun 2025 memiliki target sebesar 100% dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Perubahan Kemenkumham Tahun 2024 sesuai PerMenkumham No.7 Tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun-tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Indikator Kinerja Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup BHP	-	-	-	100%	100%

Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Harta Peninggalan pada Tahun 2025 memiliki target sebesar 100% dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Perubahan Kemenkumham Tahun 2024 sesuai PerMenkumham No.7 Tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun-tahun sebelumnya.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2025 karena adanya dukungan dari jajaran Unit Pelaksana Teknis Balai Harta Peninggalan Semarang dalam menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang terbatas Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

g. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Adanya kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi Kantor Wilayah Jawa Tengah dengan Unit Pelaksana Teknis dalam pelaksanaan rencana aksi

h. Manajemen Risiko

Potensi penyebab risiko yaitu Integritas Yang Belum Terbangun Dengan Baik dengan Indikator Risiko Pola Pikir dan Budaya Kerja. Pengendalian risiko yang dilaksanakan berupa Internalisasi serta penanaman pola pokir dan budaya kerja yang berintegritas.

2. Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup BHP terhadap layanan Kesekretariatan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja lingkup Balai Harta Peninggalan (BHP) terhadap layanan kesekretariatan pada tahun berjalan. Tingkat kepuasan tingkat kepuasan unit kerja lingkup BHP terhadap layanan kesekretariatan diukur untuk setiap layanan kesekretariatan pada tahun berjalan.

Tingkat kepuasan tingkat kepuasan unit kerja lingkup BHP terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:

- a. Kompleksitas persyaratan layanan (L1);
- b. Kejelasan informasi layanan (L2);
- c. Kemudahan prosedur layanan (L3);
- d. Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4);
- e. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5);
- f. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6);
- g. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7);
- h. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8).

Adapun formulasi perhitungan capaian indikator kegiatan ini sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{3,79}{3,1} \times 100\% = 122,25\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup BHP terhadap layanan Kesekretariatan	3,1	3,83	123%

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan capaian kinerja pada tahun 2024 dan tahun 2023:

INDIKATOR KINERJA	2023		2024		2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup BHP terhadap layanan Kesekretariatan	-	-	3,1	3,79	3,1	3,83

Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup BHP terhadap layanan Kesekretariatan pada tahun 2025 memiliki target sebesar 3,1 dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Perubahan Kemenkumham Tahun 2024 sesuai PerMenkumham No.7 Tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun-tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Indikator Kinerja Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup BHP terhadap layanan Kesekretariatan	-	-	-	3,1	3,1

Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup BHP terhadap layanan Kesekretariatan pada tahun 2025 memiliki target sebesar 3,1 dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Perubahan Kemenkumham Tahun 2024 sesuai PerMenkumham No.7 Tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun-tahun sebelumnya.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2025 karena adanya dukungan anggaran, sarana prasarana dan penyelesaian layanan secara tepat waktu.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang terbatas Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

g. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Adanya kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi menjadi penunjang keberhasilan capaian kinerja

h. Manajemen Risiko

Potensi penyebab risiko yaitu Integritas Yang Belum Terbangun Dengan Baik dengan Indikator Risiko Pola Pikir dan Budaya Kerja. Pengendalian risiko yang dilaksanakan berupa Internalisasi serta penanaman pola pikir dan budaya kerja yang berintegritas

SASARAN KEGIATAN 6

Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah

Sasaran kegiatan Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah dengan indikator kinerja:

1. Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah

Indikator Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di wilayah adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum kekayaan intelektual sesuai tugas dan kewenangan Kantor Wilayah. Persentase penyelesaian aduan pelanggaran KI di wilayah diukur berdasarkan jumlah pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual yang ditangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

$$\begin{aligned} &= \frac{\sum \text{pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual yang ditangani}}{\sum \text{pengaduan yang masuk}} \times 100\% \\ &= \frac{4}{4} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	100%	333%

Terdapat 4 (empat) pengaduan pelanggaran Kekayaan Intelektual di tahun 2025 sebagai berikut:

1. Kasus pelanggaran Hak Cipta lagu Pelapor pencipta lagu Semarang Hebat dengan Nomor Laporan Pengaduan W.13.KI.08.01-07 tanggal 30 Januari 2025 dengan tahapan selesai;
2. Kasus Pelanggaran Hak Cipta Karaoke Pelapor WAMI dengan Nomor Laporan Pengaduan W.13.KI.08.01-12 tanggal 10 Februari 2025 dengan tahapan Mediasi;
3. Kasus Pelanggaran Hak Cipta Batik LP Ma'arif dengan Nomor Laporan Pengaduan W.13.KI.08.01-32 tanggal 05 Mei 2025 dengan tahapan penyelidikan;
4. Kasus Pelanggaran Hak Cipta Motif Batik Asem Tugu dengan Nomor Laporan Pengaduan W.13.KI.08.01-38 tanggal 10 Juni 2025 dengan tahapan penyelidikan.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan capaian kinerja pada tahun 2024 dan tahun 2023:

INDIKATOR KINERJA	2023		2024		2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	100%	100%	30%	100%	30%	100%

Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah tahun 2023 dengan target 100% terealisasi 100%, tahun 2024 mengalami perubahan target dengan target menjadi 30% terealisasi 100%, sedangkan pada Tahun 2025 target 30% dengan realisasi 100%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Indikator Kinerja Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	100%	100%	100%	30%	30%

Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah pada tahun 2024 sebesar 30% yang mengalami penurunan target sebesar 70% dibandingkan target tahun 2023. Target sebesar 30% di tahun 2025 tersebut jika dibandingkan dengan target yang tertuang dalam Renstra Kemenkumham 2020-2024 mengalami penurunan sebesar 70% sebagaimana tertuang dalam Renstra Perubahan Kemenkumham Tahun 2024 sesuai PerMenkumham No.7 Tahun 2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian perkara aduan pelanggaran KI dapat dihadapi dengan komunikasi dan koordinasi yang baik antara jajaran pimpinan, PPNS, terlapor dan pelapor, serta jajaran aparat penegak hukum lainnya dan DJKI sehingga penyelesaian perkara dapat tercapai meskipun dengan berbagai kendala yang ada. Kemampuan untuk berkomunikasi serta penyelesaian sengketa alternatif melalui mediasi dapat memperkuat kepercayaan masyarakat serta menjaga keberlanjutan perlindungan Kekayaan Intelektual.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang terbatas Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

g. Analisis Kegiatan Penunjang Tercapainya Target

Keberhasilan tersebut karena adanya kegiatan diseminasi dan sosialisasi.

h. Manajemen Risiko

Potensi penyebab risiko yaitu PPNS tidak hanya berfokus melakukan proses penyelesaian aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual, akan tetapi turut ikut serta dalam kegiatan non penyidikan. Pengendalian risiko yang dilaksanakan yaitu Memberikan arahan terkait tugas PPNS sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan melakukan evaluasi terhadap kinerja PPNS secara berkala.

SASARAN KEGIATAN 7

Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah

Sasaran kegiatan Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah dengan indikator kinerja:

1. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah berdasarkan masyarakat yang mendapatkan desiminasi atau edukasi tentang KI di wilayah. Tingkat pemahaman masyarakat diukur berdasarkan *pre* dan *post assessment* saat diseminasi atau edukasi tentang KI dilakukan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

$$\begin{aligned} &= \frac{\sum \text{peserta diseminasi atau edukasi yang memahami}}{\sum \text{seluruh peserta diseminasi atau edukasi di wilayah}} \times 100\% \\ &= \frac{2866}{3017} \times 100\% = 95\% \end{aligned}$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	95%	135%

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan capaian kinerja pada tahun 2024 dan tahun 2023:

INDIKATOR KINERJA	2023		2024		2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	-	-	70%	96%	70%	95%

Kegiatan yang terlaksana adalah sebagai berikut:

- 1) Diseminasi Kekayaan Intelektual dan penguatan teknis operator Kekayaan Intelektual dilaksanakan sejumlah 16 (enam belas) kali kegiatan bertempat di Kabupaten Jepara, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Semarang, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Grobogan, Kota Surakarta, Kabupaten

- Wonogiri, Kota Tegal, Purwokerto, Kabupaten Brebes, Kabupaten Wonosobo dan Kota Salatiga.
- 2) Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal, terlaksana sejumlah 14 (empat belas) kali kegiatan diseminasi di Purwokerto, Kota Tegal, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Magelang, Kota Semarang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Purworejo.
 - 3) Edukasi Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual, terlaksana sejumlah 4 (empat) kali kegiatan edukasi, bertempat di Kota Pekalongan, Kabupaten Brebes, Kabupaten Rembang dan Kabupaten Semarang.

Percentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah pada tahun 2025 memiliki target sebesar 70% dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Perubahan Kemenkumham Tahun 2024 sesuai PerMenkumham No.7 Tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun-tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Indikator Kinerja Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	-	-	-	70%	70%

Percentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah pada tahun 2025 memiliki target sebesar 70% dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Perubahan Kemenkumham Tahun 2024 sesuai PerMenkumham No.7 Tahun 2024, adapun target tersebut masih sama dengan target tahun 2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan Tercapainya Target

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2025 karena adanya dukungan anggaran, koordinasi yang berjalan baik dengan pihak-pihak terkait lainnya, serta pelaksanaan yang sejalan dengan perencanaan kinerja.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang terbatas Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

g. Analisis Kegiatan Penunjang Tercapainya Target

Keberhasilan tersebut karena adanya kegiatan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual yang dilakukan kantor wilayah di berbagai daerah selama Tahun 2025.

h. Manajemen Risiko

Potensi penyebab risiko yaitu Kurangnya kemampuan SDM masyarakat di wilayah Jawa Tengah terkait dengan DTLST (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu). Pengendalian risiko yang dilaksanakan yaitu Menyelenggarakan sosialisasi atau diseminasi terkait DTLST dan inventarisasi data potensi DTLST.

2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah berdasarkan peningkatan pengajuan permohonan KI oleh masyarakat di wilayah. Peningkatan pengajuan permohonan KI oleh masyarakat tersebut menggambarkan pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

$$= \frac{\sum \text{permohonan KI di wilayah berjalan} - \sum \text{permohonan KI di wilayah sebelumnya}}{\sum \text{permohonan KI di wilayah sebelumnya}} \times 100\%$$
$$= \frac{43381 - 32625}{32625} \times 100\% = 33\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	33%	165%

Kantor Wilayah telah menjalankan strategi dengan menjalin Kerjasama dengan *stakeholder* di wilayah Jawa Tengah, sebagai berikut:

- Mall Pelayanan Publik
 1. MPP/DPMPTSP Kabupaten Jepara;
 2. MPP Kabupaten Kudus;
 3. MPP Kabupaten Pati;
 4. MPP Surakarta;
 5. MPP Kabupaten Banyumas;
 6. MPP Alaya Sewagati Kota Tegal;
 7. MPP Kota Semarang;
 8. MPP Kabupaten Karanganyar
- Sentra Kekayaan Intelektual, Litbang/*Stakeholder* terkait lainnya
 1. Sentra KI Bappeda Kabupaten Tegal;
 2. Sentra KI Bappeda Kabupaten Magelang;
 3. Sentra KI Bappeda Kota Magelang;
 4. Sentra KI Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Rembang;
 5. Sentra KI Kabupaten Kebumen;
 6. Bappeda Kabupaten Wonogiri;
 7. Bappeda Kabupaten Purwokerto;
 8. Bappeda Kabupaten Wonosobo;
 9. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali;
 10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan;
 11. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal.
- Perguruan Tinggi
 1. Universitas Panca Sakti Tegal;
 2. Universitas Islam Negeri Pekalongan;
 3. Universitas Pekalongan;
 4. Universitas Slamet Sri Kendal;
 5. Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
 6. Universitas Diponegoro;
 7. Universitas Negeri Semarang;
 8. Universitas Wahid Hasyim;
 9. Universitas Ngudi Waluyo;
 10. Universitas Stikubank;
 11. Univesitas PGRI Semarang
 12. UIN Walisongo Semarang
 13. Politeknik Negeri Semarang;
 14. Politeknik Kesehatan Semarang;

15. Universitas Muhammadiyah Semarang;
16. Universitas Muria Kudus;
17. Institut Agama Islam Negeri Kudus;
18. Universitas Islam NU Jepara;
19. Universitas Negeri Sebelas Maret;
20. Universitas Muhammadiyah Surakarta;
21. Universitas Islam Batik Surakarta;
22. UIN Raden Mas Said Surakarta;
23. Universitas Slamet Riyadi;
24. Universitas Muhammadiyah Magelang;
25. Universitas Sains Ilmu Qur'an Wonosobo;
26. Universitas Jenderal Soedirman;
27. UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto;
28. Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
29. Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto;
30. Sekolah Tinggi Teknologi Telekomunikasi Purwokerto;
31. Politeknik Negeri Cilacap;
32. Universitas Kristen Satya Wacana;
33. Unika Soegijapranata Semarang;
34. Universitas Kusuma Husada Surakarta.

Catatan : semua instansi tersebut diatas adalah yang masih dan sedang menjalin Kerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan capaian kinerja pada tahun 2024 dan tahun 2023:

INDIKATOR KINERJA	2023		2024		2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	-	-	20%	41%	20%	33%

Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah pada tahun 2025 memiliki target sebesar 20% dimana indikator tersebut merupakan indikator

perubahan yang tertuang dalam Renstra Perubahan Kemenkumham Tahun 2024 sesuai PerMenkumham No.7 Tahun 2024, masih sama dengan tahun sebelumnya.

Terdapat perbedaan satuan target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2023 dengan tahun 2024 dan 2025. Pada tahun 2023 ditetapkan target kinerja berbasis kuantitas jumlah permohonan kekayaan intelektual, sedangkan pada tahun 2024 dan 2025 ditetapkan target kinerja berbasis persentase peningkatan permohonan kekayaan intelektual di Wilayah Jawa Tengah dengan hasil 41% melebihi target 20% yang telah ditentukan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Indikator Kinerja Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	-	-	-	20%	20%

Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah pada tahun 2025 memiliki target sebesar 20% dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Perubahan Kemenkumham Tahun 2024 sesuai PerMenkumham No.7 Tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun-tahun sebelumnya

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2025 karena adanya dukungan anggaran, koordinasi yang berjalan baik dengan pihak-pihak terkait lainnya, serta pelaksanaan yang sejalan dengan perencanaan kinerja.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang terbatas Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

g. Analisis Kegiatan Penunjang Tercapainya Target

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2025 karena adanya komitmen dari jajaran Kantor Wilayah dalam memberikan pelayanan terbaik

sesuai SOP, adanya Kerjasama dengan MPP, Sentra KI, Perguruan Tinggi/Litbang dalam memberikan pendampingan pendaftaran Kekayaan Intelektual.

h. Manajemen Risiko

Potensi penyebab risiko yaitu Kurangnya kemampuan SDM masyarakat di wilayah Jawa Tengah terkait dengan DTLST (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu). Pengendalian risiko yang dilaksanakan yaitu Menyelenggarakan sosialisasi atau diseminasi terkait DTLST dan inventarisasi data potensi DTLST.

SASARAN KEGIATAN 8

Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah

Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Indikator ini menggambarkan Indikator Kinerja Kepala Kantor Wilayah terkait peran pada Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum, khususnya pada kegiatan pengharmonisasian Raperda berdasarkan amanat Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diatur bahwa "Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.". Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi adalah proses penyelarasan substansi RPUU dan teknik penyusunan PUU sehingga menjadi PUU yang merupakan satu kesatuan utuh dalam kerangka sistem hukum nasional, sehingga diharapkan melalui kegiatan harmonisasi ini, dapat terbentuk Raperda yang responsif, aplikatif dan solutif. Kegiatan harmonisasi yang dimaksud dilaksanakan bagi produk hukum daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

$$\begin{aligned} &= \frac{\sum \text{Raperda yg terfasilitasi Kanwil}}{\sum \text{Jumlah raperda}} \times 100\% \\ &= \frac{1301}{1482} \times 100\% = 87,78\% \end{aligned}$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah Kementerian Hukum	80%	87,78%	109%

Dengan realisasi sebesar 87,78% pada Tahun 2025, target 80% permohonan terfasilitasi sampai dengan selesai oleh Kantor Wilayah telah melebihi target yang direncanakan dalam 1 (satu) tahun kerja. Berdasarkan data dari <https://linktr.ee/fpphdjateng> dan <https://e-harmonisasi.peraturan.go.id>, jumlah permohonan yang masuk sampai dengan kurun waktu 1 tahun (Januari-Desember) sebanyak 1.482 permohonan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.301 permohonan telah selesai sedangkan

sebanyak 181 permohonan sedang dalam proses pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah. Permohonan fasilitasi pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi tersebut terdiri atas 522 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan 960 Rancangan Peraturan Kepala Daerah.



Sebanyak keseluruhan 22 (dua puluh dua) orang (keikutsertaan 100%) Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah telah mengikuti pendalaman materi perancangan Perda pada tahun 2025.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan capaian kinerja pada tahun 2024 dan tahun 2023:

INDIKATOR KINERJA	2023		2024		Semester I 2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	100% (Jumlah permohonan selesai 1625 dari total permohonan sebanyak 1625)	80%	100% (jumlah permohonan selesai sebanyak 1703 dari total permohonan sebanyak 1703)	80%	87,78% (jumlah permohonan selesai sebanyak 1.301 dari total permohonan sebanyak 1.482)

Berdasarkan tabel diatas, dengan capaian sebesar 87,78%, target 80% permohonan terfasilitasi sampai dengan selesai oleh Kantor Wilayah sebanyak 1.301 permohonan yang seluruhnya telah dilakukan pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Indikator Kinerja Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	80%	80%	80%	80%

Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah pada Tahun 2025 dengan target 80% terealisasi 87,78%. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 tidak mengalami perubahan target yaitu sebesar 80%.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Adanya sinergitas dalam pelaksanaan fasilitasi pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Sinergitas tersebut diwujudkan dengan adanya komitmen bersama dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam hal pelaksanaan harmonisasi dan fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah secara simultan dan melalui koordinasi dengan stakeholder terkait di daerah pada bulan Februari-Maret 2023. Melalui upaya tersebut, Kantor Wilayah hadir dalam melakukan pendampingan fasilitasi pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, yang bertujuan meningkatkan kualitas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang terbatas Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

g. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Adanya sinergitas dalam pelaksanaan fasilitasi pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Sinergitas tersebut diwujudkan dengan adanya komitmen bersama dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam hal pelaksanaan harmonisasi dan fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah secara simultan dan melalui koordinasi dengan stakeholder terkait di daerah pada bulan Februari-Maret 2023. Melalui upaya tersebut, Kantor Wilayah hadir dalam melakukan pendampingan fasilitasi pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, yang bertujuan meningkatkan kualitas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

h. Manajemen Risiko

Potensi penyebab risiko yaitu Produk hukum daerah cenderung mengikuti perkembangan peraturan di tingkat pusat daripada kebutuhan hukum masyarakat di daerah. Pengendalian risiko yang dilaksanakan yaitu Penyampaian informasi pentingnya fasilitasi harmonisasi sejak tahap perencanaan pembentukan produk hukum daerah dan melakukan evaluasi terkait pelaksanaan koordinasi dalam proses pembentukannya.

SASARAN KEGIATAN 9

Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Sasaran kegiatan Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan dengan indikator kinerja Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan dengan target sebanyak 22 Orang telah direalisasikan sebanyak 22 (100%) mendapatkan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan yang mengindikasikan kinerja kantor wilayah yang optimal dalam mencapai target kinerja.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

$$\begin{aligned} &= \frac{\sum \text{Peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang}}{\sum \text{Target pembinaan}} \times 100\% \\ &= \frac{22}{22} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	22 Orang	22 Orang	100%

Selanjutnya untuk pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui kegiatan pendalaman materi perancangan Perda telah memenuhi target 100%. Sebanyak 22 (dua puluh dua) orang Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah telah mengikuti pendalaman materi perancangan Perda pada tahun 2025.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan capaian kinerja pada tahun 2023 dan tahun 2024:

INDIKATOR KINERJA	2023		2024		2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	22 orang	22 orang	22 orang	22 orang	22 orang	22 orang

Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 dengan target 22 orang terealisasi sebanyak 22 orang.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Indikator Kinerja Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	618 Orang	618 Orang	618 Orang	618 Orang	618 Orang

Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan pada Tahun 2025 dengan target 22 terealisasi 22. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 sebesar 618 orang dari 33 Kantor Wilayah.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Target kinerja telah terpenuhi sehingga tidak ada permasalahan yang menyebabkan ketidakberhasilan pemenuhan kinerja.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang terbatas Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

g. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Koordinasi yang telah berjalan baik dengan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kapasitas tenaga perancang peraturan perundang-undangan menjadi penunjang keberhasilan. Upaya yang akan dilakukan dalam mencapai target kinerja kedepannya secara umum antara lain dengan menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah (kabupaten/kota) untuk memberikan layanan fasilitasi penyusunan Raperda di wilayah jawa tengah, meningkatkan efektivitas dan efisiensi fasilitasi rancangan produk hukum di daerah melalui peningkatan kualitas SDM, kemudahan dalam mengakses layanan, serta meningkatkan kuantitas dan kualitas serta peran pembinaan perancang peraturan perundang-undangan melalui pelatihan dan pendidikan

h. Manajemen Risiko

Potensi penyebab risiko yaitu Sebagian besar perancang yang berkedudukan di Pemerintah Daerah belum menjalani diklat perancang. Pengendalian risiko yang dilaksanakan yaitu Pelaksanaan kegiatan rakor dengan instansi terkait agar terwujud sinergitas yang kolaboratif antara Kantor Wilayah dengan Pemerintah Daerah.

SASARAN KEGIATAN 10

Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah

1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan

Dasar Hukum: Pasal 97C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan yang menyatakan bahwa: “Selain jenis dan hierarki Peraturan Perundang undangan yang telah diatur dalam Pasal 46 ayat (21), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (1), Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 58, kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang undangan melakukan analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan”.

Analisis dan Evaluasi produk hukum daerah adalah kegiatan untuk menelaah dan menilai materi, proses pembentukan, dan pelaksanaan peraturan daerah yang berlaku sehingga diketahui kedayagunaan, kehasilaunaan, dan ketercapaian tujuan yang hendak dicapai, selanjutnya memberikan Rekomendasi apakah sebuah peraturan daerah dimaksud dicabut, diubah, tetap dan/atau tindakan lain.

Analisis dan evaluasi peraturan daerah dilakukan oleh Kantor Wilayah dengan melibatkan biro hukum/bagian hukum pemerintah daerah serta instansi terkait dan masyarakat. Peraturan daerah yang analisis dan evaluasi sesuai rencana, yaitu jumlah peraturan daerah yang dianalisis tiap tahun sesuai dengan rencana kerja strategis Kantor Wilayah

Fasilitasi perencanaan Perda adalah fasilitasi penyusunan Prolegda/Propemperda dan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik Perda yang diberikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah kepada Pemerintah Prov/Kab/Kota.

Prolegda/Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis

Naskah Akademik Perda adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Berikut merupakan formulasi perhitungan untuk indikator tersebut:

$$x = a + b + c + \dots + n$$

- a: analisis dan evaluasi produk hukum a
- b: analisis dan evaluasi produk hukum b
- c: analisis dan evaluasi produk hukum c
- n: analisis dan evaluasi produk hukum terakhir

$$\begin{aligned} &= \frac{\sum \text{realisasi analisis dan evaluasi produk hukum}}{\sum \text{target analisis dan evaluasi produk hukum}} \times 100\% \\ &= \frac{1}{1} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 dokumen	1 dokumen	100%

Dengan capaian sebesar 1 dokumen dari target sebesar 1 dokumen menunjukkan bahwa Kantor Wilayah Jawa Tengah berkinerja optimal dan optimis berhasil mencapai sasaran target kinerjanya di tahun 2025. Kegiatan dimaksud terdiri dari kegiatan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah dan fasilitasi perencanaan penyusunan Program Legislasi Daerah. Kegiatan fasilitasi penyusunan perencanaan legislasi daerah telah selesai dilaksanakan dan saat ini sedang dalam proses penyusunan laporan akhir sedangkan untuk kegiatan analisis dan evaluasi produk hukum daerah saat ini telah selesai melaksanakan kegiatan FGD Analisis dan Evaluasi peraturan perundang-undangan. Dimana untuk kegiatan analisis dan evaluasi hukum telah dilaksanakan dengan kegiatan meliputi persiapan analisis dan evaluasi hukum dan FGD Analisis dan Evaluasi Hukum, sedangkan untuk kegiatan fasilitasi penyusunan perencanaan legislasi daerah sudah dilaksanakan pada Bagian Hukum SETDA Kabupaten Sukoharjo, Bagian Hukum SETDA Kabupaten Wonosobo dan Bagian Hukum SETDA Kabupaten Klaten. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Fasilitasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Nomor: PHN.2-HN.02.02-03 dan kegiatan Analisis dan evaluasi peraturan daerah dilaksanakan sesuai dengan Surat Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.3-HN.01.01-03 tanggal 24 Januari 2024, Perihal Pelaksanaan Kegiatan Analisis dan Evaluasi Perda di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2024. Dengan demikian bisa dikatakan

bahwa Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kantor Wilayah Jawa Tengah telah berkinerja optimal dengan berhasil mencapai sasaran target kinerjanya.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan capaian kinerja pada tahun 2024, 2023 dan tahun 2022:

INDIKATOR KINERJA	2022		2023		2024		2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan capaian kinerja pada tahun 2024 dan tahun 2023:

INDIKATOR KINERJA	2023		2024		2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	-	-	1	1	1	1

Berdasarkan tabel diatas, bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah mampu mencapai target pada tahun 2023, 2024 dan 2025. Pada Tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan fasilitasi penyusunan perencanaan legislasi daerah di Bagian Hukum SETDA Kabupaten Tegal. Jika di tahun 2024 Kantor Wilayah dapat melaksanakan fasilitasi penyusunan Propemperda di 3 (tiga) Kabupaten, namun dengan adanya efisiensi anggaran, dimana sudah tidak terdapat lagi program fasilitasi penyusunan pembentukan peraturan daerah pada anggaran BPHN, sehingga fasilitasi penyusunan propemperda di tahun 2025 hanya dilaksanakan di Kabupaten Tegal. Berdasarkan hasil inventarisasi Propemperda di Kabupaten Tegal diperoleh bahwa pelaksanaan propemperda masih belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik secara substantif maupun teknis. Disamping itu terdapat Pemerintah Daerah yang belum melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Dimana dari hasil analisis dan evaluasi hukum didapatkan rekomendasi apakah produk hukum daerah yang dimaksud diubah, dicabut ataupun tetap. Hasil analisis dan evaluasi hukum ini dapat menjadi bahan dalam penyusunan program legislasi daerah. Sedangkan untuk kegiatan analisis dan

evaluasi peraturan daerah telah dilaksanakan dimulai dari tahap perencanaan pada bulan Maret dan akan berakhir dengan penyusunan laporan akhir pada bulan November. Pada bulan Juni ini Pokja Analisis dan Evaluasi Perda Kabupaten Magelang Sektor Swasembada Pangan telah melaksanakan kegiatan rapat internal pokja, rapat dengan narasumber dan FGD yang pelaksanaannya diselenggarakan di SETDA Kabupaten Magelang. Pasca ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum No 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum, maka tugas dan fungsi fasilitasi perencanaan penyusunan Propemperda yang dulu melekat pada Pusat Perencanaan BPHN kini telah beralih ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, namun dalam perjanjian kinerja kantor wilayah kegiatan fasilitasi perencanaan Propemperda masih melekat di tugas dan fungsi DIPA BPHN. Disamping itu belum terdapat Petunjuk Teknis Fasilitasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) yang dikeluarkan oleh Ditjen Peraturan Perundang-undangan, sehingga dalam pelaksanaannya Kantor Wilayah Jawa Tengah masih menggunakan Petunjuk Teknis Fasilitasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Nomor: PHN.2.HN.02.02-03 yang dikeluarkan oleh BPHN. Proses pembentukan kelompok kerja telah dilaksanakan pada bulan April 2025, Persiapan Analisis dan Evaluasi Hukum Produk Hukum Daerah telah dilaksanakan pada bulan Maret 2024, Rapat Internal Pokja telah dilaksanakan sebanyak tiga kali, meliputi bulan April, Mei dan Juni, Rapat dengan Narasumber dan Focus Group Discussion (FGD) Analisis dan Evaluasi Hukum telah dilaksanakan pada bulan Juni 2025. Penyusunan rekomendasi analisis dan evaluasi akan diagendakan pada bulan Agustus 2025 dan laporan akhir analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang akan disampaikan ke BPHN dan Pemerintah Daerah Provinsi serta Pemerintah Daerah Kabupaten pada bulan Desember 2025. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memberi penegasan peran dan kewenangan Kementerian Hukum khususnya Kantor Wilayah dalam melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum Produk Hukum Daerah baik yang berasal dari Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan pada tahun 2025 memiliki target sebesar 1 dokumen dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Perubahan Kemenkumham Tahun 2024 sesuai PerMenkumham No.7 Tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun-tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Indikator Kinerja Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	-	-	-	1	1

Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan pada tahun 2025 memiliki target sebanyak 1 dokumen telah terealisasi 1 dokumen, dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Perubahan Kemenkumham Tahun 2024 sesuai PerMenkumham No.7 Tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun-tahun sebelumnya.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan capaian kinerja kantor wilayah tersebut tidak terlepas dari peran seluruh jajaran Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum dalam mengoordinasikan dan menyinergikan kegiatan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang mempedomani Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-HN.01.03-07 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan, Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-PR.01.03-01 Tahun 2025 mengenai Pedoman Pelaksanaan Program Pembinaan Hukum Di Wilayah serta dukungan anggaran pembentukan regulasi dalam upayanya mewujudkan layanan internal yang optimal di kantor wilayah Tahun 2025.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang terbatas Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

g. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Adanya sinergitas dalam pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Di Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Sinergitas tersebut diwujudkan dengan adanya komitmen bersama dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam hal pelaksanaan analisis dan evaluasi produk hukum daerah. Melalui upaya tersebut,

Kantor Wilayah hadir dalam melakukan pendampingan fasilitasi analisis dan evaluasi Hukum Produk Hukum Daerah, yang bertujuan meningkatkan kualitas Produk Hukum Daerah.

h. Manajemen Risiko

Potensi penyebab risiko yaitu Hasil analisis dan evaluasi peraturan daerah tidak ditindaklanjuti karena adanya pendapat yang berbeda dari Pemerintah Daerah terkait rekomendasi yang disampaikan oleh Kantor Wilayah. Pengendalian risiko yang dilaksanakan yaitu Penyebarluasan informasi pentingnya analisis dan evaluasi perda secara lebih luas, dan Melakukan inventarisasi jumlah hasil analisis analisis dan evaluasi yang tidak ditindaklanjuti serta Melakukan sosialisasi pentingnya tindak lanjut analisis dan evaluasi dengan menggandeng pemerintah daerah.

2. Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah

Dasar Hukum: Pasal 97C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan yang menyatakan bahwa: “Selain jenis dan hierarki Peraturan Perundang undangan yang telah diatur dalam Pasal 46 ayat (21, Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (1), Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 58, kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang undangan melakukan analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan”.

Analisis dan Evaluasi produk hukum daerah adalah kegiatan untuk menelaah dan menilai materi, proses pembentukan, dan pelaksanaan peraturan daerah yang berlaku sehingga diketahui kedayagunaan, kehasilgunaan, dan ketercapaian tujuan yang hendak dicapai, selanjutnya memberikan Rekomendasi apakah sebuah peraturan daerah dimaksud dicabut, diubah, tetap dan/atau tindakan lain.

Analisis dan evaluasi peraturan daerah dilakukan oleh Kantor Wilayah dengan melibatkan biro hukum/bagian hukum pemerintah daerah serta instansi terkait dan masyarakat. Peraturan daerah yang analisis dan evaluasi sesuai rencana, yaitu jumlah peraturan daerah yang dianalisis tiap tahun sesuai dengan rencana kerja strategis Kantor Wilayah.

Fasilitasi perencanaan Perda adalah fasilitasi penyusunan Prolegda/Propemperda dan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik Perda yang diberikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Kemenkumham kepada Pemerintah Prov/Kab/Kota.

Prolegda/Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis .

Naskah Akademik Perda adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Berikut merupakan formulasi perhitungan untuk indikator tersebut:

$$x = a + b + c + \dots + n$$

- a: analisis dan evaluasi produk hukum a
- b: analisis dan evaluasi produk hukum b
- c: analisis dan evaluasi produk hukum c
- n: analisis dan evaluasi produk hukum terakhir

$$= \frac{\sum \text{realisasi fasilitasi perencanaan peraturan daerah}}{\sum \text{target fasilitasi perencanaan peraturan daerah}} \times 100\% \\ = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Pada Tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan fasilitasi penyusunan perencanaan legislasi daerah di Bagian Hukum SETDA Kabupaten Sukoharjo, Bagian Hukum SETDA Kabupaten Klaten dan Bagian Hukum SETDA Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan hasil inventarisasi Propemperda di Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonosobo diperoleh bahwa pelaksanaan propemperda masih belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik secara substantif maupun teknis. Disamping itu terdapat Pemerintah Daerah yang belum melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Dimana dari hasil analisis dan evaluasi hukum didapatkan rekomendasi apakah produk hukum daerah yang dimaksud diubah, dicabut ataupun tetap. Hasil analisis dan evaluasi hukum ini dapat menjadi bahan dalam penyusunan program legislasi daerah. Sedangkan untuk kegiatan analisis dan evaluasi peraturan daerah telah dilaksanakan dimulai dari tahap perencanaan pada bulan Mei dan berakhir dengan penyusunan laporan akhir pada bulan November. Pada bulan Juli ini Pokja Analisis dan Evaluasi Perda Kota Magelang Sektor Perizinan dan Perekonomian telah melaksanakan kegiatan FGD yang pelaksanaannya diselenggarakan di SETDA Kota Magelang. Dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyusunan perencanaan legislasi daerah, Badan

Pembinaan Hukum Nasional telah mengeluarkan Petunjuk Teknis Fasilitasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Nomor: PHN.2.HN.02.02-03. Surat ini menjadi Petunjuk dalam pelaksanaan Fasilitasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA). Pedoman ini dikeluarkan setelah kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Legislasi Daerah telah dilaksanakan. Proses pembentukan kelompok kerja telah dilaksanakan pada bulan April 2025, Persiapan Analisis dan Evaluasi Hukum Produk Hukum Daerah telah dilaksanakan pada bulan Mei 2025, Focus Group Discussion (FGD) Analisis dan Evaluasi Hukum telah dilaksanakan pada bulan Juni 2025. Penyusunan rekomendasi analisis dan evaluasi telah dilaksanakan pada bulan agustus 2025 dan laporan akhir analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Sektor Pariwisata telah dilaporkan ke Badan Pembinaan Hukum Nasional pada bulan Desember. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memberi penegasan peran dan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM khususnya Kantor Wilayah dalam melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum Produk Hukum Daerah baik yang berasal dari Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah pada tahun 2024 memiliki target sebanyak 1 dokumen telah terealisasi 1 dokumen, dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Perubahan Kemenkumham Tahun 2024 sesuai PerMenkumham No.7 Tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun-tahun sebelumnya.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan capaian kinerja pada tahun 2023 dan tahun 2024:

INDIKATOR KINERJA	2023		2024		2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen

Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah pada tahun 2025 memiliki target sebanyak 1 dokumen telah terealisasi 1 dokumen, dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Perubahan Kemenkumham Tahun 2024 sesuai PerMenkumham No.7 Tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun-tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Indikator Kinerja Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen

Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah pada tahun 2024 memiliki target sebanyak 1 dokumen telah terealisasi 1 dokumen, dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Perubahan Kemenkumham Tahun 2024 sesuai PerMenkumham No.7 Tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun-tahun sebelumnya.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan capaian kinerja kantor wilayah tersebut tidak terlepas dari peran seluruh jajaran Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam mengoordinasikan dan menyinergikan kegiatan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang mempedomani Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-HN.01.03-07 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan, Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-HN.01.03.08 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat dan Daerah, Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.PR.01.03-01 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Kegiatan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2025 serta dukungan anggaran pembentukan regulasi dalam upayanya mewujudkan layanan internal yang optimal di Kantor Wilayah Tahun 2025.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang terbatas Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

g. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Adanya sinergitas dalam pelaksanaan Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah Di Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Sinergitas tersebut diwujudkan dengan adanya komitmen bersama dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa

Tengah dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam hal Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah daerah. Melalui upaya tersebut, Kantor Wilayah hadir dalam melakukan Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah.

h. Manajemen Risiko

Potensi penyebab risiko yaitu Munculnya Propem Perda tanpa didahului dengan adanya analisis dan evaluasi maupun penentuan skala prioritas disebabkan oleh berbagai faktor. Pengendalian risiko yang dilaksanakan yaitu Memperluas cakupan kegiatan fasilitasi penusunan perencanaan Propemperda, dan Melakukan inventarisasi propemperda yang belum melalui analisis dan evaluasi maupun penentuan skala prioritas, serta Pendampingan lebih lanjut untuk daerah dengan yang menyusun propemperda tanpa didahului analisis dan evaluasi maupun penentuan skala prioritas.

SASARAN KEGIATAN 11

Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah

Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah

Anggota JDIHN di wilayah adalah Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagian/bidang yang menangani Dokumen dan Informasi Hukum pada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi. Anggota JDIHN yang dikelola adalah Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagian/bidang yang menangani Dokumen dan Informasi Hukum pada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi yang mendapatkan pembinaan pengelolaan JDIH dari Kantor Wilayah pada tahun berjalan.

Total Anggota JDIHN di wilayah adalah jumlah seluruh Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagian/bidang yang menangani Dokumen dan Informasi Hukum pada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi.

Pengelolaan Anggota JDIHN yang dimaksud adalah pembinaan dan pengembangan JDIH di wilayah.

Dengan target sebesar 25% telah tercapai sebesar 75%. Dari 100 anggota JDIHN sejumlah 75 anggota JDIHN berpartisipasi aktif. Masih terdapat anggota JDIHN yang belum memiliki pengelola dan membentuk web JDIH serta terdapat anggota JDIHN yang telah membentuk web JDIH namun tidak melaksanakan pengelolaan JDIH karena adanya keterbatasan SDM dan sarana prasarana.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Anggota JDIHN yg dikelola}}{\text{\Sigma total anggota JDIHN di wilayah}} \times 100\% \\ &= \frac{76}{101} \times 100\% = 75,25\% \end{aligned}$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	75,25%	301%

Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN, dengan angka realisasi 75,25% diperoleh dari jumlah anggota JDIHN di Provinsi Jawa Tengah yang telah memiliki website JDIH dan telah terintegrasi dengan website JDIHN. Sampai dengan Tahun 2025, dari 101 anggota JDIHN di Provinsi Jawa Tengah, 36 website JDIH milik Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota, 36 website JDIH milik Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta 3 website JDIH milik Perguruan Tinggi Negeri/Swasta (Universitas Tidar, Universitas Panca Sakti, dan Universitas Jend Soedirman) dinyatakan aktif dan terintegrasi dengan website JDIHN. Sedangkan capaian 301% diperoleh dengan membandingkan antara realisasi 75,25% dengan target 25%.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan capaian kinerja pada tahun 2023, 2022 dan tahun 2024:

INDIKATOR KINERJA	2022		2023		2024		2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	20%	100%	20%	80%	20%	74%	25%	75,25%

Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN, **Tahun 2023** dengan angka **realisasi 80%** diperoleh dari jumlah anggota JDIHN di Provinsi Jawa Tengah yang aktif, namun pada **Tahun 2024** jumlah tersebut menurun menjadi **realisasi 74%** karena beberapa website JDIH dinyatakan sudah tidak aktif dan belum dilaksanakan pengaktifan dan pengintegrasian kembali dengan website JDIHN.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Indikator Kinerja Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	-	20%	20%	20%	25%

Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah pada tahun 2025 sebesar 25% yang mengalami kenaikan target sebesar 5% dibandingkan target tahun 2024. Target sebesar 20% di tahun 2024 tersebut jika dibandingkan dengan target yang tertuang dalam Renstra Kemenkumham 2020-2024 mengalami kenaikan sebesar 5% sebagaimana tertuang dalam Renstra Perubahan Kemenkumham Tahun 2024 sesuai PerMenkumham No.7 Tahun 2024.

Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif pada Tahun 2024 dengan target 25% terealisasi 75,25%. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 tidak mengalami

perubahan target yaitu sebanyak 20%. Namun pada tahun 2025 mengalami perubahan menjadi 25%.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2025 karena adanya koordinasi dan pembinaan kepada anggota JDIHN di wilayah yang dilaksanakan secara berkala melalui kegiatan Rapat Koordinasi serta Pembinaan dan Pengembangan JDIH di wilayah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah bekerja sama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang terbatas Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

g. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Adanya komunikasi dan koordinasi yang terjalin dengan baik dengan BPHN selaku Pembina JDIH maupun Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah selaku Pembina JDIH di wilayah.

h. Manajemen Risiko

Potensi penyebab risiko yaitu Tidak semua Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Tengah memiliki Perpustakaan Hukum. Pengendalian risiko yang dilaksanakan yaitu Meningkatkan koordinasi dengan beberapa perguruan tinggi yang sekiranya bisa didorong untuk pembuatan dan pengintegrasian web JDIH, dan Melakukan inventarisir data PTN/PTS yang belum memiliki JDIH, serta Membuat MOU dengan PTN/PTS dalam pembentukan JDIH.

SASARAN KEGIATAN 12

Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah

1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi

Layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diberikan secara cuma-cuma yang bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum serta akses keadilan kepada masyarakat khususnya orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum. Layanan bantuan hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dalam bentuk pendampingan hukum baik litigasi maupun nonlitigasi.

Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Unit Kerja Kementerian Hukum yang salah satu tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian bantuan hukum.

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pelaksana Bantuan Hukum adalah Advokat, Paralegal, Dosen, dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum yang terdaftar dalam Pemberi Bantuan Hukum.

Bantuan hukum litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya yang diberikan kepada penerima bantuan hukum untuk mengimbangi kewenangan para penegak hukum dan melindungi hak-hak setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum dalam hal:

1. perkara pidana pada tahap penyidikan, dan persidangan;
2. perkara perdata pada tahap gugatan dan persidangan; dan
3. perkara tata usaha negara pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan persidangan.

Pada Tahun 2025 jumlah permohonan bantuan hukum litigasi di wilayah yaitu sejumlah **1.216 permohonan**, dimana diantaranya **1.191 permohonan** telah dilayani sampai dengan proses pencairan anggaran (98%). Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan target sebesar 82% telah tercapai sebesar 98% dengan formula sebagai berikut:

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

$$\begin{aligned} &= \frac{\sum \text{layanan bantuan hukum litigasi yg diberikan}}{\sum \text{permohonan layanan bantuan hukum litigasi}} \times 100\% \\ &= \frac{1.191}{1.216} \times 100\% = 98\% \end{aligned}$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	98%	119%

Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan angka realisasi 98% diperoleh dari perbandingan antara jumlah permohonan yang diterima sampai dengan tahap pencairan anggaran (*reimbursement*) sejumlah 1.191 permohonan dengan jumlah permohonan yang masuk sejumlah 1.216 permohonan. Sedangkan capaian 119% diperoleh dengan membandingkan antara realisasi 98% dengan target 82%.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan capaian kinerja pada tahun 2023 dan tahun 2024:

INDIKATOR KINERJA	2022		2023		2024		2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	77%	84,00%	81%	88,56%	81%	91,66%	82%	98%

Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pada Tahun 2023 angka realisasi 88,56% diperoleh dari perbandingan antara jumlah permohonan yang diterima sampai dengan tahap pencairan anggaran (*reimbursement*) sejumlah 813 permohonan dengan jumlah permohonan yang masuk sejumlah 918 permohonan. Sedangkan pada Tahun 2024 angka realisasi 91,66% diperoleh dari perbandingan antara jumlah permohonan yang diterima sampai dengan tahap pencairan anggaran (*reimbursement*) sejumlah 1.352 permohonan dengan jumlah permohonan yang masuk sejumlah 1.475 permohonan. Hal tersebut menunjukkan adanya perbandingan persentase permohonan yang diterima sampai dengan tahap pencairan pada Tahun 2024 menurun dibandingkan dengan Tahun 2023 namun lebih banyak dibandingkan dengan Tahun 2022, dan jumlah permohonan yang masuk pada Tahun 2024 juga menurun dibandingkan Tahun 2023 namun meningkat dibandingkan pada Tahun 2022.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Indikator Kinerja Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	-	77%	81%	81%	82%

Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada Tahun 2024 dengan target 82% terealisasi 89,47%. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 dengan target sebesar 77%, sedangkan di Tahun 2022 dan Tahun 2023 ada peningkatan target yaitu sebanyak 81% dan meningkat kembali di Tahun 2024 sebesar 82% di tahun 2024 sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Kemenkumham 2020-2024 mengalami kenaikan sebesar 1% sebagaimana tertuang dalam Renstra Perubahan Kemenkumham Tahun 2024 sesuai PerMenkumham No.7 Tahun 2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2025 karena adanya dukungan anggaran, sarana prasarana dan penyelesaian permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani di wilayah yang terselesaikan secara tepat waktu.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang terbatas Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

g. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Kegiatan pengawasan dan pelaksanaan bantuan hukum menjadi penunjang keberhasilan, serta adanya sosialisasi dan pengawasan kepada OBH terakreditasi terkait dengan Standar Layanan Bantuan Hukum.

h. Manajemen Risiko

Potensi penyebab risiko yaitu Admin OBH yang seharusnya hanya melaksanakan tugas untuk mengelola Sidbankum dan berkas permohonan bantuan hukum, masih dibebani tugas lain sehingga kurang fokus. Pengendalian risiko yang dilaksanakan yaitu Pembagian tugas pada verifikator Kanwil sehingga mempercepat proses verifikasi, dan Pembuatan grup khusus admin OBH, serta Mengusulkan penambahan jumlah pegawai atau PPNPN untuk membantu mengelola sidbankum.

2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi

Layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diberikan secara cuma-cuma yang bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum serta akses keadilan kepada masyarakat khususnya orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum. Layanan bantuan hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dalam bentuk pendampingan hukum baik litigasi maupun nonlitigasi.

Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Unit Kerja Kementerian Hukum yang salah satu tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian bantuan hukum.

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pelaksana Bantuan Hukum adalah Advokat, Paralegal, Dosen, dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum yang terdaftar dalam Pemberi Bantuan Hukum.

Bantuan hukum nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaiakannya. Bantuan hukum nonlitigasi diberikan demi tersosialisasinya hak-hak setiap warga negara khususnya orang miskin ketika mendapatkan permasalahan hukum dan upaya untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah hukum yang ada dalam masyarakat di luar pengadilan, yang dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Penyuluhan hukum;
2. Konsultasi hukum;
3. Investigasi kasus;
4. Penelitian hukum;
5. Mediasi;
6. Negosiasi;
7. Pemberdayaan masyarakat;
8. Pendampingan di luar pengadilan; dan
9. Drafting dokumen hukum.

Pada Tahun 2025 jumlah permohonan bantuan hukum non-litigasi di wilayah yaitu sejumlah **428 permohonan**, dimana **419 permohonan** diantaranya telah dilayani (98%). Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan target sebesar 80% tercapai sebesar 98% dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

$$= \frac{\sum \text{kegiatan bankum non-litigasi yang diberikan di Kanwil}}{\sum \text{Total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi di Kanwil}} \times 100\%$$

$$= \frac{419}{428} \times 100\% = 98\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	98%	122%

Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan angka realisasi 98% diperoleh dari perbandingan antara jumlah permohonan yang diterima sampai dengan tahap pencairan anggaran (*reimbursement*) sejumlah 419 permohonan dengan jumlah permohonan yang masuk sejumlah 428 permohonan. Sedangkan capaian 106,32% diperoleh dengan membandingkan antara realisasi 98% dengan target 80%.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan capaian kinerja pada tahun 2023, 2022 dan tahun 2024:

INDIKATOR KINERJA	2022		2023		2024		2025	
	TARGET	REALI SASI	TARGET	REALI SASI	TARGET	REALI SASI	TARGET	REALISASI
Persentase Layanan Bantuan Hukum NonLitigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	79%	81,70%	79%	79,39%	80%	91,75%	80%	98%

Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pada Tahun 2022 angka realisasi 81,70% diperoleh dari perbandingan antara jumlah permohonan yang diterima sampai dengan tahap pencairan anggaran (*reimbursement*) sejumlah 389 permohonan dengan jumlah permohonan yang masuk sejumlah 490 permohonan. Sedangkan pada Tahun 2024 angka realisasi 91,75% diperoleh dari perbandingan antara jumlah permohonan yang diterima sampai dengan tahap pencairan anggaran (*reimbursement*) sejumlah 378 permohonan dengan jumlah permohonan yang masuk sejumlah 412 permohonan. Hal tersebut menunjukkan adanya perbandingan jumlah permohonan yang masuk pada Tahun 2024 menurun dibandingkan dengan Tahun 2023

namun lebih banyak dari Tahun 2022, dan persentase permohonan yang diterima diterima pada Tahun 2024 menurun dibandingkan Tahun 2023 namun meningkat dari Tahun 2022.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Indikator Kinerja Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Layanan Bantuan Hukum NonLitigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	79%	80%	80%	80%	80%

Percentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada Tahun 2025 dengan target 80% terealisasi 98%. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 dengan target sebesar 79% sedangkan pada Tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 tidak mengalami perubahan target yaitu sebanyak 80%.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2025 karena adanya dukungan anggaran, sarana prasarana dan penyelesaian permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani di wilayah yang terselesaikan secara tepat waktu.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang terbatas Kantor Wilayah mampu melaksanakan kinerja yang optimal.

g. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Meskipun kegiatan pengawasan dan pelaksanaan bantuan hukum serta sosialisasi dan pengawasan kepada OBH terakreditasi telah rutin dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Jawa Tengah, namun masih terdapat beberapa OBH yang belum bisa memenuhi persyaratan dalam proses pencairan anggaran bantuan hukum non litigasi

h. Manajemen Risiko

Potensi penyebab risiko yaitu Kurang minatnya OBH untuk melaksanakan kegiatan non litigasi. Pengendalian risiko yang dilaksanakan yaitu Memperkenalkan OBH kepada Pemerintah Daerah dan UPT Pemasyarakatan sehingga bisa memaksimalkan anggaran non litigasi yang tersedia, dan Pembuatan grup khusus admin OBH, serta Monitoring pelaksanaan kegiatan non litigasi.

SASARAN KEGIATAN 13

Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah

Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat dilakukan dengan dibentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum sesuai peraturan yang berlaku. Proses pembentukan desa/kelurahan sadar hukum diawali dengan pembentukan Kelompok KADARKUM yang selanjutnya dilakukan pembinaan dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung sehingga terwujudlah desa/kelurahan binaan yang memenuhi syarat sebagai desa/kelurahan binaan berdasarkan atas usulan dari masingmasing Kantor Wilayah.

Desa/Kelurahan Binaan adalah desa/kelurahan atau wilayah administratif setingkat yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan binaan. Kriteria Desa/Kelurahan Binaan:

- a. SK Pembentukan Kelompok KADARKUM;
- b. Laporan kegiatan Pembinaan Kelompok KADARKUM;
- c. SK Pembentukan Desa/Kelurahan Binaan;
- d. Laporan kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan.

Pengukuhan adalah pengakuan suatu desa/kelurahan dengan predikat sebagai desa/kelurahan binaan menuju desa/kelurahan sadar hukum melalui surat keputusan Kepala Kantor Wilayah.

Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah desa/kelurahan/wilayah administratif setingkat yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan sadar hukum. Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum:

- e. Memenuhi Kriteria Desa/Kelurahan Binaan;
- f. Mengisi Kuesioner Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- g. SK Gubernur tentang Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- h. Melampirkan Surat Pernyataan calon penerima penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan.

Pada Triwulan I Tahun 2024 yaitu sebanyak 32 Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah dengan target sebesar 70% telah tercapai sebesar 100%.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sum \text{desa/kelurahan binaan yg dikukuhkan}}{\sum \text{usulan desa/kelurahan binaan dari masing - masing Kanwil}} \times 100\% \\
 &= \frac{32}{32} \times 100\% = 100\%
 \end{aligned}$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	100%	142%

Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah, dengan angka realisasi 100% diperoleh dari perbandingan antara jumlah 32 Kelurahan memenuhi kriteria sebagai Kelurahan Binaan Sadar Hukum dari usulan Kantor Wilayah sejumlah 32 Kelurahan di Kota Semarang. Sedangkan capaian 142% diperoleh dengan membandingkan antara realisasi 100% dengan target 70%.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan capaian kinerja pada tahun 2023, 2022 dan tahun 2024:

INDIKATOR KINERJA	2022		2023		2024		2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	85,71 %	70%	100,00 %	70%	77,42	70%	100%

Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah, pada Tahun 2023 realisasi 100% karena masih dilaksanakan proses pengumpulan data dukung penilaian sebagai dasar usulan kepada Gubernur, sedangkan pada Tahun 2024 realisasi 77,42% diperoleh dari perbandingan antara jumlah 96 Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum yang mendapatkan penetapan dari Gubernur untuk menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan jumlah 124 Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Indikator Kinerja Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	70%	70%	70%	70%

Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah pada Tahun 2025 dengan target 70% terealisasi 100%. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 tidak mengalami perubahan target yaitu sebanyak 70%.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan capaian kinerja Kantor Wilayah tidak terlepas dari peran seluruh jajaran Kantor Wilayah, anggaran yang tersedia, sarana prasarana serta dukungan dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung dan mewujudkan sasaran meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah pada Tahun 2025.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang terbatas Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

g. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Daerah. Adanya kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung, koordinasi dan komunikasi dengan BPHN selaku pembina kegiatan di wilayah.

h. Manajemen Risiko

Potensi penyebab risiko yaitu Penyelenggaraan Desa / Kelurahan Sadar Hukum hanya bergantung pada political will dari Pemerintah Daerah setempat dan acapkali Pemerintah Daerah menganggap program peningkatan kesadaran hukum tersebut hanya sebagai bentuk tugas tambahan yang membebankan pihak terkait. Pengedalian risiko yang dilaksanakan yaitu Berkoordinasi dan bekerja sama dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pembentukan desa sadar hukum, dan Melakukan inventarisir Desa Sadar Hukum, serta Menyusun SK Gubernur Jawa Tengah tentang Tim Peningkatan Kesadaran Hukum di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan melibatkan instansi terkait dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota.

SASARAN KEGIATAN 14

Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah

Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti adalah dilakukannya upaya untuk meningkatkan kualitas kebijakan hukum dan pelayanan publik di wilayah, khususnya meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum pada Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, serta Divisi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum.

Terdapat 5 (lima) kegiatan Pendampingan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum di Wilayah dan 1 (satu) Evaluasi Pelaksanaan SPAK-SPKP di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pendampingan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum di Wilayah Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara tertanggal 19-20 Mei 2025;
2. Kegiatan Pendampingan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum di Wilayah Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal tertanggal 19-20 Mei 2025;
3. Kegiatan Pendampingan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum di Wilayah Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri tertanggal 4-5 Juni 2025;
4. Kegiatan Pendampingan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum di Wilayah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Brebes tertanggal 11-12 Juni 2025;
5. Kegiatan Pendampingan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum di Wilayah Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar tertanggal 17-18 Juni 2025.

Evaluasi Pelaksanaan SPAK-SPKP di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah dilakukan terhadap layanan publik di bidang hukum yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Tahun 2025.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

$$\begin{aligned} &= \frac{\sum \text{Rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan}}{\sum \text{Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}} \times 100\% \\ &= \frac{80}{80} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	100%	125%

Kegiatan Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum di Wilayah pada Tahun 2025 menghasilkan capaian SK Tim Analisa Kebijakan, Profil Analisa Kebijakan Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Proposal Analisa Kebijakan dan Instrumen Penggalian Data Analisa Kebijakan di Wilayah. Terkait pengumpulan data di lapangan serta penyusunan bagian pembahasan Analisa Kebijakan, penyusunan simpulan dan rekomendasi kebijakan akan dilaksanakan pada bulan Juli ini terfokus pada Unit Pelaksanaan Teknis yang ada.

Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum Wilayah Jawa Tengah, yang dalam hal ini mengambil tema Penilaian Indeks Reformasi Hukum.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan capaian kinerja pada tahun 2024 dan tahun 2023:

INDIKATOR KINERJA	2023		2024		2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	-	-	80%	80%	80%	100%

Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti pada Tahun 2025 dengan target 80% dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Perubahan Kemenkumham Tahun 2024 sesuai PerMenkumham No.7 Tahun 2024, masih sama dengan target Tahun 2024.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Indikator Kinerja Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	-	-	-	80%	80%

Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti pada Tahun 2025 dengan target 80% dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Perubahan Kemenkumham Tahun 2024 sesuai PerMenkumham No.7 Tahun 2024, masih sama dengan target pada tahun 2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Tercapainya realisasi sesuai dengan target capaian kinerja di tahun 2025 yaitu dengan target 80% realisasi 100% maka dari itu capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 125%.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang terbatas Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

g. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Kegiatan Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah menjadi pernunjang keberhasilan.

h. Manajemen Risiko

Potensi penyebab risiko yaitu Timeline penyusunan Analisa Strategi Kebijakan terlalu berdekatan dengan Tindak Lanjut Rekomendasi. Pengendalian risiko yang dilaksanakan yaitu Penentuan tema disesuaikan dengan program yang sedang dijalankan, dan Melakukan penunjukan TIM Penyusunan Analisa Strategi Kebijakan, serta penentuan tema disesuaikan dengan program yang sedang dijalankan.

Berikut merupakan rangkuman dari Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah dengan 6 Unit Eselon I yang terdiri dari 3 Program, 13 Sasaran Kegiatan dan 14 Indikator Kinerja Kegiatan untuk Periode November - Desember 2025:

Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Periode November – Desember 2025
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah dengan Unit Eselon

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%
2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,86 Indeks
3	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,22 Indeks
4	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,2%
5	Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%
6	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayah	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayah yang Selesai Ditangani	31%
7	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,50 Level
8	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	3. Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum 4. Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100% 100%
9	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	15%
10	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	89%

11	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	70%
12	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Percentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	11%
13	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Percentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95,5%

SASARAN KEGIATAN 1

Terwujudnya Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK

Program Dukungan Manajemen. yang diturunkan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Tahun 2025 yaitu sebanyak 2 sasaran kegiatan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagaimana dalam tabel berikut:

1. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK

Salah satu indikator penting dalam menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Rekomendasi BPK merupakan hasil evaluasi atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah yang harus ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindak lanjut yang efektif dan tepat waktu mencerminkan komitmen instansi dalam memperbaiki kelemahan yang ditemukan, baik terkait sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap regulasi, maupun efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam konteks penyusunan LKjIP, terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK menjadi bagian integral dari penilaian kinerja instansi, karena secara langsung mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara/daerah. Upaya tindak lanjut dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan oleh unit kerja terkait, dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*):

SASARAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Kantor Wilayah Jawa Tengah telah melaksanakan tindak lanjut seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada tingkat Kantor Wilayah maupun pada UPT di lingkup Kantor Wilayah Jawa Tengah.

Indikator kinerja kegiatan (IKK) Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dihitung dengan menggunakan formulasli sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan}} \times 100\% \\
 &= \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%
 \end{aligned}$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023-2024

INDIKATOR KINERJA	2023		2024		2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	-	-	-	-	100%	100%

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di pada tahun 2025 memiliki target sebesar 100% dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Kemenkum Tahun 2025-2029 sesuai PerMenkumham No.42 Tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun 2023 dan 2024.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2021-2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Indikator Kinerja Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	-	-	-	-	100%

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2025 memiliki target sebesar 100% dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Kemenkum Tahun 2025-2029 sesuai PerMenkumham No.42

Tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun-tahun sebelumnya.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2025 karena adanya dukungan dari jajaran baik Kantor Wilayah Jawa Tengah maupun seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah dalam menyelenggarakan tindak lanjut rekomendasi dari BPK.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang terbatas Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

g. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Kegiatan penunjang keberhasilan Kantor Wilayah yaitu adanya kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi Kantor Wilayah Jawa Tengah dengan Unit Pelaksana Teknis dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi dari BPK.

h. Manajemen Risiko

Potensi penyebab risiko yaitu Integritas Yang Belum Terbangun Dengan Baik dengan Indikator Risiko Pola Pikir dan Budaya Kerja. Pengendalian risiko yang dilaksanakan berupa Internalisasi serta penanaman pola pokir dan budaya kerja yang berintegritas.

SASARAN KEGIATAN 2

Meningkatnya kepuasan Unit Eselon II terhadap Layanan Dokumen Manajemen

Program Dukungan Manajemen yang diturunkan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Tahun 2025 yaitu sebanyak 2 sasaran kegiatan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagaimana dalam tabel berikut:

1. Meningkatnya Kepuasan Unit Eselon II terhadap Layanan Dukungan Manajemen

Indeks Kepuasan terhadap Layanan Dukungan Manajemen digunakan sebagai indikator kinerja untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan internal terhadap mutu layanan yang diberikan. Indeks ini mencerminkan persepsi dan penilaian pengguna layanan terhadap aspek kecepatan, ketepatan, kemudahan, transparansi, dan profesionalisme dalam penyelenggaraan layanan dukungan manajemen. Hasil pengukuran indeks kepuasan menjadi masukan penting dalam mengidentifikasi kekuatan dan area yang memerlukan perbaikan guna meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan.

SASARAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	3,86 Indeks	3,87 Indeks	100%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Kantor Wilayah Jawa Tengah telah melaksanakan indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen pada tingkat Kantor Wilayah maupun pada UPT di lingkup Kantor Wilayah Jawa Tengah.

Indikator kinerja kegiatan (IKK) indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen dihitung dengan menggunakan formasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang} \\ &= \frac{19,35}{5} \times 100 = 3,87 \end{aligned}$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,86 Indeks	3,87 Indeks	100%

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023-2024

INDIKATOR KINERJA	2023		2024		2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	-	-	-	-	3,86 Indeks	3,87 Indeks

Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen di pada tahun 2025 memiliki target sebesar 3,86 Indeks dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Kemenkum Tahun 2025-2029 sesuai PerMenkumham No.42 Tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun 2023 dan 2024.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2021-2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Indikator Kinerja Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	-	-	-	-	3,86 Indeks

Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen pada tahun 2025 memiliki target sebesar 3,86 Indeks dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Kemenkum Tahun 2025-2029 sesuai PerMenkumham No.42 Tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun-tahun sebelumnya.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2025 karena adanya dukungan dari jajaran baik Kantor Wilayah Jawa Tengah maupun seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah dalam menyelenggarakan Indeks

kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang terbatas Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

g. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Kegiatan penunjang keberhasilan Kantor Wilayah yaitu adanya kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi Kantor Wilayah Jawa Tengah dengan Unit Pelaksana Teknis dalam pelaksanaan Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen.

h. Manajemen Risiko

Potensi penyebab risiko yaitu Integritas Yang Belum Terbangun Dengan Baik dengan Indikator Risiko Pola Pikir dan Budaya Kerja. Pengendalian risiko yang dilaksanakan berupa Internalisasi serta penanaman pola pikir dan budaya kerja yang berintegritas

SASARAN KEGIATAN 3

Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,22 Indeks	3,45 Indeks	107%

Sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap pelayanan AHU di Wilayah mempunyai 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

1. Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator ini mengukur Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah tahun 2025. Layanan Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah Jawa Tengah meliputi:

- 1) Layanan Administrasi Jaminan Fidusia;
- 2) Layanan Administrasi Badan Hukum dan Badan Usaha;
- 3) Layanan Wasiat;
- 4) Layanan Apostille;
- 5) Layanan Administrasi Partai Politik; dan
- 6) Layanan Status Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan.

Indikator kinerja pada sasaran kegiatan ini adalah Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah dengan target tahun 2025 sebesar 3,22 Indeks, dengan penilaian sebagai berikut

$$= \frac{\sum \text{Nilai Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU}}{\text{Jumlah responden yang memilih}}$$

$$= \frac{465}{135} = 3.45$$

Dari perhitungan Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap pelayanan AHU di Wilayah diatas, maka perhitungan capaian realisasi indikator tersebut dapat dihitung menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{3,45}{3,22} \times 100\% = 107\%
 \end{aligned}$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,22 Indeks	3,45 Indeks	107%

Indikator kinerja pada sasaran kegiatan ini adalah Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah dengan target tahun 2025 sebesar 3,22 Indeks dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Kemenkum Tahun 2025-2029 sesuai PerMenkumham No.42 Tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun-tahun sebelumnya.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan capaian kinerja pada tahun 2024 dan tahun 2023:

INDIKATOR KINERJA	2023		2024		2025	
	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN
Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	-	-	-	-	3,45 Indeks	107%

Indikator kinerja pada sasaran kegiatan ini adalah Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah dengan target tahun 2025 sebesar 3,22 Indeks dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Kemenkum Tahun 2025-2029 sesuai PerMenkumham No.42 Tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun-tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Indikator Kinerja Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025
Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	-	-	-	-	3,22 Indeks

Indikator kinerja pada sasaran kegiatan ini adalah Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah dengan target tahun 2025 sebesar 3,22 Indeks dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Kemenkum Tahun 2025-2029 sesuai PerMenkumham No.42 Tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun-tahun sebelumnya.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Tingkat pemahaman Masyarakat terhadap layanan AHU di Wilayah pada tahun 2025 sebesar 3,45 Indeks atau sebesar 107%, dengan target 3,22 Indeks.

Penyebab tercapainya realisasi sesuai dengan target karena terdapat sosialisasi kepada penggunaan layanan AHU pada tahun 2025 sebagaimana diketahui melalui laman kanwil.ahu.go.id. Jumlah volume layanan tahun 2025 sebesar 571.236-.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang terbatas, Kantor Wilayah belum mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

g. Analisis Kegiatan penunjang ketidakberhasilan

Perolehan PNBP sampai dengan akhir tahun 2025 senilai Rp. 45.068.900.000. Untuk mencapai target kenaikan perolehan PNBP tahun 2025 sebesar 6% (enam persen) sama dengan PNBP tahun 2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah perlu memulai penyelenggaraan pelayanan administrasi hukum umum secara langsung di loket pelayanan Kantor Wilayah maupun loket pelayanan pada Mall Pelayanan Publik yang tersebar pada beberapa wilayah di Jawa Tengah. Pelayanan administrasi hukum umum yang tersedia pada loket pelayanan meliputi yaitu: pencetakan dan pelekatan sertifikat apostille pada dokumen publik yang telah diverifikasi, pelekatan sticker pada dokumen yang dilegalisasi, dan permohonan pelantikan notaris. Sehingga, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi hukum umum mengalami peningkatan

h. Manajemen Risiko

Potensi penyebab risiko yaitu Terdapat celah dalam pelayanan untuk melakukan pungutan liar maupun pemberian gratifikasi. Pengendalian risiko yang dilaksanakan yaitu penerapan sistem pelayanan yang mencegah terjadinya KKN dan pemasangan cctv pada ruang layanan.

SASARAN KEGIATAN 4

Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	Percentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	98,2%	100%	101%

Sasaran kegiatan Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah mempunyai 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan

Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah terhadap seluruh laporan pengaduan yang masuk, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Layanan dianggap selesai apabila pengaduan masyarakat yang diterima telah diselesaikan oleh Kantor Wilayah atau telah ditindaklanjuti ke tingkat Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan/atau Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah selaku Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Tengah telah menerima laporan hasil pemeriksaan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan/atau perilaku yang dilakukan oleh para Notaris terlapor, yaitu:

No	Notaris	Jenis Pelanggaran	Status pengaduan (selesai/belum)
1.	Notaris W A H C, S.H.	Dugaan pelanggaran terhadap kewajiban untuk bertindak Amanah, jujur, saksama, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait terhadap perbuatan hukum	Selesai

2.	Notaris P R, S.H., M.Kn.	Dugaan pelanggaran terhadap kewajiban untuk bertindak Amanah, jujur, saksama, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait terhadap perbuatan hukum	Selesai
3.	Notaris A W Y.S.H., M.Kn.	Dugaan pelanggaran terhadap kewajiban untuk bertindak Amanah, jujur, saksama, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait terhadap perbuatan hukum	Selesai
4.	Notaris R F D, S.H., M.Kn.	Dugaan pembuatan Akta Surat Kuasa Menjual tanpa sepenuhnya Ahli Waris	Selesai
5.	Notaris N., S.H., M.Kn.	Dugaan pembuatan Akta Pelepasan Hak dan Akta Pengikatan Jual Beli tanpa persetujuan pihak yang berkepentingan	Selesai
6.	Notaris F A., S.H., M.Kn.	Dugaan pengabaian hak Pelapor untuk memperoleh salinan akta	Selesai

Laporan hasil pemeriksaan dari MPD Kabupaten Banyumas, Purbalingga, putusan MPW menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama terhadap Notaris WAHC. Putusan MPW terhadap notaris Kota Surakarta RFD menyatakan bahwa Notaris terbukti melakukan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan/atau perilaku Notaris. Dengan demikian, tingkat penyelesaian penyelesaian pengaduan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan/atau perilaku Notaris selama semester pertama adalah 100% (seratus persen).

Pada indikator persentase penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah dengan target sebesar 90% terealisasi sebesar 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa Kantor Wilayah telah berhasil mencapai target kinerjanya dengan menyelesaikan jumlah pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris yang masuk ke Kantor Wilayah.

Perhitungan persentase realisasi capaian indikator kegiatan ini dapat dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yg diselesaikan}}{\text{jumlah seluruh pengaduan masyarakat yg diterima}} \times 100\% \\
 &= \frac{6}{6} \times 100\% = 100\%
 \end{aligned}$$

Sedangkan formulasi persentase perhitungan capaian realisasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{100}{90} \times 100\% = 111,11\%
 \end{aligned}$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Percentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	98,2%	100%	101%

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan capaian kinerja pada tahun 2024, 2023 dan tahun 2022:

INDIKATOR KINERJA	2022		2023		2024		2025	
	TARGET	REALI SASI						
Percentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	84%	100%	86%	88,88	90%	100%	98,2%	100%

Percentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan tahun 2022 dengan target sebesar 84%, terealisasi sebesar 100%, tahun 2023 dengan target sebesar 86% terealisasi sebesar 88.88%, Tahun 2024 dengan target sebesar 90% terealisasi 100%, dan tahun 2025 dengan target sebesar 98,2% terealisasi sebesar 100%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Indikator Kinerja Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025
Percentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	82%	84%	86%	90%	98,2%

Percentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan pada

tahun 2025 sebesar 98,2% mengalami kenaikan target dibandingkan target tahun 2024. Target sebesar 98,2% di tahun 2025 tersebut jika dibandingkan dengan target yang tertuang dalam Renstra Kemenkumham 2020-2024 mengalami kenaikan sebesar 8,2% sebagaimana tertuang dalam Renstra Perubahan Kemenkumham Tahun 2024 sesuai PerMenkumham No.7 Tahun 2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah dalam merealisasikan target kinerja pada tahun 2025 dikarenakan koordinasi aktif antara Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Pengawas Daerah Notaris sehingga pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di wilayah Jawa Tengah dapat terselesaikan dengan baik.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang terbatas Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

g. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Adanya Sekretariat Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Jawa Tengah. Dibentuknya kantor Sekretariat Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris secara permanen tersebut sebagai perwujudan penanganan pengaduan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan/atau perilaku Notaris secara optimal, profesional, dan akuntabel sehingga setiap warga masyarakat pengguna jasa Notaris memperoleh kepastian hukum

h. Manajemen Risiko

Potensi penyebab risiko yaitu Kurangnya kualitas dan integritas notaris dalam menjalankan jabatan / profesi. Pengendalian risiko yang dilaksanakan yaitu Monitoring dan evaluasi kinerja Majelis Pengawas Daerah Notaris dan Memberikan teguran kepada notaris yang tidak menjalankan tugasnya dengan maksimal.

SASARAN KEGIATAN 5

Meningkatnya Layanan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah

Sasaran kegiatan Meningkatnya Layanan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah dengan indikator kinerja:

Tingkat Kepatuhan Layanan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah terhadap Standar Pelayanan.

Indikator Tingkat Kepatuhan Layanan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah terhadap Standar Pelayanan adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum kekayaan intelektual sesuai tugas dan kewenangan Kantor Wilayah. Persentase penyelesaian aduan pelanggaran KI di wilayah diukur berdasarkan jumlah pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual yang ditangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

$$y = \frac{\text{Layanan perlindungan dan pemanfaatan KI yang patuh terhadap standar pelayanan}}{\text{total layanan perlindungan dan pemanfaatan KI yang diberikan}} \times 100\%,$$
$$= \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	100%	117%

Terdapat 4 (empat) pengaduan pelanggaran Kekayaan Intelektual di tahun 2025 sebagai berikut:

1. Kasus pelanggaran Hak Cipta lagu Pelapor pencipta lagu Semarang Hebat dengan Nomor Laporan Pengaduan W.13.KI.08.01-07 tanggal 30 Januari 2025 dengan tahapan selesai;
2. Kasus Pelanggaran Hak Cipta Karaoke Pelapor WAMI dengan Nomor Laporan Pengaduan W.13.KI.08.01-12 tanggal 10 Februari 2025 dengan tahapan Mediasi;
3. Kasus Pelanggaran Hak Cipta Batik LP Ma'arif dengan Nomor Laporan Pengaduan W.13.KI.08.01-32 tanggal 05 Mei 2025 dengan tahapan penyelidikan;
4. Kasus Pelanggaran Hak Cipta Motif Batik Asem Tugu dengan Nomor Laporan Pengaduan W.13.KI.08.01-38 tanggal 10 Juni 2025 dengan tahapan penyelidikan.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan capaian kinerja pada tahun 2024 dan tahun 2023:

INDIKATOR KINERJA	2023		2024		2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	-	-	-	-	85%	100%

Tingkat Kepatuhan Layanan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah terhadap Standar Pelayanan tahun 2025 dengan target 85% terealisasi 100%, dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Kemenkum Tahun 2025 sesuai PerMenkumham No.42 Tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun-tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Indikator Kinerja Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025
Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	-	-	-	-	85%

Tingkat Kepatuhan Layanan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah terhadap Standar Pelayanan pada tahun 2025 sebesar 85%, dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Kemenkum Tahun 2025 sesuai PerMenkumham No.42 Tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun-tahun sebelumnya.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian perkara aduan pelanggaran KI dapat dihadapi dengan komunikasi dan koordinasi yang baik antara jajaran pimpinan, PPNS, terlapor dan pelapor, serta jajaran aparat penegak hukum lainnya dan DJKI sehingga penyelesaian perkara dapat tercapai meskipun dengan berbagai kendala yang ada. Kemampuan untuk berkomunikasi serta penyelesaian sengketa alternatif melalui mediasi dapat memperkuat kepercayaan masyarakat serta menjaga keberlanjutan perlindungan Kekayaan Intelektual.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang terbatas Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

g. Analisis Kegiatan Penunjang Tercapainya Target

Keberhasilan tersebut karena adanya kegiatan diseminasi dan sosialisasi.

h. Manajemen Risiko

Potensi penyebab risiko yaitu PPNS tidak hanya berfokus melakukan proses penyelesaian aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual, akan tetapi turut ikut serta dalam kegiatan non penyidikan. Pengendalian risiko yang dilaksanakan yaitu Memberikan arahan terkait tugas PPNS sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan melakukan evaluasi terhadap kinerja PPNS secara berkala.

SASARAN KEGIATAN 6

Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah

Sasaran kegiatan Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah dengan indikator kinerja:

Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah yang selesai ditangani.

Indikator Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di wilayah adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum kekayaan intelektual sesuai tugas dan kewenangan Kantor Wilayah. Persentase penyelesaian aduan pelanggaran KI di wilayah diukur berdasarkan jumlah pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual yang ditangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

$$\begin{aligned} y1 &= \frac{x1}{z1} \times 100\% \\ &= \frac{\sum \text{Jumlah pelanggaran kekayaan intelektual yang selesai}}{\sum \text{pelanggaran KI di wilayah}} \times 100\% \\ &= \frac{2}{4} \times 100\% = 50\% \end{aligned}$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	31%	50%	161%

Terdapat 4 (empat) pengaduan pelanggaran Kekayaan Intelektual di tahun 2025 sebagai berikut:

1. Kasus pelanggaran Hak Cipta lagu Pelapor pencipta lagu Semarang Hebat dengan Nomor Laporan Pengaduan W.13.KI.08.01-07 tanggal 30 Januari 2025 dengan tahapan selesai;
2. Kasus Pelanggaran Hak Cipta Karaoke Pelapor WAMI dengan Nomor Laporan Pengaduan W.13.KI.08.01-12 tanggal 10 Februari 2025 dengan tahapan Mediasi;
3. Kasus Pelanggaran Hak Cipta Batik LP Ma'arif dengan Nomor Laporan Pengaduan W.13.KI.08.01-32 tanggal 05 Mei 2025 dengan tahapan penyelidikan;
4. Kasus Pelanggaran Hak Cipta Motif Batik Asem Tugu dengan Nomor Laporan Pengaduan W.13.KI.08.01-38 tanggal 10 Juni 2025 dengan tahapan penyelidikan.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan capaian kinerja pada tahun 2024 dan tahun 2023:

INDIKATOR KINERJA	2023		2024		2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	100%	100%	30%	100%	31%	100%

Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah tahun 2023 dengan target 100% terealisasi 100%, tahun 2024 mengalami perubahan target dengan target menjadi 30% terealisasi 100%, sedangkan pada Tahun 2025 target 31% dengan realisasi 100%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Indikator Kinerja Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	100%	100%	100%	30%	31%

Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah pada tahun 2024 sebesar 30% yang mengalami penurunan target sebesar 70% dibandingkan target tahun 2023. Target sebesar 31% di tahun 2025 tersebut jika dibandingkan dengan target yang tertuang dalam Renstra Kemenkum 2025-2029 mengalami penurunan sebesar 70% sebagaimana tertuang dalam Renstra Kemenkum Tahun 2025 sesuai PerMenkumham No.42 Tahun 2025.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian perkara aduan pelanggaran KI dapat dihadapi dengan komunikasi dan koordinasi yang baik antara jajaran pimpinan, PPNS, terlapor dan pelapor, serta jajaran aparat penegak hukum lainnya dan DJKI sehingga penyelesaian perkara dapat tercapai meskipun dengan berbagai kendala yang ada. Kemampuan untuk berkomunikasi serta penyelesaian sengketa alternatif melalui mediasi dapat memperkuat kepercayaan masyarakat serta menjaga keberlanjutan perlindungan Kekayaan Intelektual.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang terbatas Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

g. Analisis Kegiatan Penunjang Tercapainya Target

Keberhasilan tersebut karena adanya kegiatan diseminasi dan sosialisasi.

h. Manajemen Risiko

Potensi penyebab risiko yaitu PPNS tidak hanya berfokus melakukan proses penyelesaian aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual, akan tetapi turut ikut serta dalam kegiatan non penyidikan. Pengendalian risiko yang dilaksanakan yaitu Memberikan arahan terkait tugas PPNS sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan melakukan evaluasi terhadap kinerja PPNS secara berkala.

SASARAN KEGIATAN 7

Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah

Sasaran kegiatan Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah dengan indikator kinerja:

Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah

Indikator ini mengukur tingkat maturitas pengelolaan dan pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah berdasarkan masyarakat yang mendapatkan desiminasi atau edukasi tentang KI di wilayah. Tingkat pemahaman masyarakat diukur berdasarkan *pre* dan *post assessment* saat diseminasi atau edukasi tentang KI dilakukan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

$$\begin{aligned} \text{Skor baru} &= \frac{\text{Skor saat ini} - \text{Skor saat ini min}}{\text{Skor saat ini max} - \text{Skor saat ini min}} \\ &= \frac{12}{5} = 2,35 \end{aligned}$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,5 Level	2,35 Level	94%

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan capaian kinerja pada tahun 2024 dan tahun 2023:

INDIKATOR KINERJA	2023		2024		2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	-	-	-	-	2,5 Level	2,35 Level

Kegiatan yang terlaksana adalah sebagai berikut:

- 1) Diseminasi Kekayaan Intelektual dan penguatan teknis operator Kekayaan Intelektual dilaksanakan sejumlah 16 (enam belas) kali kegiatan bertempat di Kabupaten Jepara, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Semarang, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten

Grobogan, Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kota Tegal, Purwokerto, Kabupaten Brebes, Kabupaten Wonosobo dan Kota Salatiga.

- 2) Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal, terlaksana sejumlah 14 (empat belas) kali kegiatan diseminasi di Purwokerto, Kota Tegal, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Magelang, Kota Semarang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Purworejo.
- 3) Edukasi Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual, terlaksana sejumlah 4 (empat) kali kegiatan edukasi, bertempat di Kota Pekalongan, Kabupaten Brebes, Kabupaten Rembang dan Kabupaten Semarang.

Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah pada tahun 2025 memiliki target sebesar 2,50 Level, dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Kemenkum Tahun 2025 sesuai PerMenkumham No.42 Tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun-tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Indikator Kinerja Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025
Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	-	-	-	-	2,50 Level

Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah pada tahun 2025 memiliki target sebesar 2,50 Level, dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Kemenkum Tahun 2025 sesuai PerMenkumham No.42 Tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun-tahun sebelumnya.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan Tercapainya Target

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2025 karena adanya dukungan anggaran, koordinasi yang berjalan baik dengan pihak-pihak terkait lainnya, serta pelaksanaan yang sejalan dengan perencanaan kinerja.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang terbatas Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

g. Analisis Kegiatan Penunjang Tercapainya Target

Keberhasilan tersebut karena adanya kegiatan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual yang dilakukan kantor wilayah di berbagai daerah selama Tahun 2025

h. Manajemen Risiko

Potensi penyebab risiko yaitu Kurangnya kemampuan SDM masyarakat di wilayah Jawa Tengah terkait dengan DTLST (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu). Pengendalian risiko yang dilaksanakan yaitu Menyelenggarakan sosialisasi atau diseminasi terkait DTLST dan inventarisasi data potensi DTLST.

SASARAN KEGIATAN 8

Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di Wilayah

1. Persentase Perencanaan Peraturan Perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukm

Indikator ini menggambarkan Indikator Kinerja Kepala Kantor Wilayah terkait peran pada Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum, khususnya pada kegiatan pengharmonisasian Raperda berdasarkan amanat Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diatur bahwa "Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.". Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi adalah proses penyelarasan substansi RPUU dan teknik penyusunan PUU sehingga menjadi PUU yang merupakan satu kesatuan utuh dalam kerangka sistem hukum nasional, sehingga diharapkan melalui kegiatan harmonisasi ini, dapat terbentuk Raperda yang responsif, aplikatif dan solutif. Kegiatan harmonisasi yang dimaksud dilaksanakan bagi produk hukum daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

$$W_{FRen} = \left(\frac{W_{F_{PV}} + W_{F_{KK}}}{\sum_{F_{PV}} + \sum_{F_{KK}}} \right) \times 100\%$$

$$= \frac{\sum \text{Regiatan fasilitasi}}{\sum \text{Keterlibatan perencanaan}} \times 100\%$$

$$= \frac{1301}{1301} \times 100\% = 100\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%

Dengan realisasi sebesar 100% pada Tahun 2025, target 100% persentase perencanaan peraturan perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum. Berdasarkan data dari <https://linktr.ee/fpphdjateng> dan <https://e-harmonisasi.peraturan.go.id>, jumlah permohonan yang masuk sampai dengan kurun waktu 1 tahun (Januari-Desember) sebanyak 1301 permohonan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.301 permohonan telah dilibatkan dalam perencanaan. Permohonan fasilitasi pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi tersebut terdiri atas 522 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan 779 Rancangan Peraturan Kepala Daerah.



b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan capaian kinerja pada tahun 2024 dan tahun 2023:

INDIKATOR KINERJA	2023		2024		Semester I 2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	-	-	-	-	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, dengan capaian sebesar 100%, target 100% permohonan terfasilitasi sampai dengan selesai oleh Kantor Wilayah sebanyak 1.301 permohonan yang

seluruhnya telah dilakukan pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Indikator Kinerja Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	-	-	-	-	100%

Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah pada Tahun 2025 dengan target 100% terealisasi 100%, dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Kemenkum Tahun 2025-2029 sesuai PerMenkumham No.42 Tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Adanya sinergitas dalam pelaksanaan fasilitasi pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Sinergitas tersebut diwujudkan dengan adanya komitmen bersama dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam hal pelaksanaan harmonisasi dan fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah secara simultan dan melalui koordinasi dengan stakeholder terkait di daerah pada bulan Februari-Maret 2025. Melalui upaya tersebut, Kantor Wilayah hadir dalam melakukan pendampingan fasilitasi pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, yang bertujuan meningkatkan kualitas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang terbatas Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

g. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Adanya sinergitas dalam pelaksanaan fasilitasi pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Sinergitas tersebut diwujudkan dengan adanya komitmen bersama dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam hal pelaksanaan harmonisasi dan fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah secara simultan dan melalui koordinasi dengan stakeholder terkait di daerah pada bulan Februari-Maret 2025. Melalui upaya tersebut, Kantor Wilayah hadir dalam melakukan pendampingan fasilitasi pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, yang bertujuan meningkatkan kualitas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

h. Manajemen Risiko

Potensi penyebab risiko yaitu Produk hukum daerah cenderung mengikuti perkembangan peraturan di tingkat pusat daripada kebutuhan hukum masyarakat di daerah. Pengendalian risiko yang dilaksanakan yaitu Penyampaian informasi pentingnya fasilitasi harmonisasi sejak tahap perencanaan pembentukan produk hukum daerah dan melakukan evaluasi terkait pelaksanaan koordinasi dalam proses pembentukannya.

2. Persentase Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum

Indikator ini menggambarkan Indikator Kinerja Kepala Kantor Wilayah terkait peran pada Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum, khususnya pada kegiatan pengharmonisasi Raperda berdasarkan amanat Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diatur bahwa "Pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.". Pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi adalah proses penyelarasan substansi RPUU dan teknik penyusunan PUU sehingga menjadi PUU yang merupakan satu kesatuan utuh dalam kerangka sistem hukum nasional, sehingga diharapkan melalui kegiatan harmonisasi ini, dapat terbentuk Raperda yang responsif, aplikatif dan solutif. Kegiatan harmonisasi yang dimaksud dilaksanakan bagi produk hukum daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

$$\begin{aligned}
 W_{FRan} &= \left(\frac{W_{F_{Per}} + W_{F_{Ran}} + W_{F_{Kp}} + W_{F_{KL}}}{\sum_{F_{Per}} + \sum_{F_{Ran}} + \sum_{F_{Kp}} + \sum_{F_{KL}}} \right) \times 100\% \\
 &= \frac{\sum \text{Fasilitasi Perancangan Perda}}{\sum \text{Permohonan Fasilitasi Perancangan Perda}} \times 100\% \\
 &= \frac{1301}{1301} \times 100\% = 100\%
 \end{aligned}$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%

Selanjutnya untuk persentase perancangan peraturan perundang-undangan di Daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum telah memenuhi target 100%.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan capaian kinerja pada tahun 2023 dan tahun 2024:

INDIKATOR KINERJA	2023		2024		2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	-	-	-	-	100%	100%

Persentase perancangan peraturan perundang-undangan di Daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum telah memenuhi target 100, dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Kemenkum Tahun 2025-

2029 sesuai PerMenkumham No.42 Tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Indikator Kinerja Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025
Percentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	-	-	-	-	100%

Percentase perancangan peraturan perundang-undangan di Daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum dengan target 100% terealisasi 100%, dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Kemenkum Tahun 2025-2029 sesuai PerMenkumham No.42 Tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Target kinerja telah terpenuhi sehingga tidak ada permasalahan yang menyebabkan ketidakberhasilan pemenuhan kinerja.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang terbatas Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

g. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Koordinasi yang telah berjalan baik dengan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kapasitas tenaga perancang peraturan perundang-undangan menjadi penunjang keberhasilan. Upaya yang akan dilakukan dalam mencapai target kinerja kedepannya secara umum antara lain dengan menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah (kabupaten/kota) untuk memberikan layanan fasilitasi penyusunan Raperda di wilayah jawa tengah, meningkatkan efektivitas dan efisiensi fasilitasi rancangan produk hukum di daerah melalui peningkatan kualitas SDM, kemudahan dalam mengakses layanan, serta meningkatkan kuantitas dan kualitas serta peran pembinaan perancang peraturan perundang-undangan melalui pelatihan dan pendidikan

h. Manajemen Risiko

Potensi penyebab risiko yaitu Sebagian besar perancang yang berkedudukan di Pemerintah Daerah belum menjalani diklat perancang. Pengendalian risiko yang dilaksanakan yaitu Pelaksanaan kegiatan rakor dengan instansi terkait agar terwujud sinergitas yang kolaboratif antara Kantor Wilayah dengan Pemerintah Daerah.

SASARAN KEGIATAN 9

Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda

Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil

Dasar Hukum: Pasal 97C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan yang menyatakan bahwa: "Selain jenis dan hierarki Peraturan Perundang undangan yang telah diatur dalam Pasal 46 ayat (21), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (1), Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 58, kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang undangan melakukan analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan".

Analisis dan Evaluasi produk hukum daerah adalah kegiatan untuk menelaah dan menilai materi, proses pembentukan, dan pelaksanaan peraturan daerah yang berlaku sehingga diketahui kedayagunaan, kehasilgunaan, dan ketercapaian tujuan yang hendak dicapai, selanjutnya memberikan Rekomendasi apakah sebuah peraturan daerah dimaksud dicabut, diubah, tetap dan/atau tindakan lain.

Analisis dan evaluasi peraturan daerah dilakukan oleh Kantor Wilayah dengan melibatkan biro hukum/bagian hukum pemerintah daerah serta instansi terkait dan masyarakat. Peraturan daerah yang analisis dan evaluasi sesuai rencana, yaitu jumlah peraturan daerah yang dianalisis tiap tahun sesuai dengan rencana kerja strategis Kantor Wilayah

Fasilitasi perencanaan Perda adalah fasilitasi penyusunan Prolegda/Propemperda dan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik Perda yang diberikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah kepada Pemerintah Prov/Kab/Kota.

Prolegda/Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis

Naskah Akademik Perda adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Berikut merupakan formulasi perhitungan untuk indikator tersebut:

$$x = a + b + c + \dots + n$$

- a: analisis dan evaluasi produk hukum a
- b: analisis dan evaluasi produk hukum b
- c: analisis dan evaluasi produk hukum c
- n: analisis dan evaluasi produk hukum terakhir

$$\begin{aligned} \text{CapaianIKU} &= \frac{\text{JumlahanepelaksanaanPerdayangditindaklanjutiolehPemda}}{\text{TotaljumlahanepelaksanaanPerdayangdisampaikankepadaPemda}} \\ &\quad \times 100\% \\ &= \frac{1}{5} \times 100\% = 20\% \end{aligned}$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	15%	20%	133%

Dengan capaian sebesar 133% dari target sebesar 15% menunjukkan bahwa Kantor Wilayah Jawa Tengah berkinerja optimal dan optimis berhasil mencapai sasaran target kinerjanya di tahun 2025. Kegiatan dimaksud terdiri dari kegiatan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah dan fasilitasi perencanaan penyusunan Program Legislasi Daerah. Kegiatan fasilitasi penyusunan perencanaan legislasi daerah telah selesai dilaksanakan dan saat ini sedang dalam proses penyusunan laporan akhir sedangkan untuk kegiatan analisis dan evaluasi produk hukum daerah saat ini telah selesai melaksanakan kegiatan FGD Analisis dan Evaluasi peraturan perundang-undangan. Dimana untuk kegiatan analisis dan evaluasi hukum telah dilaksanakan dengan kegiatan meliputi persiapan analisis dan evaluasi hukum dan FGD Analisis dan Evaluasi Hukum, sedangkan untuk kegiatan fasilitasi penyusunan perencanaan legislasi daerah sudah dilaksanakan pada Bagian Hukum SETDA Kabupaten Sukoharjo, Bagian Hukum SETDA Kabupaten Wonosobo dan Bagian Hukum SETDA Kabupaten Klaten. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Fasilitasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Nomor: PHN.2-HN.02.02-03 dan kegiatan Analisis dan evaluasi peraturan daerah dilaksanakan sesuai dengan Surat Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.3-HN.01.01-03 tanggal

24 Januari 2024, Perihal Pelaksanaan Kegiatan Analisis dan Evaluasi Perda di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2025. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kantor Wilayah Jawa Tengah telah berkinerja optimal dengan berhasil mencapai sasaran target kinerjanya.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan capaian kinerja pada tahun 2024, 2023 dan tahun 2022:

INDIKATOR KINERJA	2022		2023		2024		2025	
	TAR GET	REALI SASI	TAR GET	REALI SASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	-	-	-	-	-	-	15%	20%

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan capaian kinerja pada tahun 2024 dan tahun 2023:

INDIKATOR KINERJA	2023		2024		2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	-	-	-	-	15%	20%

Berdasarkan tabel diatas, bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah mampu mencapai target. Pada Tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan fasilitasi penyusunan perencanaan legislasi daerah di Bagian Hukum SETDA Kabupaten Tegal, dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Kemenkum Tahun 2025-2029 sesuai PerMenkumham No.42 Tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun 2022, 2023 dan 2024.

Disamping itu terdapat Pemerintah Daerah yang belum melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Dimana dari hasil analisis dan evaluasi hukum didapatkan rekomendasi apakah produk hukum daerah yang dimaksud

diubah, dicabut ataupun tetap. Hasil analisis dan evaluasi hukum ini dapat menjadi bahan dalam penyusunan program legislasi daerah. Sedangkan untuk kegiatan analisis dan evaluasi peraturan daerah telah dilaksanakan dimulai dari tahap perencanaan pada bulan Maret dan akan berakhir dengan penyusunan laporan akhir pada bulan November. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memberi penegasan peran dan kewenangan Kementerian Hukum khususnya Kantor Wilayah dalam melakukan Analisis dan Evaluasi pelaksanaan peraturan daerah baik yang berasal dari Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil pada tahun 2025 memiliki target sebesar 15%, dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Kemenkum Tahun 2025-2029 sesuai PerMenkumham No.42 Tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun 2022, 2023 dan 2024.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Indikator Kinerja Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	-	-	-	-	15%

Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil pada tahun 2025 memiliki target sebanyak 15% telah terealisasi 20%, dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Kemenkum Tahun 2025-2029 sesuai PerMenkumham No.42 Tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun 2022, 2023 dan 2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan capaian kinerja kantor wilayah tersebut tidak terlepas dari peran seluruh jajaran Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum dalam mengoordinasikan dan menyinergikan kegiatan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum

Daerah dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang mempedomani Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-HN.01.03-07 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan, Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-PR.01.03-01 Tahun 2025 mengenai Pedoman Pelaksanaan Program Pembinaan Hukum Di Wilayah serta dukungan anggaran pembentukan regulasi dalam upayanya mewujudkan layanan internal yang optimal di kantor wilayah Tahun 2025.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang terbatas Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

g. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Adanya sinergitas dalam pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Di Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Sinergitas tersebut diwujudkan dengan adanya komitmen bersama dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam hal pelaksanaan analisis dan evaluasi produk hukum daerah. Melalui upaya tersebut, Kantor Wilayah hadir dalam melakukan pendampingan fasilitasi analisis dan evaluasi Hukum Produk Hukum Daerah, yang bertujuan meningkatkan kualitas Produk Hukum Daerah.

h. Manajemen Risiko

Potensi penyebab risiko yaitu Hasil analisis dan evaluasi peraturan daerah tidak ditindaklanjuti karena adanya pendapat yang berbeda dari Pemerintah Daerah terkait rekomendasi yang disampaikan oleh Kantor Wilayah. Pengendalian risiko yang dilaksanakan yaitu Penyebarluasan invormasi pentingnya analisis dan evaluasi perda secara lebih luas, dan Melakukan inventarisasi jumlah hasil analisis analisis dan evaluasi yang tidak ditindaklanjuti serta Melakukan sosialisasi pentingnya tindak lanjut analisis dan evaluasi dengan menggandeng pemerintah daerah.

SASARAN KEGIATAN 10

Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah

1. Persentase Pemberian Bantuan Bantuan Hukum Secara Litigasi dan Non Litigasi

Layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diberikan secara cuma-cuma yang bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum serta akses keadilan kepada masyarakat khususnya orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum. Layanan bantuan hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dalam bentuk pendampingan hukum baik litigasi maupun nonlitigasi.

Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Unit Kerja Kementerian Hukum yang salah satu tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian bantuan hukum.

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pelaksana Bantuan Hukum adalah Advokat, Paralegal, Dosen, dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum yang terdaftar dalam Pemberi Bantuan Hukum.

Bantuan hukum litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaiannya yang diberikan kepada penerima bantuan hukum untuk mengimbangi kewenangan para penegak hukum dan melindungi hak-hak setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum dalam hal:

1. perkara pidana pada tahap penyidikan, dan persidangan;
2. perkara perdata pada tahap gugatan dan persidangan; dan
3. perkara tata usaha negara pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan persidangan.

Pada Tahun 2025 jumlah permohonan bantuan hukum litigasi dan non litigasi di wilayah yaitu sejumlah **1.644 permohonan**, dimana diantaranya **1.569 permohonan** telah dilayani sampai dengan proses pencairan anggaran (95,48%). Persentase permohonan bantuan hukum litigasi dan non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan target sebesar 89% telah tercapai sebesar 95,48% dengan formula sebagai berikut:

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

$$\begin{aligned} &= \frac{\sum \text{layanan bantuan hukum yang diberikan}}{\sum \text{permohonan layanan bantuan hukum yang diminta}} \times 100\% \\ &= \frac{1.569}{1.644} \times 100\% = 95,48\% \end{aligned}$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	89%	95,48%	107%

Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan angka realisasi 95,48% diperoleh dari perbandingan antara jumlah permohonan yang diterima sampai dengan tahap pencairan anggaran (*reimbursement*) sejumlah 1.569 permohonan dengan jumlah permohonan yang masuk sejumlah 1.644 permohonan. Sedangkan capaian 107% diperoleh dengan membandingkan antara realisasi 95,48% dengan target 89%.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan capaian kinerja pada tahun 2023 dan tahun 2024:

INDIKATOR KINERJA	2022		2023		2024		2025	
	TARGET	REALI SASI	TARGET	REALI SASI	TARGET	REALI SASI	TARGET	REALISASI
Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	-	-	-	-	-	-	-	89% 95,48%

Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Kemenkum Tahun 2025-2029 sesuai PerMenkumham No.42 Tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun 2022, 2023 dan 2024.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Indikator Kinerja Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	-	-	-	-	89%

Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada Tahun 2025 dengan target 89% terealisasi 95,48%. dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang

tertuang dalam Renstra Kemenkum Tahun 2025-2029 sesuai PerMenkumham No.42 Tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2025 karena adanya dukungan anggaran, sarana prasarana dan penyelesaian permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani di wilayah yang terselesaikan secara tepat waktu.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang terbatas Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

g. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Kegiatan pengawasan dan pelaksanaan bantuan hukum menjadi penunjang keberhasilan, serta adanya sosialisasi dan pengawasan kepada OBH terakreditasi terkait dengan Standar Layanan Bantuan Hukum.

h. Manajemen Risiko

Potensi penyebab risiko yaitu Admin OBH yang seharusnya hanya melaksanakan tugas untuk mengelola Sidbankum dan berkas permohonan bantuan hukum, masih dibebani tugas lain sehingga kurang fokus. Pengendalian risiko yang dilaksanakan yaitu Pembagian tugas pada verifikator Kanwil sehingga mempercepat proses verifikasi, dan Pembuatan grup khusus admin OBH, serta Mengusulkan penambahan jumlah pegawai atau PPNPN untuk membantu mengelola sidbankum.

SASARAN KEGIATAN 11

Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas

Tingkat Penyelesaian Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional di Wilayah

Anggota JDIHN di wilayah adalah Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagian/bidang yang menangani Dokumen dan Informasi Hukum pada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi. Anggota JDIHN yang dikelola adalah Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagian/bidang yang menangani Dokumen dan Informasi Hukum pada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi yang mendapatkan pembinaan pengelolaan JDIH dari Kantor Wilayah pada tahun berjalan.

Total Anggota JDIHN di wilayah adalah jumlah seluruh Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagian/bidang yang menangani Dokumen dan Informasi Hukum pada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi. Pengelolaan Anggota JDIHN yang dimaksud adalah pembinaan dan pengembangan JDIH di wilayah. Dengan target sebesar 70% telah tercapai sebesar 100%.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

$$\text{Capaian KIN} = \frac{\text{Jumlah layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang diselesaikan}}{\text{Total jumlah permintaan layanan yang diterima}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} &= \frac{76}{76} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	70%	100%	142%

Indikator Kinerja Kegiatan berupa Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah, dengan angka realisasi 100% diperoleh dari jumlah layanan yang diselesaikan dibagi dengan jumlah permintaan layanan. Sampai dengan Tahun 2025, dari 101 anggota JDIHN di Provinsi Jawa Tengah, 36 website JDIH milik Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, 36 website JDIH milik Sekretariat DPRD

Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta 3 website JDIH milik Perguruan Tinggi Negeri/Swasta (Universitas Tidar, Universitas Panca Sakti, dan Universitas Jend Soedirman) dinyatakan aktif dan terintegrasi dengan website JDIHN. Sedangkan capaian 142% diperoleh dengan membandingkan antara realisasi 100% dengan target 70%.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan capaian kinerja pada tahun 2023, 2022 dan tahun 2024:

KINERJA	2022		2023		2024		2025	
	TARGET	REALI SASI						
Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	-	-	-	-	-	-	70%	100%

Indikator Kinerja Kegiatan berupa Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah, dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Kemenkum Tahun 2025-2029 sesuai PerMenkumham No.42 Tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun 2022, 2023 dan 2024.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Indikator Kinerja Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025
Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	-	-	-	-	70%

Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah pada tahun 2025 sebesar 100%, dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Kemenkum Tahun 2025-2029 sesuai PerMenkumham No.42 Tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun 2022, 2023 dan 2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2025 karena adanya koordinasi dan pembinaan kepada anggota JDIHN di wilayah yang dilaksanakan secara berkala melalui kegiatan Rapat Koordinasi serta Pembinaan dan Pengembangan JDIH di wilayah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah bekerja sama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang terbatas Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

g. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Adanya komunikasi dan koordinasi yang terjalin dengan baik dengan BPHN selaku Pembina JDIH maupun Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah selaku Pembina JDIH di wilayah.

h. Manajemen Risiko

Potensi penyebab risiko yaitu Tidak semua Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Tengah memiliki Perpustakaan Hukum. Pengendalian risiko yang dilaksanakan yaitu Meningkatkan koordinasi dengan beberapa perguruan tinggi yang sekiranya bisa didorong untuk pembuatan dan pengintegrasian web JDIH, dan Melakukan inventarisir data PTN/PTS yang belum memiliki JDIH, serta Membuat MOU dengan PTN/PTS dalam pembentukan JDIH.

SASARAN KEGIATAN 12

Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah

Persentase Pos Bantuan Hukum di Wilayah yang terbentuk terhadap total desa / kelurahan

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat dilakukan dengan dibentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum sesuai peraturan yang berlaku. Proses pembentukan desa/kelurahan sadar hukum diawali dengan pembentukan Kelompok KADARKUM yang selanjutnya dilakukan pembinaan dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung sehingga terwujudlah desa/kelurahan binaan yang memenuhi syarat sebagai desa/kelurahan binaan berdasarkan atas usulan dari masingmasing Kantor Wilayah.

Desa/Kelurahan Binaan adalah desa/kelurahan atau wilayah administratif setingkat yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan binaan. Kriteria Desa/Kelurahan Binaan:

- a. SK Pembentukan Kelompok KADARKUM;
- b. Laporan kegiatan Pembinaan Kelompok KADARKUM;
- c. SK Pembentukan Desa/Kelurahan Binaan;
- d. Laporan kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan.

Pengukuhan adalah pengakuan suatu desa/kelurahan dengan predikat sebagai desa/kelurahan binaan menuju desa/kelurahan sadar hukum melalui surat keputusan Kepala Kantor Wilayah.

Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah desa/kelurahan/wilayah administratif setingkat yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan sadar hukum. Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum:

- e. Memenuhi Kriteria Desa/Kelurahan Binaan;
- f. Mengisi Kuesioner Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- g. SK Gubernur tentang Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- h. Melampirkan Surat Pernyataan calon penerima penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan.

Pada Triwulan I Tahun 2024 yaitu sebanyak 32 Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah dengan target sebesar 70% telah tercapai sebesar 100%.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

$$= \frac{\text{Jumlah desa kelurahan Posbankum yang dibina}}{\sum \text{desa kelurahan yang memiliki Posbankum}} \times 100\%$$

$$= \frac{8.563}{8.563} \times 100\% = 100\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	11%	100%	909%

Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase Pos Bantuan Hukum di Wilayah yang terbentuk terhadap total Desa/Kelurahan, dengan angka realisasi 100% diperoleh dari perbandingan antara jumlah 8.563 Posbankum yang dibina sebagai Kelurahan Binaan Sadar Hukum dari Kantor Wilayah. Sedangkan capaian 909% diperoleh dengan membandingkan antara realisasi 100% dengan target 11%.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan capaian kinerja pada tahun 2023, 2022 dan tahun 2024:

INDIKATOR KINERJA	2022		2023		2024		2025	
	TARGET	REALI SASI	TARGET	REALI SASI	TARGET	REALI SASI	TARGET	REALISASI
Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	11% 100%

Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase Pos Bantuan Hukum di Wilayah yang terbentuk terhadap total Desa/Kelurahan, dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Kemenkum Tahun 2025-2029 sesuai PerMenkumham No.42 Tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun 2022, 2023 dan 2024.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Indikator Kinerja Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	-	-	-	-	11%

Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase Pos Bantuan Hukum di Wilayah yang terbentuk terhadap total Desa/Kelurahan, dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Kemenkum Tahun 2025-2029 sesuai PerMenkumham No.42 Tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun 2022, 2023 dan 2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan capaian kinerja Kantor Wilayah tidak terlepas dari peran seluruh jajaran Kantor Wilayah, anggaran yang tersedia, sarana prasarana serta dukungan dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung dan mewujudkan sasaran meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah pada Tahun 2025.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang terbatas Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

g. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Daerah. Adanya kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung, koordinasi dan komunikasi dengan BPHN selaku pembina kegiatan di wilayah.

h. Manajemen Risiko

Potensi penyebab risiko yaitu Penyelenggaraan Desa / Kelurahan Sadar Hukum hanya bergantung pada political will dari Pemerintah Daerah setempat dan acapkali Pemerintah Daerah menganggap program peningkatan kesadaran hukum tersebut hanya sebagai bentuk tugas tambahan yang membebankan pihak terkait. Pengedalian risiko yang dilaksanakan yaitu Berkoordinasi dan bekerja sama dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pembentukan desa sadar hukum, dan Melakukan inventarisir Desa Sadar Hukum, serta Menyusun SK Gubernur Jawa Tengah tentang Tim Peningkatan Kesadaran Hukum di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan melibatkan instansi terkait dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota.

SASARAN KEGIATAN 13

Ditindaklanjutnya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah

Persentase tindak lanjut rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah adalah dilakukannya upaya untuk meningkatkan kualitas kebijakan hukum dan pelayanan publik di wilayah, khususnya meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum pada Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, serta Divisi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum.

Terdapat 5 (lima) kegiatan Pendampingan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum di Wilayah dan 1 (satu) Evaluasi Pelaksanaan SPAK-SPKP di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah sebagai berikut:

6. Kegiatan Pendampingan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum di Wilayah Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara tertanggal 19-20 Mei 2025;
7. Kegiatan Pendampingan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum di Wilayah Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal tertanggal 19-20 Mei 2025;
8. Kegiatan Pendampingan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum di Wilayah Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri tertanggal 4-5 Juni 2025;
9. Kegiatan Pendampingan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum di Wilayah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Brebes tertanggal 11-12 Juni 2025;
10. Kegiatan Pendampingan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum di Wilayah Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar tertanggal 17-18 Juni 2025.

Evaluasi Pelaksanaan SPAK-SPKP di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah dilakukan terhadap layanan publik di bidang hukum yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Tahun 2025.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

$$= \frac{\sum \text{Rekomendasi strategi kebijakan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Rekomendasi strategi kebijakan yang diberikan}} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95,5%	100%	104%

Kegiatan Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum di Wilayah pada Tahun 2025 menghasilkan capaian SK Tim Analisa Kebijakan, Profil Analisa Kebijakan Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Proposal Analisa Kebijakan dan Instrumen Penggalian Data Analisa Kebijakan di Wilayah. Terkait pengumpulan data di lapangan serta penyusunan bagian pembahasan Analisa Kebijakan, penyusunan simpulan dan rekomendasi kebijakan akan dilaksanakan pada bulan Juli ini terfokus pada Unit Pelaksanaan Teknis yang ada.

Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum Wilayah Jawa Tengah, yang dalam hal ini mengambil tema Penilaian Indeks Reformasi Hukum.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan capaian kinerja pada tahun 2024 dan tahun 2023:

INDIKATOR KINERJA	2023		2024		2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	-	-	80%	80%	95,5%	100%

Persentase tindaklanjut rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang pada Tahun 2025 dengan target 95,5% dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Kemenkum Tahun 2025 sesuai PerMenkumham No.42 Tahun 2025, lebih tinggi dibanding target Tahun 2024.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Indikator Kinerja Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	-	-	-	80%	95,5%

Persentase tindaklanjut rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah pada Tahun 2025 dengan target 95,5% dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Kemenkum Tahun 2025 sesuai PerMenkumham No.42 Tahun

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Tercapainya realisasi sesuai dengan target capaian kinerja di tahun 2025 yaitu dengan target 95,5% realisasi 100% maka dari itu capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 104%.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang terbatas Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

g. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Kegiatan Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah menjadi pernunjang keberhasilan.

h. Manajemen Risiko

Potensi penyebab risiko yaitu Timeline penyusunan Analisa Strategi Kebijakan terlalu berdekatan dengan Tindak Lanjut Rekomendasi. Pengendalian risiko yang dilaksanakan yaitu Penentuan tema disesuaikan dengan program yang sedang dijalankan, dan Melakukan penunjukan TIM Penyusunan Analisa Strategi Kebijakan, serta penentuan tema disesuaikan dengan program yang sedang dijalankan.

B. Realisasi Anggaran

Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum terdiri dari 6 (enam) Petikan DIPA dari masing-masing unit Eselon I. Perbandingan Alokasi dan Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Jawa Tengah
Antara Tahun 2025 dengan Tahun 2024

NO	PROGRAM (ESELON I)	2024				2025			
		PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%	SISA TOTAL (RP)	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%	SISA TOTAL (RP)
1	Program Dukungan Manajemen (Sekretariat Jenderal)	29,919,895,000	29,424,197,999	98.34	495,697,001	19,060,535,000	18,102,407,825	94,97	958,127,175
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum)	4,811,600,000	4,807,053,253	99.91	4,546,747	2,270,828,000	2,270,798,569	100	29,431
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)	2,573,011,000	2,569,520,983	99.86	3,490,017	923,825,000	922,509,110	99.86	1,351,890
3	Program Pembentukan Regulasi (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan)	467,600,000	466,668,251	99.93 %	331,749	196,040,000	193,843,101	98,88	2,196,899
5	Program Pembentukan Regulasi (Badan Pembinaan Hukum Nasional)	5,350,995,000	5,285,938,470	98.78	65,056,530	4,661,178,000	4,589,518,219	98,46	71,659,781
6	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Badan Pembinaan Hukum Nasional)	157,549,999	157,316,673	99.85	232,327	15,000,000	14,999,500	100	500
7	Program Dukungan Manajemen (Badan Strategi Kebijakan Hukum)	354,104,000	353,990,490	99.97	113,510	100,000,000	99,988,496	99,99	11,504
Jumlah		49,048,489,000	48,454,971,063	98.79	593,517,937	27,227,406,000	26,194,064,820	96,20	1,033,341,180

Sumber: Data OM SPAN

Dari perbandingan alokasi anggaran Tahun 2025 dan Tahun 2024 diatas, terdapat beberapa Program yang mengalami kenaikan dan ada pula Program yang mengalami penurunan. Terdapat 4 (empat) alokasi anggaran yang mengalami kenaikan yaitu pada Program (Eselon I): a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual); b. Program Pembentukan Regulasi (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan); c. Program Pembentukan Regulasi (Badan Pembinaan Hukum Nasional); d. Program Dukungan Manajemen (Badan Strategi Kebijakan Hukum)

Alokasi anggaran yang mengalami penurunan yaitu pada Program Dukungan Manajemen (Sekretariat Jenderal) yang merupakan pelaksanaan kebijakan penghematan anggaran.

Sedangkan alokasi anggaran yang tidak mengalami perubahan yaitu pada Program (Eselon I): a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Total realisasi anggaran 6 Petikan DIPA dari Unit Eselon 1 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah yaitu Rp. 26,194,064,820,- atau 96,20% dari total Pagu Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 27,227,406,000,-, dengan total sisa anggaran Rp. 1,033,341,180,-.

C. Capaian Kinerja Anggaran

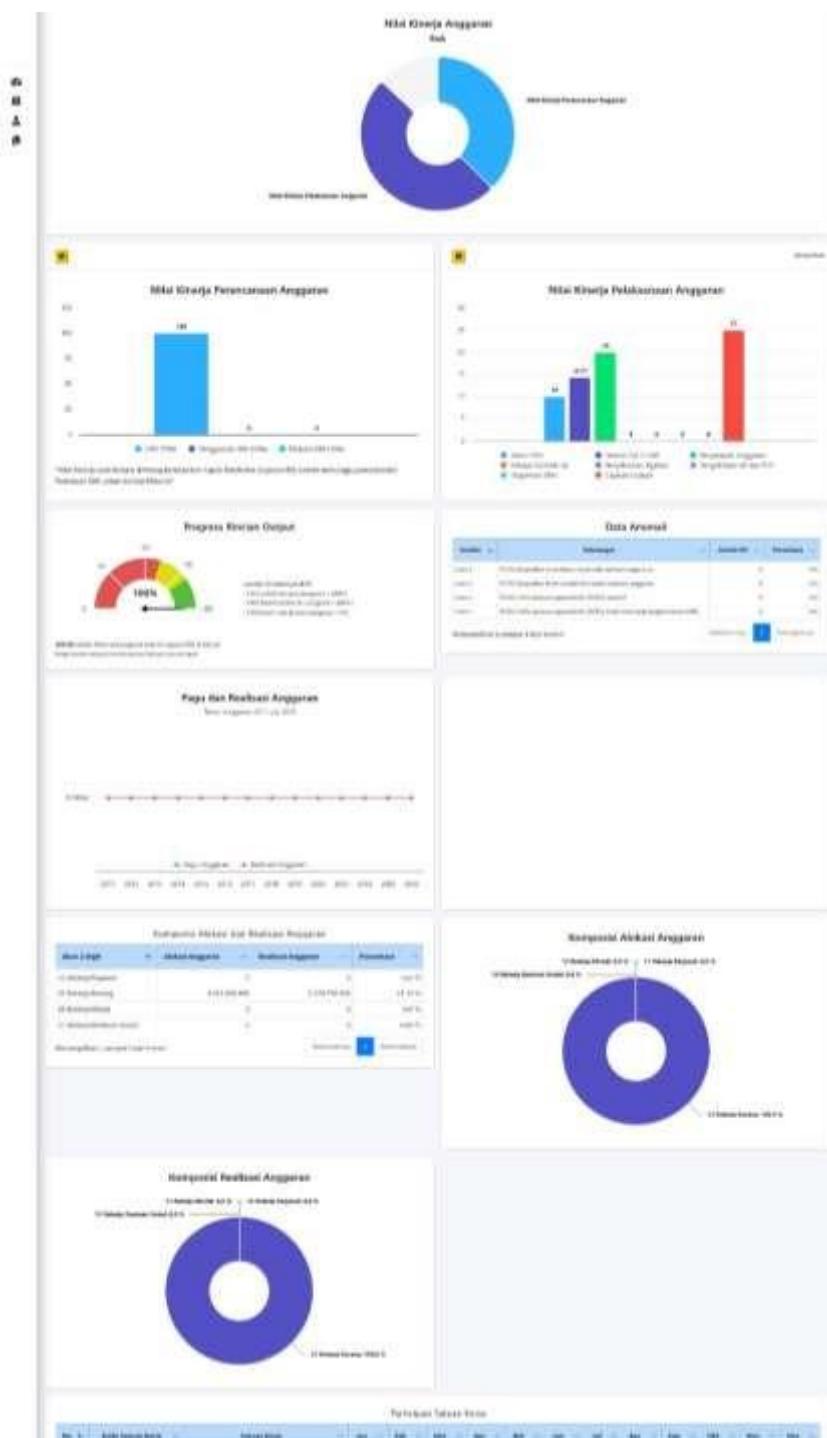
Berikut merupakan Capaian Nilai SMART, dan IKPA Kantor Wilayah Jawa Tengah:

1. Program Dukungan Manajemen (Sekretariat Jenderal)



Sumber: <https://smart.kemenkey.go.id/>

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum)



Sumber: <https://monev.kemenkeu.go.id/>

3. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)



Sumber: <https://monev.kemenkeu.go.id/>

4. Program Pembentukan Regulasi (Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan)



Sumber: <https://smart.kemenkeu.go.id/>

5. Program Pembentukan Regulasi dan, Penegakan dan Pelayanan Hukum (Badan Pembinaan Hukum Nasional)



Sumber: <https://smart.kemenkeu.go.id/>

6. Program Dukungan Manajemen (Badan Strategi Kebijakan)

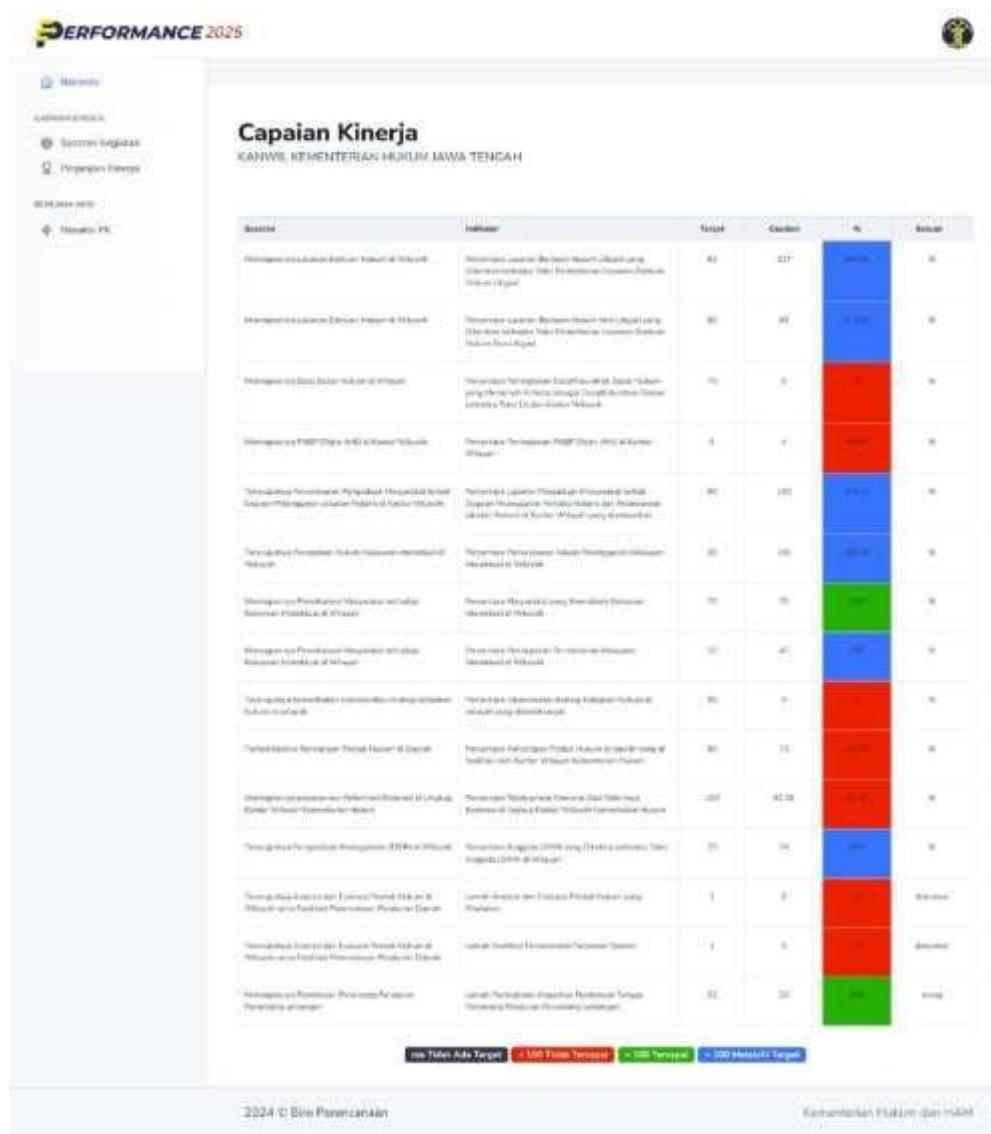


Sumber: <https://smart.kemenkeu.go.id/>

D. Capaian Kinerja Lainnya

Capaian Kinerja E-Performance

Berikut merupakan capaian kinerja Kantor Wilayah jawa tengah Tahun 2025 melalui laman <https://performance.kemenkumham.go.id/>:

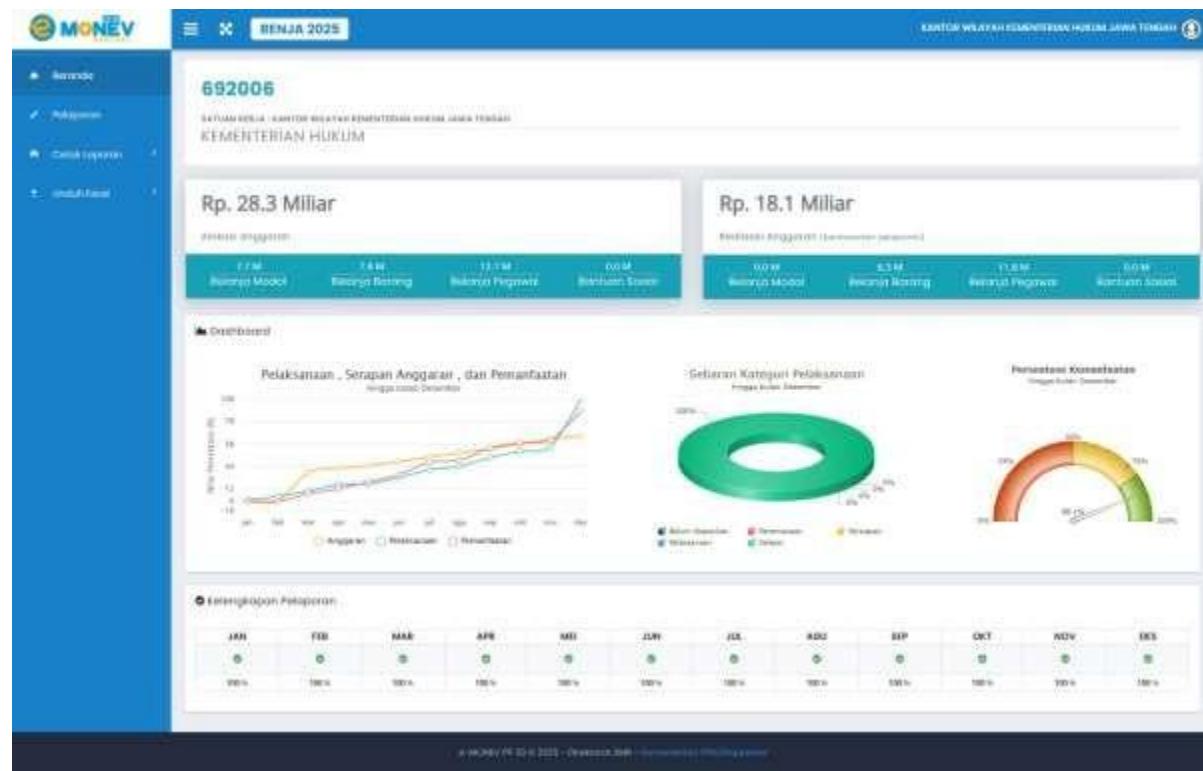


Penginputan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah dalam aplikasi e-performance dilakukan secara periodik tiap triwulan I-IV di Tahun 2025.

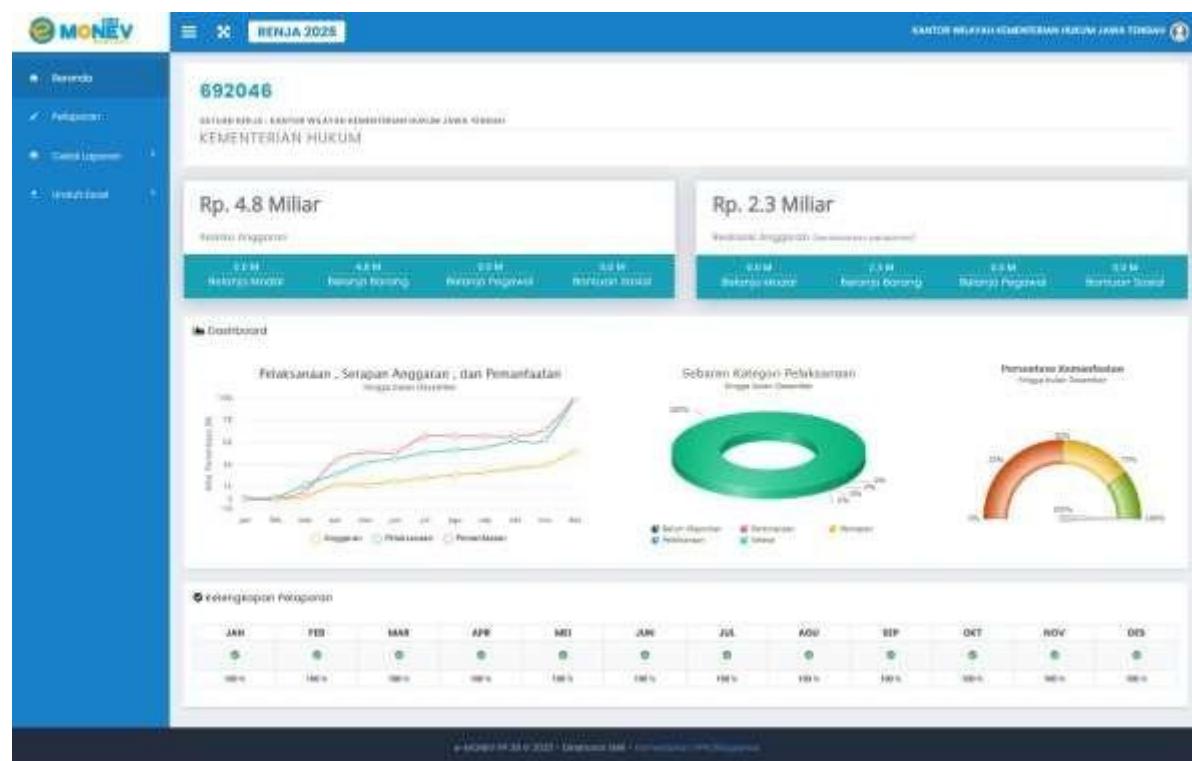
Capaian Kinerja E-Monev Bappenas

Capaian kinerja Kantor Wilayah Jawa Tengah Tahun 2025 melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id/>:

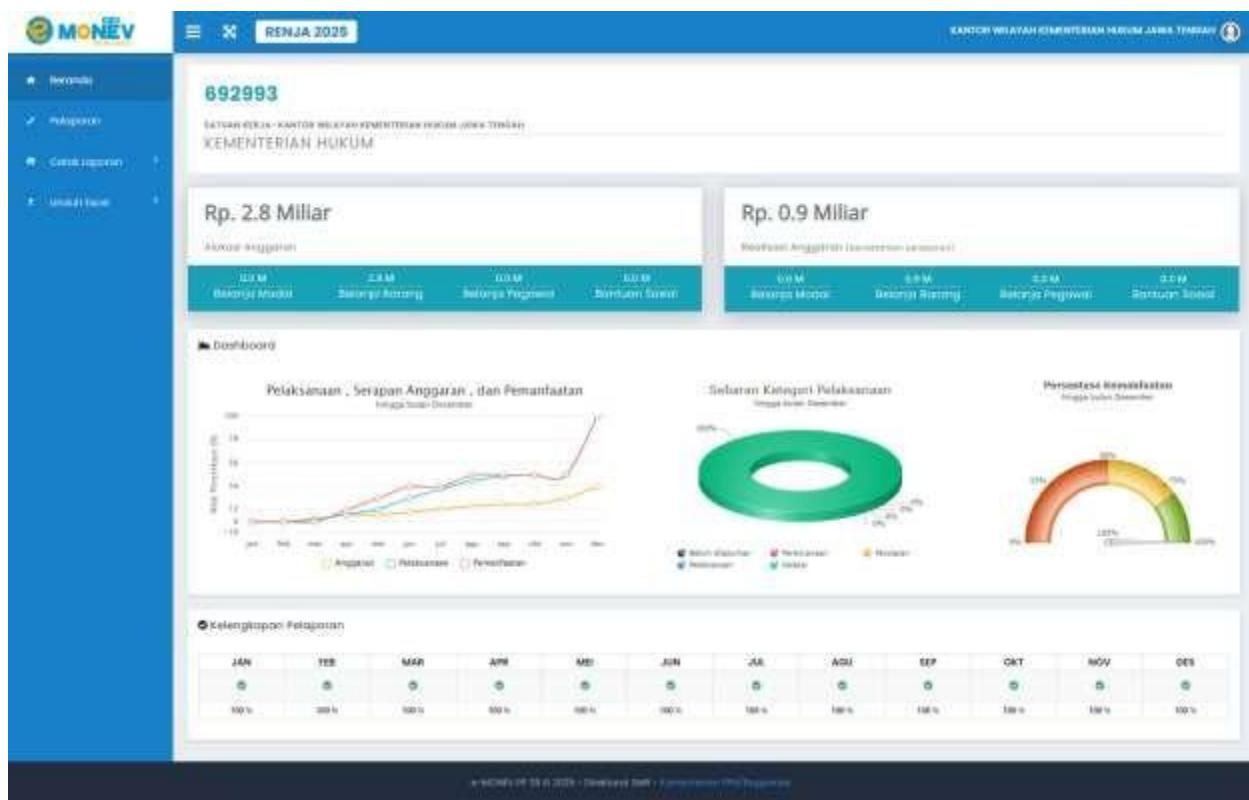
Program Sekretariat Jenderal



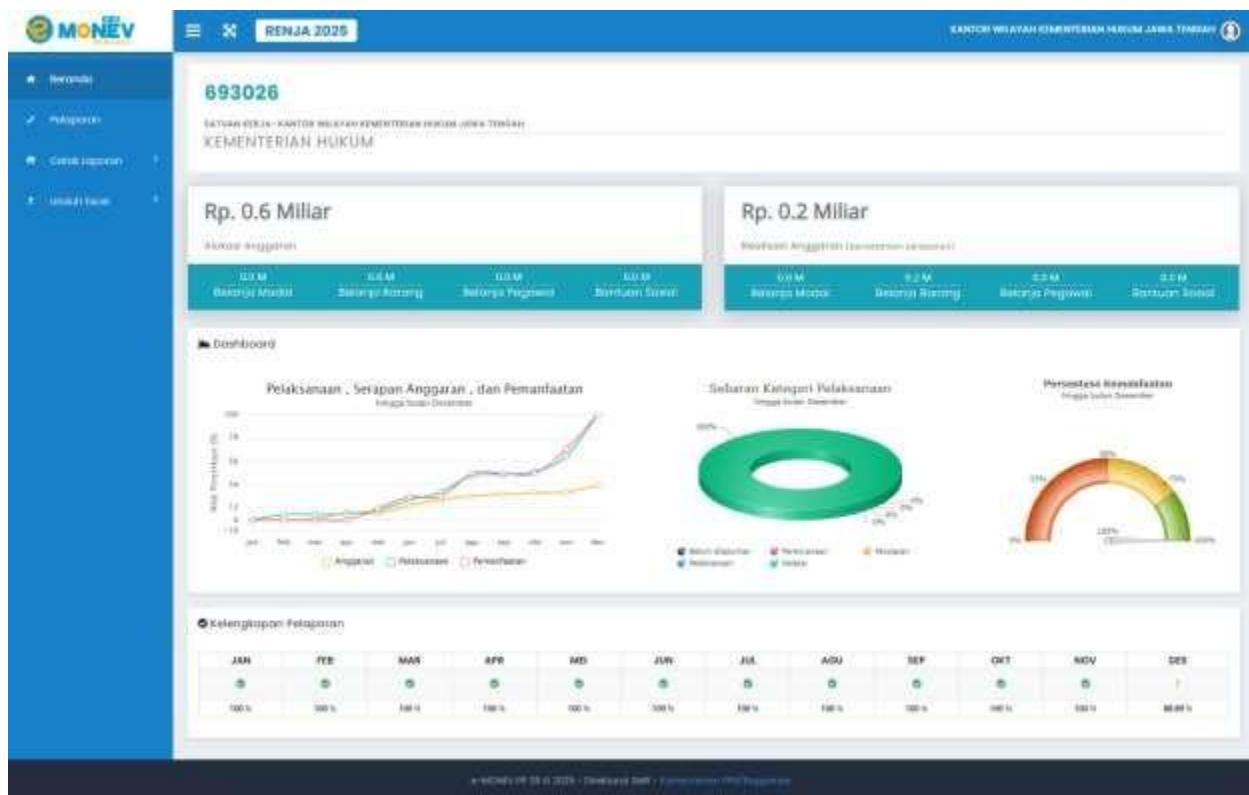
Program Ditjen Administrasi Hukum Umum



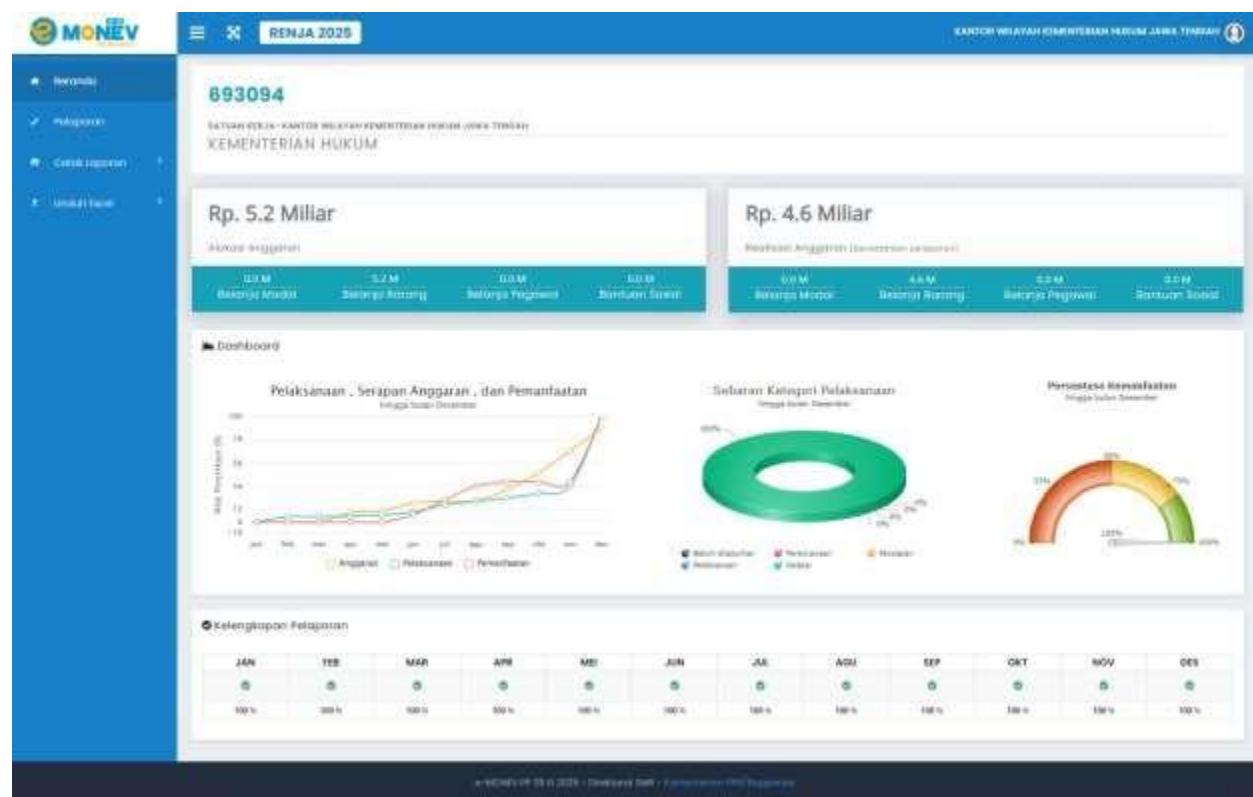
Program Ditjen Kekayaan Intelektual



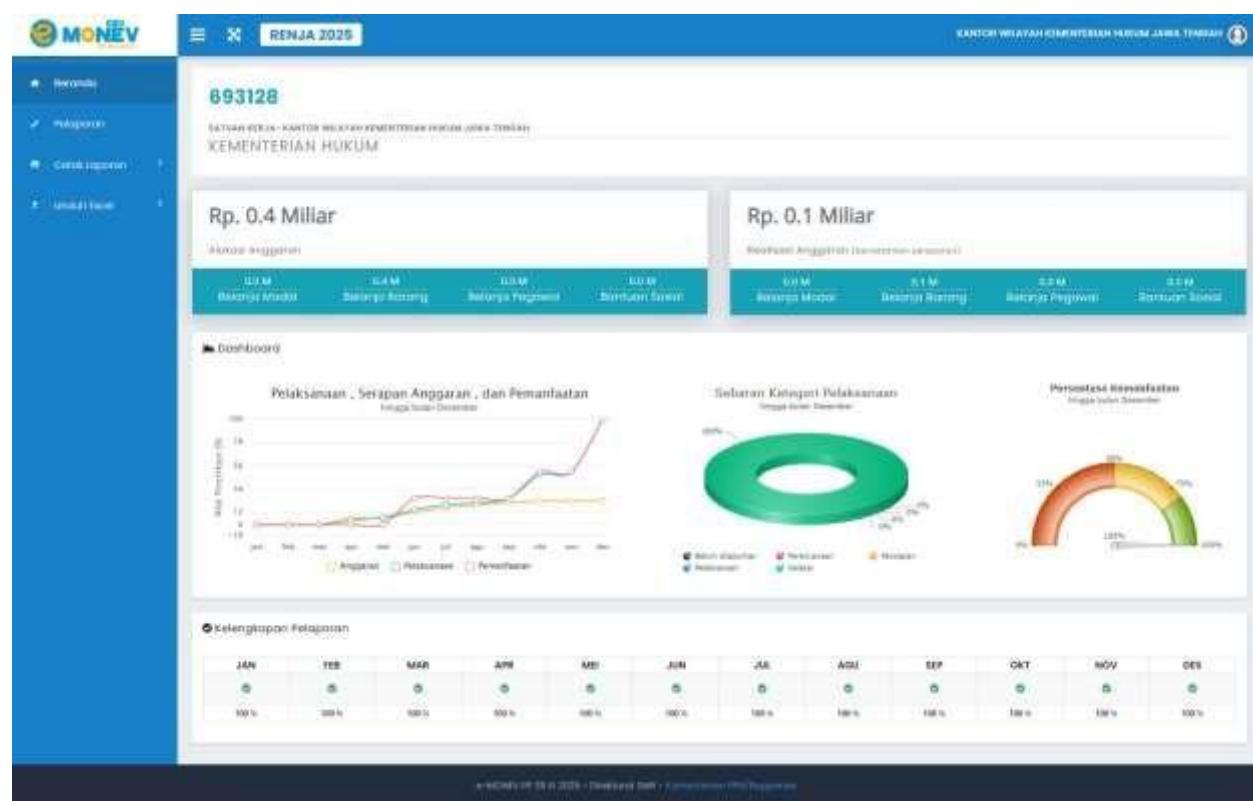
Program Ditjen Peraturan Perundang-undangan



Program Badan Pembinaan Hukum Nasional



Program Badan Strategi Kebijakan





BAB IV PENUTUP

BerAKHLAK²
Berakhlak, Teladani, &
Beramal, Bertaqwa



SEMAKIN
PASTI

bangga
melayani
bangsa

A. Simpulan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah secara umum dapat merealisasikan seluruh target capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja yang telah disepakati pada Tahun 2025, Kantor Wilayah Jawa Tengah tetap optimis dan berkomitmen untuk memperbaiki dan berupaya sebaik mungkin untuk meningkatkan capaian kinerja di periode selanjutnya.

Berdasarkan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah pada Tahun 2025 yang tercerminkan dari capaian dalam Perjanjian Kinerja, SMART, IKPA dan kinerja anggaran maka dapat disimpulkan bahwa Kantor Wilayah Jawa Tengah telah berupaya semaksimal mungkin dalam mewujudkan dan merealisasikan target yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia, anggaran, dan dari segi sarana prasarana.

Dari total jumlah seluruh alokasi pagu anggaran dari 6 DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah pada Tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan alokasi pagu anggaran pada tahun 2024. Total realisasi anggaran 6 Petikan DIPA dari unit Eselon 1 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah yaitu Rp. 26,194,064,820,- atau 96,20% dari total pagu anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 27,227,406,000,-, dengan total sisa anggaran Rp. 1,033,341,180,-.

B. Saran

Berdasarkan simpulan dan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah dapat kami sampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai bahan penyusunan strategi mencapai kinerja yang lebih baik di tahun berikutnya;
2. Diperlukan upaya peningkatan nilai SAKIP Kantor Wilayah melalui kegiatan pendampingan penyusunan LKjIP satuan kerja dan Kantor Wilayah oleh Unit Eselon I;
3. Dengan peningkatan volume pekerjaan dan demi tercapainya kinerja yang optimal, maka diperlukan penganggaran yang mencukupi pada tahun anggaran berikutnya;
4. Percepatan realisasi anggaran harus terus ditingkatkan sehingga target realisasi anggaran tercapai dengan maksimal pada tahun berikutnya;
5. Perlu meningkatkan koordinasi dan sinergi antara Instansi eksternal/instansi terkait lainnya dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, agar kegiatan selanjutnya dapat lebih terprogram dan berjalan sesuai yang diharapkan;
6. Demi terselenggaranya pelayanan yang lebih baik dan optimal diperlukan penambahan, pelatihan dan melakukan penguatan kompetensi pegawai melalui implementasi Corpu, mengoptimalkan sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan di Kantor Wilayah Jawa Tengah.

Demikian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Tahun 2025 kami buat untuk menjadi periksa dan atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.



Semarang, 09 Januari 2026
Kepala Kantor Wilayah



Heni Susila Wardoyo

LAMPIRAN

PENGHARGAAN / PRESTASI



Terbaik III dalam Pelaksanaan Kinerja Program Kekayaan Intelektual



Penyusunan Laporan Keuangan Terbaik Tingkat UAPPA-W Tahun 2024 lingkup Kanwil DJPB Jawa Tengah



Satker Pelaksana Penyelesaian Hak dan Kewajiban Satker Terdampak Likuidasi Paling Responsif oleh Kanwil DJKN Jateng dan DIY



Penghargaan atas Pembentukan Posbankum terbanyak se Indonesia oleh MURI



Kantor Wilayah dengan "Capaian Kinerja Terbaik II" di lingkungan Kementerian Hukum tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heni Susila Wardoyo
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Nico Afinta
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

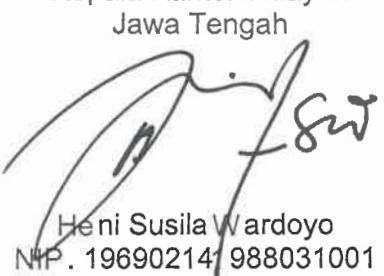
Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal



Nico Afinta

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Jawa Tengah



Heni Susila Wardoyo
NIP. 19690214/988031001

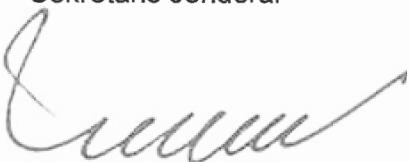
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100 %

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 29.254.089.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Rp 29.254.089.000,-

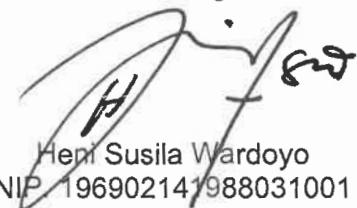
Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
 Sekretaris Jenderal



Nico Afinta

Pihak Pertama,
 Kepala Kantor Wilayah
 Jawa Tengah



Heni Susila Wardoyo
 NIP 196902141988031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heni Susila Wardoyo

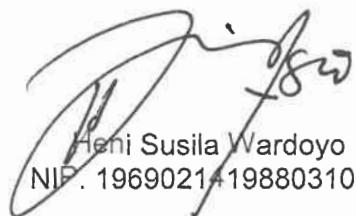
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Jawa Tengah


Heni Susila Wardoyo
NIP. 196902141988031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heni Susila Wardoyo

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo

Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

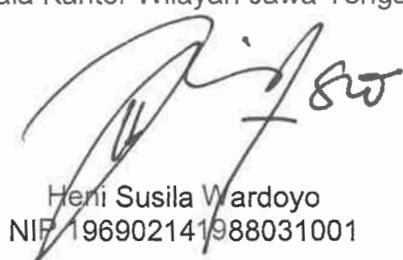
Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum



Widodo

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah



Heni Susila Wardoyo
NIP 196902141988031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH
DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%
2.	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%
3.	Terwujudnya penyelesaian Layanan BHP	Persentase permohonan Layanan BHP yang diselesaikan	90%
4.	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup BHP	Persentase pelaksanaan Rencana Aksi RB di lingkup BHP	100%
		Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 6.138.564.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (Kanwil)	Rp 4.811.600.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (BHP)	Rp 1.326.964.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp 7.877.797.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya BHP	Rp 7.877.797.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
 Direktur Jenderal
 Administrasi Hukum Umum



Widodo

Pihak Pertama,
 Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah



Heni Susila Wardoyo
 NIP 196902141988031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heni Susila Wardoyo
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah



Heni Susila Wardoyo
NIP 196902141986031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heni Susila Wardoyo
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razilu
Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Razilu
NIP 196511281991031002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa tengah

Heni Susila Wardoyo
NIP 196902141988031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
			(4)
1.	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%
2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah 2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	70% 20%

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 2.805.803.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp 2.805.803.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
 Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
 Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

Razilu
 NIP 196511281991031002

Heni Susila Wardoyo
 NIP 196902141988031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heni Susila Wardoyo

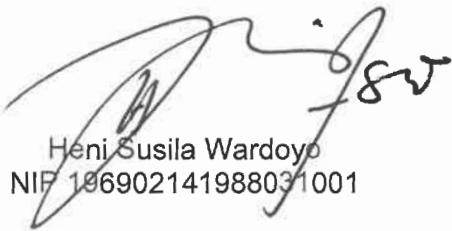
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah



Heni Susila Wardoyo
NIP 196902141988031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heni Susila Wardoyo
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dhahana Putra
Jabatan : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

Heni Susila Wardoyo
NIP. 196902141988031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA TENGAH DENGAN DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80 %
2.	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	22 Orang

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 592.000.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp 592.000.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
 Direktur Jenderal
 Peraturan Perundang-Undangan

Dhahana Putra
 NIP. 196909091993031001

Pihak Pertama,
 Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

Heni Susila Wardoyo
 NIP. 196902141982031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heni Susila Wardoyo

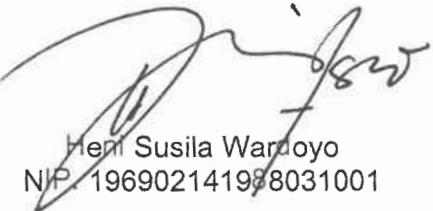
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah



Heni Susila Wardoyo
NIP. 196902141988031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heni Susila Wardoyo
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Min Usihen
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional


Min Usihen
NIP. 196903091994032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah


Heni Susila Wardoyo
NIP. 196902141986031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen
		2. Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen
2.	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Percentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	
3.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1. Percentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82 %
		2. Percentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80 %
4.	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Percentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70 %

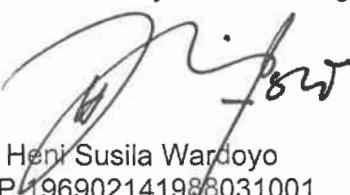
Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 157.549.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp 157.549.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 6.087.619.000,-
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp 6.087.619.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional


Min Usihen
NIP. 196903091994032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah


Heni Susila Wardoyo
NIP. 196902141988031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

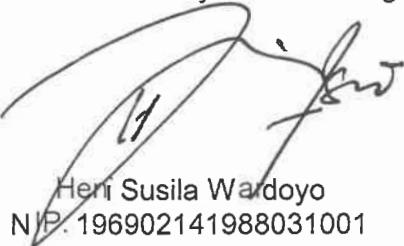
Nama : Heni Susila Wardoyo
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah



Heni Susila Wardoyo
NIP. 196902141988031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heni Susila Wardoyo
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Andry Indradhy
Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

Andry Indradhy
NIP. 198002292000021001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

Heni Susila Wardoyo
NIP. 196902141988031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
DENGAN KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80 %

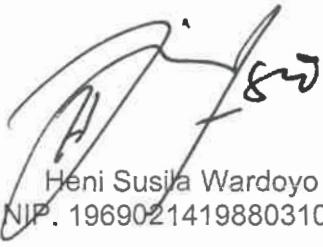
Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 443.051.000,-
Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Rp 443.051.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum


Andry Indraday
NIP. 198002292000021001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah


Heni Susila Wardoyo
NIP. 196902141988031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heni Susila Wardoyo

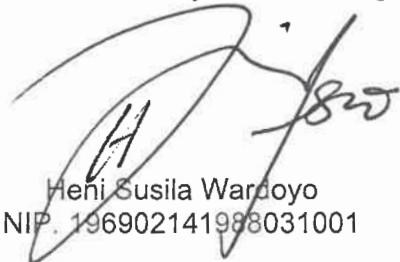
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah



Heni Susila Wardoyo
NIP. 196902141988031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Toni Sugiarto
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Jawa Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Heni Susila Wardoyo
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 16 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

Pihak Pertama,
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum
Kanwil Jawa Tengah

Heni Susila Wardoyo
NIP. 196902141988031001

Toni Sugiarto
NIP. 197307201994031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100 %

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 29.254.089.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Rp 29.254.089.000,-

Semarang, 16 Januari 2025

Pihak Kedua,
 Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

Pihak Pertama,
 Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum
 Jawa Tengah

Heni Susila Wardoyo
 NIP. 196902141988031001

Toni Sugiarto
 NIP. 197307201994031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Toni Sugiarto

Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Jawa Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Semarang, 16 Januari 2025

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum
Jawa Tengah

Toni Sugiarto
NIP. 197307201994031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tjasdirin
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Jawa Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Heni Susila Wardoyo
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 15 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah


Heni Susila Wardoyo
NIP. 196902141988031001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum
Jawa Tengah


Tjasdirin
NIP. 196701171994031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6 %
2.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90 %
3.	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30 %
4.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah 2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	70 % 20 %

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 7.617.403.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp. 4.811.600.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 2.805.803.000,-

Semarang, 15 Januari 2025

Pihak Kedua,
 Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah


 Heni Susila Wardoyo
 NIP. 196902141988031001

Pihak Pertama,
 Kepala Divisi Pelayanan Hukum
 Jawa Tengah


 Tjasdirin
 NIP. 196701171994031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tjasdirin

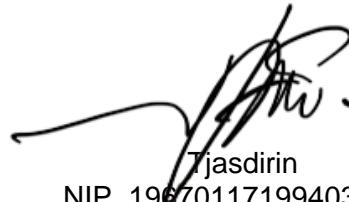
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Jawa Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Semarang, 15 Januari 2025

Kepala Divisi Pelayanan Hukum
Jawa Tengah



Tjasdirin
NIP. 196701171994031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Delmawati
Jabatan : Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Jawa Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Heni Susila Wardoyo
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 15 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah



Heni Susila Wardoyo
NIP. 196902141988031001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Peraturan Perundang-
undangan dan Pembinaan Hukum Jawa
Tengah



Delmawati
NIP. 197306141994032003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80 %
2.	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	22 Orang
3.	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen
		2. Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen
4.	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25 %
5.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82 %
		2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80 %
6.	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70 %
7.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80 %

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 749.549.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp 592.000.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp 157.549.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 6.087.619.000,-
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp 6.087.619.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp 443.051.000,-
Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Rp 443.051.000,-

Semarang, 15 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah



Heni Susila Wardoyo
NIP. 196902141988031001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Peraturan Perundang-
undangan dan Pembinaan Hukum Jawa
Tengah



Delmawati
NIP. 197306141994032003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Delmawati
Jabatan : Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Jawa Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Semarang, 15 Januari 2025

Kepala Divisi Peraturan Perundang-
undangan dan Pembinaan Hukum
Jawa Tengah


Delmawati
NIP. 197306141994032003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heni Susila Wardoyo
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Nico Afinta
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

Nico Afinta



Heni Susila Wardoyo
NIP. 196902141988031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100 %
2.	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 18.979.915.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Rp 18.979.915.000,-

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
 Sekretaris Jenderal

Nico Afinta

Pihak Pertama,
 Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah



Heni Susila Wardoyo
 NIP. 196902141988031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heni Susila Wardoyo

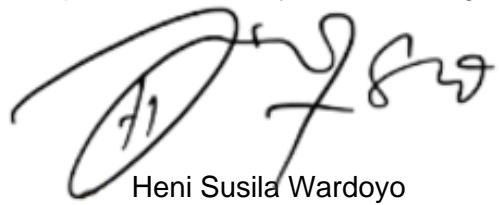
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah



Heni Susila Wardoyo
NIP. 196902141988031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heni Susila Wardoyo

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo

Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

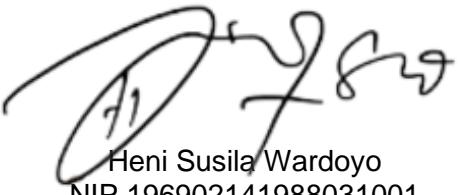
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Widodo

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah


Heni Susila Wardoyo
NIP 196902141988031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	6%
2.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,1 %

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 1.883.700.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (Kanwil)	Rp 1.883.700.000,-

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
 Direktur Jenderal
 Administrasi Hukum Umum

Widodo

Pihak Pertama,
 Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah



Heni Susila Wardoyo
 NIP 196902141988031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heni Susila Wardoyo

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah



Heni Susila Wardoyo
NIP 196902141988031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heni Susila Wardoyo
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razilu
Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

Razilu
NIP 196511281991031002



Heni Susila Wardoyo
NIP 196902141988031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%
2.	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahannya	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahannya yang Selesai Ditangani	30%
3.	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,30 Level

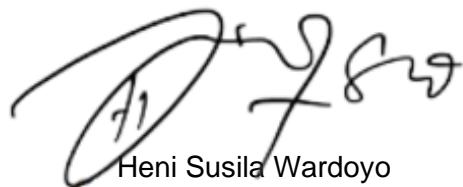
Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 500.000.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp 500.000.000,-

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
 Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
 Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

Razilu
 NIP 196511281991031002



Heni Susila Wardoyo
 NIP 196902141988031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heni Susila Wardoyo

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah



Heni Susila Wardoyo
NIP 196902141988031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heni Susila Wardoyo
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dhahana Putra
Jabatan : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Jawa Tengah

Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001



Heni Susila Wardoyo
NIP. 196902141988031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA TENGAH DENGAN DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	1. Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%
		2. Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 160.600.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp 160.600.000,-

Semarang, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
 Direktur Jenderal
 Peraturan Perundang-Undangan

Dhahana Putra
 NIP. 196909091993031001

Pihak Pertama,
 Kepala Kantor Wilayah
 Jawa Tengah



Heni Susila Wardoyo
 NIP. 196902141988031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heni Susila Wardoyo
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah
berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Semarang, 23 Oktober 2025

Kepala Kantor Wilayah
Jawa Tengah



Heni Susila Wardoyo
NIP. 196902141988031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heni Susila Wardoyo
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Min Usihen
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Min Usihen
NIP. 196903091994032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

Heni Susila Wardoyo
NIP. 196902141988031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10 %
2.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%
3.	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%
4	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	10%

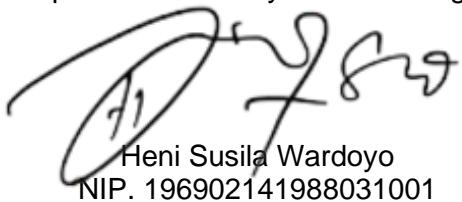
Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 15.000.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp 15.000.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 4.571.686.000,-
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp 4.571.686.000,-

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Min Usihen
NIP. 196903091994032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah


Heni Susila Wardoyo
NIP. 196902141988031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heni Susila Wardoyo

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah



Heni Susila Wardoyo
NIP. 196902141988031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heni Susila Wardoyo

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Andry Indradhy

Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

Andry Indradhy
NIP. 198002292000021001


Heni Susila Wardoyo
NIP. 196902141988031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
DENGAN KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95 %

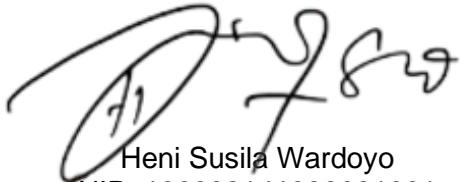
Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 100.000.000,-
Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Rp 100.000.000,-

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

Andry Indraday
NIP. 198002292000021001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah



Heni Susila Wardoyo
NIP. 196902141988031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heni Susila Wardoyo

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah



Heni Susila Wardoyo
NIP. 196902141988031001

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 135 **KEMENTERIAN HUKUM**

Unit Organisasi 01 **SEKRETARIAT JENDERAL**

Satuan Kerja : 692006 **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**

Hal 1 dari 18

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	19,060,535,000	0	17,141,660,362	960,747,463	18,102,407,825	94.97 %	958,127,175
WA Program Dukungan Manajemen	19,060,535,000	0	17,141,660,362	960,747,463	18,102,407,825	94.97 %	958,127,175
WA.7099 Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	19,060,535,000	0	17,141,660,362	960,747,463	18,102,407,825	94.97 %	958,127,175
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	18,668,854,000	0	16,833,246,979	888,370,946	17,721,617,925	94.93 %	947,236,075
EBA.001 Pengelolaan BMN Kantor Wilayah	8,939,000	0	2,293,500	6,645,500	8,939,000	100.00	0
051 Koordinasi Pengelolaan BMN	7,739,000	0	1,093,500	6,645,500	7,739,000	100.00	0
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	7,739,000	0	1,093,500	6,645,500	7,739,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	500,000	0	0	500,000	500,000	100.00	0
000004. Konsumsi Kudapan	500,000	0	0	500,000	500,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,239,000	0	1,093,500	6,145,500	7,239,000	100.00	0
000006. Uang Harian	3,600,000	0	740,000	2,860,000	3,600,000	100.00	0
000007. Uang Penginapan Gol III	2,050,000	0	0	2,050,000	2,050,000	100.00	0
000008. Transport Darat	1,589,000	0	353,500	1,235,500	1,589,000	100.00	0
052 Pengamanan BMN	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
000013. Transport Dalam Kota untuk Koordinasi	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
EBA.002 Layanan Kerja Sama	2,160,000	0	900,000	1,260,000	2,160,000	100.00	0
051 Fasilitasi Kerja Sama	2,160,000	0	900,000	1,260,000	2,160,000	100.00	0
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	2,160,000	0	900,000	1,260,000	2,160,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	1,260,000	0	0	1,260,000	1,260,000	100.00	0
000014. Bahan Pendukung Kegiatan (ATK)	1,260,000	0	0	1,260,000	1,260,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
000022. Transport Dalam Kota	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
EBA.956 Layanan BMN	900,000	0	600,000	300,000	900,000	100.00	0
052 Pengalihan dan Monitoring BMN	900,000	0	600,000	300,000	900,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 135 **KEMENTERIAN HUKUM**

Unit Organisasi 01 **SEKRETARIAT JENDERAL**

Satuan Kerja : 692006 **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**

Hal 2 dari 18

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	900,000	0	600,000	300,000	900,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900,000	0	600,000	300,000	900,000	100.00	0
000029. Transport Dalam Kota Koordinasi ke UPT Kota Semarang dan Dinas Terkait	900,000	0	600,000	300,000	900,000	100.00	0
EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	117,832,000	0	66,945,000	49,617,184	116,562,184	98.92 %	1,269,816
051 Peliputan	29,039,000	0	9,386,500	19,617,184	29,003,684	99.88 %	35,316
051.0A Penyediaan Informasi Publik	29,039,000	0	9,386,500	19,617,184	29,003,684	99.88 %	35,316
521211 Belanja Bahan	2,340,000	0	2,340,000	0	2,340,000	100.00	0
000199. Konsumsi Kudapan	2,340,000	0	2,340,000	0	2,340,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22,349,000	0	2,696,500	19,617,184	22,313,684	99.84 %	35,316
000201. Transportasi Darat	2,776,000	0	320,000	2,455,984	2,775,984	100.00	16
000202. Uang Harian	5,314,000	0	1,060,000	4,254,000	5,314,000	100.00	0
000203. Uang Penginapan	3,040,000	0	0	3,040,000	3,040,000	100.00	0
000204. Transport Darat	1,600,000	0	0	1,600,000	1,600,000	100.00	0
000206. Taksi Semarang	4,000	0	0	0	0	0.00 %	4,000
000208. Uang Harian	5,871,000	0	1,316,500	4,545,000	5,861,500	99.84 %	9,500
000209. Uang Penginapan	3,744,000	0	0	3,722,200	3,722,200	99.42 %	21,800
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,350,000	0	4,350,000	0	4,350,000	100.00	0
000210. Transport Dalam Kota Koordinasi ke UPT Kota Semarang dan Peliputan	4,350,000	0	4,350,000	0	4,350,000	100.00	0
052 Publikasi	88,793,000	0	57,558,500	30,000,000	87,558,500	98.61 %	1,234,500
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	88,793,000	0	57,558,500	30,000,000	87,558,500	98.61 %	1,234,500
521211 Belanja Bahan	33,793,000	0	32,558,500	0	32,558,500	96.35 %	1,234,500
000213. Backdrop, Banner, Leaflet, Flyer, Plakat	33,793,000	0	32,558,500	0	32,558,500	96.35 %	1,234,500
522191 Belanja Jasa Lainnya	55,000,000	0	25,000,000	30,000,000	55,000,000	100.00	0
000216. Advertorial Cetak	6,000,000	0	2,000,000	4,000,000	6,000,000	100.00	0
000217. Advertorial Online	49,000,000	0	23,000,000	26,000,000	49,000,000	100.00	0
EBA.959 Layanan Protokoler	51,108,000	0	33,100,000	13,381,500	46,481,500	90.95 %	4,626,500

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 135 **KEMENTERIAN HUKUM**

Unit Organisasi 01 **SEKRETARIAT JENDERAL**

Satuan Kerja : 692006 **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**

Hal 3 dari 18

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
051 Koordinasi Keprotokoleran	4,008,000	0	600,000	2,948,000	3,548,000	88.52 %	460,000
051.0A Koordinasi Keprotokoleran	4,008,000	0	600,000	2,948,000	3,548,000	88.52 %	460,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,408,000	0	0	2,948,000	2,948,000	86.50 %	460,000
000154. Uang Harian	1,208,000	0	0	1,208,000	1,208,000	100.00	0
000155. Uang Penginapan	1,200,000	0	0	740,000	740,000	61.67 %	460,000
000156. Transpor Darat	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
000157. Transport Dalam Kota Keprotokoleran Kanwil	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
052 Pelaksanaan Keprotokoleran	47,100,000	0	32,500,000	10,433,500	42,933,500	91.15 %	4,166,500
052.0A Pelaksanaan Keprotokoleran	47,100,000	0	32,500,000	10,433,500	42,933,500	91.15 %	4,166,500
522191 Belanja Jasa Lainnya	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000	100.00	0
000453. Advertorial Online	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22,400,000	0	8,850,000	10,133,500	18,983,500	84.75 %	3,416,500
000165. Transpor Darat	1,000,000	0	0	382,500	382,500	38.25 %	617,500
000166. Uang Harian	6,906,000	0	2,664,000	4,242,000	6,906,000	100.00	0
000167. Uang Penginapan	5,668,000	0	2,580,000	3,088,000	5,668,000	100.00	0
000168. Transport Darat	1,602,000	0	0	603,000	603,000	37.64 %	999,000
000172. Uang Harian	1,818,000	0	0	1,818,000	1,818,000	100.00	0
000173. Uang Penginapan	1,800,000	0	0	0	0	0.00 %	1,800,000
000463. Transpor Darat	3,606,000	0	3,606,000	0	3,606,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,700,000	0	1,650,000	300,000	1,950,000	72.22 %	750,000
000174. Transport Dalam Kota	2,700,000	0	1,650,000	300,000	1,950,000	72.22 %	750,000
EBA.962 Layanan Umum	8,000,000	0	7,667,950	0	7,667,950	95.85 %	332,050
052 Pengelolaan Rumah Tangga Kantor Wilayah	4,000,000	0	3,668,100	0	3,668,100	91.70 %	331,900
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	4,000,000	0	3,668,100	0	3,668,100	91.70 %	331,900
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4,000,000	0	3,668,100	0	3,668,100	91.70 %	331,900
000194. Lisensi Aplikasi Kehumasan	4,000,000	0	3,668,100	0	3,668,100	91.70 %	331,900

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 135 KEMENTERIAN HUKUM

Unit Organisasi 01 SEKRETARIAT JENDERAL

Satuan Kerja : 692006 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

Hal 4 dari 18

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
053 Pengelolaan Kesehatan Pegawai	4,000,000	0	3,999,850	0	3,999,850	100.00	150
053.0A TANPA SUB KOMPONEN	4,000,000	0	3,999,850	0	3,999,850	100.00	150
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4,000,000	0	3,999,850	0	3,999,850	100.00	150
000195. Poliklinik/Obat-obatan Pegawai	4,000,000	0	3,999,850	0	3,999,850	100.00	150
EBA.994 Layanan Perkantoran	18,479,915,000	0	16,721,740,529	817,166,762	17,538,907,291	94.91 %	941,007,709
001 Gaji dan Tunjangan	12,749,563,000	0	11,507,383,014	327,170,354	11,834,553,368	92.82 %	915,009,632
001.0A Pembayaran gaji dan tunjangan	12,534,947,000	0	11,423,137,014	196,837,354	11,619,974,368	92.70 %	914,972,632
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	8,437,780,000	0	7,949,647,880	0	7,949,647,880	94.21 %	488,132,120
000032. Belanja Gaji Pokok PNS	7,391,920,000	0	6,903,789,380	0	6,903,789,380	93.40 %	488,130,620
000033. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	482,346,000	0	482,345,300	0	482,345,300	100.00	700
000034. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	563,514,000	0	563,513,200	0	563,513,200	100.00	800
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	118,000	0	98,787	0	98,787	83.72 %	19,213
000035. Belanja Pembulatan Gaji PNS	102,000	0	83,605	0	83,605	81.97 %	18,395
000036. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	7,000	0	6,860	0	6,860	98.00 %	140
000037. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	9,000	0	8,322	0	8,322	92.47 %	678
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	601,101,000	0	537,861,852	0	537,861,852	89.48 %	63,239,148
000038. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	527,453,000	0	464,214,242	0	464,214,242	88.01 %	63,238,758
000039. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	33,917,000	0	33,916,730	0	33,916,730	100.00	270
000040. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	39,731,000	0	39,730,880	0	39,730,880	100.00	120
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	158,928,000	0	145,740,305	0	145,740,305	91.70 %	13,187,695
000041. Belanja Tunj. Anak PNS	139,405,000	0	126,218,553	0	126,218,553	90.54 %	13,186,447
000042. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	9,128,000	0	9,127,710	0	9,127,710	100.00	290
000043. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	10,395,000	0	10,394,042	0	10,394,042	99.99 %	958
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	231,885,000	0	228,885,000	0	228,885,000	98.71 %	3,000,000
000044. Belanja Tunjangan Struktural PNS	199,240,000	0	196,240,000	0	196,240,000	98.49 %	3,000,000
000045. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	11,080,000	0	11,080,000	0	11,080,000	100.00	0
000046. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	21,565,000	0	21,565,000	0	21,565,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 135 KEMENTERIAN HUKUM

Unit Organisasi 01 SEKRETARIAT JENDERAL

Satuan Kerja : 692006 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

Hal 5 dari 18

Kode	Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	910,837,000	0	905,837,000	0	905,837,000	99.45 %	5,000,000
	000047. Belanja Tunjangan Fungsional PNS	783,435,000	0	778,435,000	0	778,435,000	99.36 %	5,000,000
	000048. Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	61,382,000	0	61,382,000	0	61,382,000	100.00	0
	000049. Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14)	66,020,000	0	66,020,000	0	66,020,000	100.00	0
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	105,573,000	0	95,328,420	0	95,328,420	90.30 %	10,244,580
	000050. Belanja Tunjangan PPh PNS	33,958,000	0	25,267,082	0	25,267,082	74.41 %	8,690,918
	000051. Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)	34,249,000	0	32,695,735	0	32,695,735	95.46 %	1,553,265
	000052. Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)	37,366,000	0	37,365,603	0	37,365,603	100.00	397
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	438,148,000	0	389,547,180	0	389,547,180	88.91 %	48,600,820
	000053. Belanja Tunj Beras PNS	438,148,000	0	389,547,180	0	389,547,180	88.91 %	48,600,820
511129	Belanja Uang Makan PNS	1,422,816,000	0	978,660,000	176,742,000	1,155,402,000	81.21 %	267,414,000
	000055. Belanja Uang Makan	64,680,000	0	40,315,000	7,175,000	47,490,000	73.42 %	17,190,000
	000057. Belanja Uang Makan	1,062,936,000	0	675,043,000	137,669,000	812,712,000	76.46 %	250,224,000
	000059. Belanja Uang Makan	295,200,000	0	263,302,000	31,898,000	295,200,000	100.00	0
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	180,415,000	0	167,300,000	0	167,300,000	92.73 %	13,115,000
	000060. Belanja Tunjangan Umum PNS	160,445,000	0	147,330,000	0	147,330,000	91.83 %	13,115,000
	000061. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	8,515,000	0	8,515,000	0	8,515,000	100.00	0
	000062. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	11,455,000	0	11,455,000	0	11,455,000	100.00	0
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	30,138,000	0	20,092,000	10,046,000	30,138,000	100.00	0
	000544. Belanja Gaji Pokok PPPK	30,138,000	0	20,092,000	10,046,000	30,138,000	100.00	0
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6,000	0	290	204	494	8.23 %	5,506
	000545. Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6,000	0	290	204	494	8.23 %	5,506
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	1,512,000	0	502,300	251,150	753,450	49.83 %	758,550
	000546. Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	1,512,000	0	502,300	251,150	753,450	49.83 %	758,550
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	918,000	0	602,760	301,380	904,140	98.49 %	13,860
	000547. Belanja Tunj. Anak PPPK	918,000	0	602,760	301,380	904,140	98.49 %	13,860
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2,400,000	0	1,593,240	796,620	2,389,860	99.58 %	10,140

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 135 **KEMENTERIAN HUKUM**

Unit Organisasi 01 **SEKRETARIAT JENDERAL**

Satuan Kerja : 692006 **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**

Hal 6 dari 18

	Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000548. Belanja Tunj Beras PPPK	2,400,000	0	1,593,240	796,620	2,389,860	99.58 %	10,140
511628	Belanja Uang Makan PPPK	10,212,000	0	0	7,980,000	7,980,000	78.14 %	2,232,000
	000550. Belanja Uang Makan	10,212,000	0	0	7,980,000	7,980,000	78.14 %	2,232,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	2,160,000	0	1,440,000	720,000	2,160,000	100.00	0
	000551. Belanja Tunjangan Umum PPPK	2,160,000	0	1,440,000	720,000	2,160,000	100.00	0
001.0C	Uang Lembur	214,616,000	0	84,246,000	130,333,000	214,579,000	99.98 %	37,000
512211	Belanja Uang Lembur	214,616,000	0	84,246,000	130,333,000	214,579,000	99.98 %	37,000
	000064. Belanja Uang Lembur	15,807,000	0	5,328,000	10,479,000	15,807,000	100.00	0
	000065. Belanja Uang Makan Lembur	4,356,000	0	1,260,000	3,096,000	4,356,000	100.00	0
	000067. Belanja Uang Lembur	127,926,000	0	51,450,000	76,476,000	127,926,000	100.00	0
	000068. Belanja Uang Makan Lembur	34,040,000	0	11,544,000	22,496,000	34,040,000	100.00	0
	000070. Belanja Uang Lembur	26,460,000	0	12,204,000	14,256,000	26,460,000	100.00	0
	000071. Belanja Uang Makan Lembur	6,027,000	0	2,460,000	3,530,000	5,990,000	99.39 %	37,000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	5,730,352,000	0	5,214,357,515	489,996,408	5,704,353,923	99.55 %	25,998,077
002.0A	Pakaian Dinas (Pakaian)	91,442,000	0	91,442,000	0	91,442,000	100.00	0
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	91,442,000	0	91,442,000	0	91,442,000	100.00	0
	000072. Pakaian Dinas PPNPN Keamanan/Security	8,578,000	0	8,578,000	0	8,578,000	100.00	0
	000073. Pakaian Dinas PPNPN Pengemudi/Driver	2,007,000	0	2,007,000	0	2,007,000	100.00	0
	000074. Pakaian Dinas PPNPN Pramubakti/OB	6,021,000	0	6,021,000	0	6,021,000	100.00	0
	000464. Baju Olahraga Pegawai	32,928,000	0	32,928,000	0	32,928,000	100.00	0
	000527. Bendera Pataka 1 sisi	7,992,000	0	7,992,000	0	7,992,000	100.00	0
	000528. Bendera Pataka 2 sisi	11,544,000	0	11,544,000	0	11,544,000	100.00	0
	000529. Bendera Pataka Pengayoman	2,997,000	0	2,997,000	0	2,997,000	100.00	0
	000530. Cover/Sarung Kursi	12,500,000	0	12,500,000	0	12,500,000	100.00	0
	000531. Taplak Meja Bundar	2,125,000	0	2,125,000	0	2,125,000	100.00	0
	000532. Taplak Meja Panjang	4,750,000	0	4,750,000	0	4,750,000	100.00	0
002.0B	Pemeliharaan Gedung	1,274,030,000	0	1,126,851,134	144,732,680	1,271,583,814	99.81 %	2,446,186

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 135 **KEMENTERIAN HUKUM**

Unit Organisasi 01 **SEKRETARIAT JENDERAL**

Satuan Kerja : 692006 **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**

Hal 7 dari 18

	Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,245,030,000	0	1,105,485,634	137,439,980	1,242,925,614	99.83 %	2,104,386
	000075. Gedung Kantor Bertingkat	874,169,000	0	762,229,294	109,889,980	872,119,274	99.77 %	2,049,726
	000076. Halaman Gedung	115,650,000	0	88,100,000	27,550,000	115,650,000	100.00	0
	000077. Gedung Kantor Tidak Bertingkat	115,003,000	0	115,002,700	0	115,002,700	100.00	300
	000442. Rumah Negara	140,208,000	0	140,153,640	0	140,153,640	99.96 %	54,360
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	29,000,000	0	21,365,500	7,292,700	28,658,200	98.82 %	341,800
	000078. Barang Persediaan Gedung Bangunan	29,000,000	0	21,365,500	7,292,700	28,658,200	98.82 %	341,800
002.0C	Pemeliharaan Peralatan Perkantoran	321,563,000	0	306,641,025	13,534,300	320,175,325	99.57 %	1,387,675
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	321,563,000	0	306,641,025	13,534,300	320,175,325	99.57 %	1,387,675
	000079. Inventaris Kantor	10,880,000	0	10,125,000	725,000	10,850,000	99.72 %	30,000
	000081. Genset 150 KVA	17,726,000	0	17,720,000	0	17,720,000	99.97 %	6,000
	000082. Camera Digital	12,000,000	0	11,961,675	0	11,961,675	99.68 %	38,325
	000084. Video Conference	1,160,000	0	1,160,000	0	1,160,000	100.00	0
	000085. TV	24,433,000	0	24,419,325	0	24,419,325	99.94 %	13,675
	000086. CCTV	20,800,000	0	20,760,000	0	20,760,000	99.81 %	40,000
	000088. Mesin Absensi	5,801,000	0	5,727,500	0	5,727,500	98.73 %	73,500
	000089. Fotocopy	11,100,000	0	11,000,000	0	11,000,000	99.10 %	100,000
	000091. Pintu Elektrik	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
	000092. Videotron	35,500,000	0	35,455,000	0	35,455,000	99.87 %	45,000
	000095. BBM Genset 150 KVA	5,250,000	0	4,550,000	700,000	5,250,000	100.00	0
	000096. Unit Power Supply	8,800,000	0	8,762,000	0	8,762,000	99.57 %	38,000
	000098. Laptop	8,240,000	0	5,827,500	2,412,500	8,240,000	100.00	0
	000100. Komputer	34,820,000	0	34,783,250	0	34,783,250	99.89 %	36,750
	000101. Printer	18,049,000	0	16,909,500	435,000	17,344,500	96.10 %	704,500
	000104. AC Split	72,804,000	0	70,150,350	2,641,800	72,792,150	99.98 %	11,850
	000534. Server	9,700,000	0	9,673,675	0	9,673,675	99.73 %	26,325

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 135 **KEMENTERIAN HUKUM**

Unit Organisasi 01 **SEKRETARIAT JENDERAL**

Satuan Kerja : 692006 **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**

Hal 8 dari 18

	Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000556. PC	21,500,000	0	14,656,250	6,620,000	21,276,250	98.96 %	223,750
002.0D	Pemeliharaan Kendaraan	357,925,000	0	309,453,287	43,053,089	352,506,376	98.49 %	5,418,624
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	31,300,000	0	27,661,500	3,543,500	31,205,000	99.70 %	95,000
	000105. Pengurusan STNK Kendaraan Roda 2 (Dua)	1,600,000	0	1,065,000	497,000	1,562,000	97.62 %	38,000
	000106. Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 (Empat)	29,700,000	0	26,596,500	3,046,500	29,643,000	99.81 %	57,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	326,625,000	0	281,791,787	39,509,589	321,301,376	98.37 %	5,323,624
	000108. Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (Empat) Pimti	413,000	0	350,000	0	350,000	84.75 %	63,000
	000110. Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 (Dua)	14,800,000	0	14,454,910	345,000	14,799,910	100.00	90
	000111. Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (Empat)	200,000,000	0	185,027,346	10,694,463	195,721,809	97.86 %	4,278,191
	000113. Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (Empat)	56,412,000	0	39,155,890	16,638,353	55,794,243	98.90 %	617,757
	000449. BBM Kendaraan Roda 2 (Dua)	3,000,000	0	2,230,880	404,563	2,635,443	87.85 %	364,557
	000450. BBM Kendaraan Roda 4 (Empat)	52,000,000	0	40,572,761	11,427,210	51,999,971	100.00	29
002.0E	Langganan Daya dan Jasa	530,868,000	0	486,177,676	43,808,204	529,985,880	99.83 %	882,120
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6,096,000	0	4,838,050	985,000	5,823,050	95.52 %	272,950
	000114. Pengiriman Surat Dinas (POS)	6,096,000	0	4,838,050	985,000	5,823,050	95.52 %	272,950
522111	Belanja Langganan Listrik	520,392,000	0	477,657,915	42,730,888	520,388,803	100.00	3,197
	000115. Langganan Listrik	520,392,000	0	477,657,915	42,730,888	520,388,803	100.00	3,197
522112	Belanja Langganan Telepon	1,788,000	0	1,366,209	92,316	1,458,525	81.57 %	329,475
	000116. Langganan Telepon	1,788,000	0	1,366,209	92,316	1,458,525	81.57 %	329,475
522113	Belanja Langganan Air	2,592,000	0	2,315,502	0	2,315,502	89.33 %	276,498
	000117. Langganan Air	2,592,000	0	2,315,502	0	2,315,502	89.33 %	276,498
002.0F	Keperluan Perkantoran	1,839,463,000	0	1,773,562,221	59,843,659	1,833,405,880	99.67 %	6,057,120
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	642,440,000	0	586,282,421	56,152,799	642,435,220	100.00	4,780
	000118. Keperluan Sehari-hari Perkantoran (Memiliki lebih dari 40 Pegawai)	221,790,000	0	193,882,421	27,914,799	221,797,220	100.00	-7,220
	000119. Retribusi Sampah	7,200,000	0	6,000,000	1,200,000	7,200,000	100.00	0
	000120. PPNPN Keamanan/Security (UMK Kota Semarang)	122,400,000	0	122,400,000	0	122,400,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 135 **KEMENTERIAN HUKUM**

Unit Organisasi 01 **SEKRETARIAT JENDERAL**

Satuan Kerja : 692006 **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**

Hal 9 dari 18

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000121. PPNPN Pengemudi/Driver (UMK Kota Semarang)	34,000,000	0	34,000,000	0	34,000,000	100.00	0
000122. PPNPN Pramubakti/OB (UMK Kota Semarang)	122,400,000	0	122,400,000	0	122,400,000	100.00	0
000435. PPNPN	95,200,000	0	95,200,000	0	95,200,000	100.00	0
000535. Cetak dan Banner	16,000,000	0	12,400,000	3,600,000	16,000,000	100.00	0
000557. Snack rapat persiapan Posbankum	2,350,000	0	0	2,338,000	2,338,000	99.49 %	12,000
000562. Kalender	12,000,000	0	0	12,000,000	12,000,000	100.00	0
000563. Patwal kegiatan Posbankum	7,000,000	0	0	7,000,000	7,000,000	100.00	0
000570. Buletin	2,100,000	0	0	2,100,000	2,100,000	100.00	0
521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	83,935,000	0	83,160,000	775,000	83,935,000	100.00	0
000512. Meja Kerja	19,500,000	0	19,500,000	0	19,500,000	100.00	0
000513. Tiang Bendera	6,160,000	0	6,160,000	0	6,160,000	100.00	0
000533. Kursi besi	17,500,000	0	17,500,000	0	17,500,000	100.00	0
000536. Unit Power Supply	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	100.00	0
000537. Kompor Listrik	775,000	0	0	775,000	775,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	54,688,000	0	45,719,800	2,915,860	48,635,660	88.93 %	6,052,340
000123. ATK, Barang Cetakan dan Alat Rumah Tangga	33,318,000	0	29,220,750	1,915,860	31,136,610	93.45 %	2,181,390
000124. Bahan Komputer Supplies	19,000,000	0	15,323,550	0	15,323,550	80.65 %	3,676,450
000125. Materai	2,370,000	0	1,175,500	1,000,000	2,175,500	91.79 %	194,500
522191 Belanja Jasa Lainnya	1,058,400,000	0	1,058,400,000	0	1,058,400,000	100.00	0
000436. PPNPN	1,058,400,000	0	1,058,400,000	0	1,058,400,000	100.00	0
002.0G Konsultasi dan Koordinasi	156,798,000	0	124,873,143	25,654,726	150,527,869	96.00 %	6,270,131
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	156,798,000	0	124,873,143	25,654,726	150,527,869	96.00 %	6,270,131
000127. Uang Harian	58,620,000	0	44,140,000	14,218,000	58,358,000	99.55 %	262,000
000128. Uang Penginapan Eselon II	65,314,000	0	56,388,454	3,970,000	60,358,454	92.41 %	4,955,546
000129. Tiket Pesawat	11,000,000	0	7,816,360	3,020,476	10,836,836	98.52 %	163,164
000130. Taksi Jakarta	1,864,000	0	445,000	744,000	1,189,000	63.79 %	675,000
000454. Transportasi Darat	20,000,000	0	16,083,329	3,702,250	19,785,579	98.93 %	214,421

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 135 **KEMENTERIAN HUKUM**

Unit Organisasi 01 **SEKRETARIAT JENDERAL**

Satuan Kerja : 692006 **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**

Hal 10 dari 18

	Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
002.0H	Jamuan Tamu Pimpinan	219,373,000	0	202,636,182	16,694,750	219,330,932	99.98 %	42,068
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	219,373,000	0	202,636,182	16,694,750	219,330,932	99.98 %	42,068
	000131. Jamuan Tamu	177,373,000	0	160,636,182	16,694,750	177,330,932	99.98 %	42,068
	000132. Plakat/Cinderemata	42,000,000	0	42,000,000	0	42,000,000	100.00	0
002.0I	Honor Operasional Satker	113,112,000	0	85,140,000	27,930,000	113,070,000	99.96 %	42,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	113,112,000	0	85,140,000	27,930,000	113,070,000	99.96 %	42,000
	000135. BPP AHU	3,600,000	0	2,980,000	600,000	3,580,000	99.44 %	20,000
	000136. Honor SAI Satker	7,200,000	0	5,400,000	1,800,000	7,200,000	100.00	0
	000137. Honor SAI Wilayah	9,000,000	0	6,750,000	2,250,000	9,000,000	100.00	0
	000138. KPA	23,592,000	0	16,450,000	7,120,000	23,570,000	99.91 %	22,000
	000140. PPK	21,000,000	0	15,990,000	5,010,000	21,000,000	100.00	0
	000141. PPSPM	9,000,000	0	6,750,000	2,250,000	9,000,000	100.00	0
	000142. Bendahara Pengeluaran	7,920,000	0	6,080,000	1,840,000	7,920,000	100.00	0
	000144. Staf PPABP	5,880,000	0	4,410,000	1,470,000	5,880,000	100.00	0
	000145. Staf Pengelola Keuangan	14,160,000	0	10,620,000	3,540,000	14,160,000	100.00	0
	000444. PPSPM	5,640,000	0	4,230,000	1,410,000	5,640,000	100.00	0
	000445. BPP KI, BSK, PP	2,520,000	0	2,340,000	180,000	2,520,000	100.00	0
	000446. BPP BPHN	3,600,000	0	3,140,000	460,000	3,600,000	100.00	0
002.0J	Sewa Operasional Perkantoran	733,176,000	0	653,672,347	77,321,000	730,993,347	99.70 %	2,182,653
522141	Belanja Sewa	662,400,000	0	588,245,130	72,120,000	660,365,130	99.69 %	2,034,870
	000146. Kendaraan Dinas Operasional Pejabat Eselon II	500,400,000	0	500,400,000	0	500,400,000	100.00	0
	000448. Sewa Kendaraan Insidentil	157,400,000	0	83,245,130	72,120,000	155,365,130	98.71 %	2,034,870
	000514. Sewa Booth Pameran	4,600,000	0	4,600,000	0	4,600,000	100.00	0
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	70,776,000	0	65,427,217	5,201,000	70,628,217	99.79 %	147,783
	000147. BBM Sewa Kendaraan Pejabat Eselon II	70,776,000	0	65,427,217	5,201,000	70,628,217	99.79 %	147,783
002.0K	Pelantikan/Sumpah Jabatan	92,602,000	0	53,908,500	37,424,000	91,332,500	98.63 %	1,269,500
521211	Belanja Bahan	50,602,000	0	14,096,500	36,374,000	50,470,500	99.74 %	131,500

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 135 **KEMENTERIAN HUKUM**

Unit Organisasi 01 **SEKRETARIAT JENDERAL**

Satuan Kerja : 692006 **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**

Hal 11 dari 18

	Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000148. Konsumsi Kudapan	2,740,000	0	2,709,500	0	2,709,500	98.89 %	30,500
	000149. Konsumsi Makan	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000	100.00	0
	000515. Konsumsi Kudapan Senam	15,462,000	0	9,987,000	5,475,000	15,462,000	100.00	0
	000560. Konsumsi Makan Pos Bankum	22,500,000	0	0	22,500,000	22,500,000	100.00	0
	000561. Kantong spounbon cetak	8,500,000	0	0	8,399,000	8,399,000	98.81 %	101,000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	6,400,000	0	4,300,000	1,050,000	5,350,000	83.59 %	1,050,000
	000150. Honor Rohaniawan	800,000	0	800,000	0	800,000	100.00	0
	000516. Honor Instruktur Senam	5,600,000	0	3,500,000	1,050,000	4,550,000	81.25 %	1,050,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
	000517. Dekorasi Panggung	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
522141	Belanja Sewa	32,600,000	0	32,512,000	0	32,512,000	99.73 %	88,000
	000519. Sewa meja dan bungkus	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	100.00	0
	000520. Sewa kursi dan bungkus	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100.00	0
	000521. Mic Delegate	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	100.00	0
	000522. AC Standing	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	100.00	0
	000523. Genset	4,200,000	0	4,112,000	0	4,112,000	97.90 %	88,000
	000524. TV Monitor	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000	100.00	0
	EBC Layanan Manajemen SDM Internal	118,385,000	0	103,944,628	12,743,025	116,687,653	98.57 %	1,697,347
	EBC.001 Layanan Pengelolaan dan Pengadaan SDM	4,950,000	0	4,451,190	0	4,451,190	89.92 %	498,810
	051 Orientasi ASN Baru	4,950,000	0	4,451,190	0	4,451,190	89.92 %	498,810
	051.0A TANPA SUB KOMPONEN	4,950,000	0	4,451,190	0	4,451,190	89.92 %	498,810
521211	Belanja Bahan	4,200,000	0	3,701,190	0	3,701,190	88.12 %	498,810
	000317. Penggandaan, Penjilidan dan Pembuatan Laporan	300,000	0	0	0	0	0.00 %	300,000
	000320. Konsumsi Kudapan	2,480,000	0	2,475,000	0	2,475,000	99.80 %	5,000
	000455. Bahan Pendukung Kegiatan (ATK)	892,000	0	698,190	0	698,190	78.27 %	193,810
	000461. Air mineral 330 ml	528,000	0	528,000	0	528,000	100.00	0
522151	Belanja Jasa Profesi	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 135 **KEMENTERIAN HUKUM**

Unit Organisasi 01 **SEKRETARIAT JENDERAL**

Satuan Kerja : 692006 **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**

Hal 12 dari 18

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000321. Tenaga Pengajar Pembimbing Fisik Mental, Disiplin dan Kesamaptaan Polri	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150,000	0	150,000	0	150,000	100.00	0
000462. Transport Dokter	150,000	0	150,000	0	150,000	100.00	0
EBC.954 Layanan Manajemen SDM	113,435,000	0	99,493,438	12,743,025	112,236,463	98.94 %	1,198,537
051 Administrasi Kepegawaian	56,111,000	0	55,018,438	0	55,018,438	98.05 %	1,092,562
051.0A Koordinasi Administrasi Kepegawaian	56,111,000	0	55,018,438	0	55,018,438	98.05 %	1,092,562
521211 Belanja Bahan	2,686,000	0	2,581,600	0	2,581,600	96.11 %	104,400
000266. Konsumsi Kudapan	2,686,000	0	2,581,600	0	2,581,600	96.11 %	104,400
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	51,025,000	0	50,036,838	0	50,036,838	98.06 %	988,162
000268. Transport Darat	3,000,000	0	2,878,500	0	2,878,500	95.95 %	121,500
000269. Uang Harian	16,165,000	0	16,130,000	0	16,130,000	99.78 %	35,000
000270. Uang Penginapan Gol III	12,130,000	0	11,939,998	0	11,939,998	98.43 %	190,002
000271. Tiket Pesawat	4,750,000	0	4,724,840	0	4,724,840	99.47 %	25,160
000272. Taksi Jakarta	750,000	0	580,500	0	580,500	77.40 %	169,500
000273. Taksi Semarang	150,000	0	73,000	0	73,000	48.67 %	77,000
000275. Uang Harian	7,560,000	0	7,260,000	0	7,260,000	96.03 %	300,000
000276. Uang Penginapan Gol III	2,920,000	0	2,850,000	0	2,850,000	97.60 %	70,000
000552. Tiket Kereta	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	100.00	0
000277. Transport Dalam Kota Koordinasi ke UPT Kota Semarang dan Dinas Terkait	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	100.00	0
052 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian	57,324,000	0	44,475,000	12,743,025	57,218,025	99.82 %	105,975
052.0A Pembinaan Kepegawaian dan Bapperjkat Eselon IV /V/JP/JF	49,704,000	0	36,925,000	12,743,025	49,668,025	99.93 %	35,975
521211 Belanja Bahan	29,478,000	0	20,175,000	9,267,025	29,442,025	99.88 %	35,975
000283. Konsumsi Makan dan Kudapan	14,925,000	0	14,925,000	0	14,925,000	100.00	0
000288. Konsumsi Kudapan	2,850,000	0	2,850,000	0	2,850,000	100.00	0
000289. Bahan Pendukung Kegiatan (ATK)	3,528,000	0	0	3,527,025	3,527,025	99.97 %	975

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 135 **KEMENTERIAN HUKUM**

Unit Organisasi : 01 **SEKRETARIAT JENDERAL**

Satuan Kerja : 692006 **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**

Hal 13 dari 18

	Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000291. Konsumsi makan	35,000	0	0	0	0	0.00 %	35,000
	000292. Konsumsi Kudapan	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	100.00	0
	000554. Konsumsi Makan seminar	4,550,000	0	0	4,550,000	4,550,000	100.00	0
	000555. Konsumsi Snack seminar	1,190,000	0	0	1,190,000	1,190,000	100.00	0
522141	Belanja Sewa	15,400,000	0	15,400,000	0	15,400,000	100.00	0
	000438. Sewa Headseat	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100.00	0
	000439. Sewa Laptop	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000	100.00	0
	000443. Sewa Kamera	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,276,000	0	0	2,276,000	2,276,000	100.00	0
	000566. Uang Harian	2,220,000	0	0	2,220,000	2,220,000	100.00	0
	000567. Transport Darat	56,000	0	0	56,000	56,000	100.00	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,550,000	0	1,350,000	1,200,000	2,550,000	100.00	0
	000308. Transport Dalam Kota Koordinasi ke UPT Kota Semarang dan Dinas Terkait	2,550,000	0	1,350,000	1,200,000	2,550,000	100.00	0
052.0B	Bina Mental Pegawai	4,620,000	0	4,550,000	0	4,550,000	98.48 %	70,000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	4,620,000	0	4,550,000	0	4,550,000	98.48 %	70,000
	000310. Honor Instruktur Senam	4,620,000	0	4,550,000	0	4,550,000	98.48 %	70,000
052.0C	Penanganan Hukuman Disiplin Pegawai	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
521211	Belanja Bahan	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	100.00	0
	000314. Konsumsi Makan	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	100.00	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
	000316. Transport Dalam Kota Monitoring ke UPT Kota Semarang dan Dinas Terkait	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal		273,296,000	0	204,468,755	59,633,492	264,102,247	96.64 %	9,193,753
EBD.001 Pengelolaan Perencanaan dan Manajemen Kinerja Kantor Wilayah		112,100,000	0	69,034,382	36,613,192	105,647,574	94.24 %	6,452,426
051	Koordinasi dan Konsultasi	96,988,000	0	59,694,882	35,461,592	95,156,474	98.11 %	1,831,526
051.0A	TANPA SUB KOMPONEN	96,988,000	0	59,694,882	35,461,592	95,156,474	98.11 %	1,831,526
521211	Belanja Bahan	11,798,000	0	2,677,500	8,304,500	10,982,000	93.08 %	816,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 135 **KEMENTERIAN HUKUM**

Unit Organisasi 01 **SEKRETARIAT JENDERAL**

Satuan Kerja : 692006 **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**

Hal 14 dari 18

	Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524111	000323. Bahan Pendukung Kegiatan (Bahan Komputer)	2,000,000	0	1,882,500	0	1,882,500	94.12 %	117,500
	000324. Penggandaan, Penjilidan dan Pembuatan Laporan	6,253,000	0	75,000	6,150,000	6,225,000	99.55 %	28,000
	000325. Konsumsi Makan	1,250,000	0	0	1,225,000	1,225,000	98.00 %	25,000
	000326. Konsumsi Kudapan	2,295,000	0	720,000	929,500	1,649,500	71.87 %	645,500
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	83,990,000	0	55,967,382	27,157,092	83,124,474	98.97 %	865,526
	000329. Uang Harian	37,350,000	0	26,620,000	10,730,000	37,350,000	100.00	0
	000330. Uang Penginapan	23,300,000	0	13,621,982	9,677,992	23,299,974	100.00	26
	000332. Taksi Jakarta	2,250,000	0	672,000	1,578,000	2,250,000	100.00	0
524113	000333. Taksi Semarang	1,190,000	0	286,500	50,500	337,000	28.32 %	853,000
	000451. Transport Darat	1,420,000	0	1,407,500	0	1,407,500	99.12 %	12,500
	000452. Tiket Kereta	18,480,000	0	13,359,400	5,120,600	18,480,000	100.00	0
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,200,000	0	1,050,000	0	1,050,000	87.50 %	150,000
	000334. Transport Dalam Kota	1,200,000	0	1,050,000	0	1,050,000	87.50 %	150,000
052	Evaluasi dan Rekomendasi Kinerja Program dan Kegiatan Kantor Wilayah	13,112,000	0	8,840,000	1,151,600	9,991,600	76.20 %	3,120,400
052.0A	TANPA SUB KOMPONEN	13,112,000	0	8,840,000	1,151,600	9,991,600	76.20 %	3,120,400
521211	Belanja Bahan	3,612,000	0	840,000	1,151,600	1,991,600	55.14 %	1,620,400
	000338. Konsumsi Makan	3,000	0	0	0	0	0.00 %	3,000
	000339. Konsumsi Kudapan	2,550,000	0	840,000	1,151,600	1,991,600	78.10 %	558,400
	000441. Dekorasi Taman	1,059,000	0	0	0	0	0.00 %	1,059,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	9,500,000	0	8,000,000	0	8,000,000	84.21 %	1,500,000
	000525. Advertorial Online	9,500,000	0	8,000,000	0	8,000,000	84.21 %	1,500,000
053	Evaluasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Kantor Wilayah	2,000,000	0	499,500	0	499,500	24.98 %	1,500,500
053.0A	TANPA SUB KOMPONEN	2,000,000	0	499,500	0	499,500	24.98 %	1,500,500
521211	Belanja Bahan	2,000,000	0	499,500	0	499,500	24.98 %	1,500,500
	000340. Bahan Pendukung Kegiatan (ATK)	1,500,000	0	0	0	0	0.00 %	1,500,000
	000341. Bahan Pendukung Kegiatan (Bahan Komputer)	500,000	0	499,500	0	499,500	99.90 %	500

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 135 **KEMENTERIAN HUKUM**

Unit Organisasi 01 **SEKRETARIAT JENDERAL**

Satuan Kerja : 692006 **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**

Hal 15 dari 18

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025			SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	
EBD.002 Layanan Manajemen Kinerja Kantor Wilayah	23,350,000	0	23,306,000	0	23,306,000	99.81 % 44,000
051 Penyusunan SAKIP	18,700,000	0	18,699,500	0	18,699,500	100.00 500
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	18,700,000	0	18,699,500	0	18,699,500	100.00 500
521211 Belanja Bahan	9,200,000	0	9,199,500	0	9,199,500	99.99 % 500
000346. Bahan Pendukung Kegiatan (Bahan Komputer)	630,000	0	630,000	0	630,000	100.00 0
000347. Penggandaan, Penjilidan dan Pembuatan Laporan	6,020,000	0	6,019,500	0	6,019,500	99.99 % 500
000349. Konsumsi Kudapan	2,550,000	0	2,550,000	0	2,550,000	100.00 0
522191 Belanja Jasa Lainnya	9,500,000	0	9,500,000	0	9,500,000	100.00 0
000466. Advertorial Online	9,500,000	0	9,500,000	0	9,500,000	100.00 0
053 Penyusunan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP)	4,650,000	0	4,606,500	0	4,606,500	99.06 % 43,500
053.0A TANPA SUB KOMPONEN	4,650,000	0	4,606,500	0	4,606,500	99.06 % 43,500
521211 Belanja Bahan	4,650,000	0	4,606,500	0	4,606,500	99.06 % 43,500
000355. Bahan Pendukung Kegiatan (ATK)	1,250,000	0	1,246,500	0	1,246,500	99.72 % 3,500
000356. Bahan Pendukung Kegiatan (Bahan Komputer)	2,880,000	0	2,880,000	0	2,880,000	100.00 0
000357. Penggandaan, Penjilidan dan Pembuatan Laporan	40,000	0	0	0	0	0.00 % 40,000
000359. Konsumsi Kudapan	480,000	0	480,000	0	480,000	100.00 0
EBD.003 Koordinasi dan konsultasi Manajemen Keuangan	82,828,000	0	73,718,423	6,659,390	80,377,813	97.04 % 2,450,187
051 Koordinasi dan Konsultasi Laporan Keuangan	82,828,000	0	73,718,423	6,659,390	80,377,813	97.04 % 2,450,187
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	82,828,000	0	73,718,423	6,659,390	80,377,813	97.04 % 2,450,187
521211 Belanja Bahan	25,828,000	0	25,810,000	0	25,810,000	99.93 % 18,000
000363. Konsumsi Makan	15,950,000	0	15,950,000	0	15,950,000	100.00 0
000364. Konsumsi Kudapan	9,878,000	0	9,860,000	0	9,860,000	99.82 % 18,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	57,000,000	0	47,908,423	6,659,390	54,567,813	95.73 % 2,432,187
000366. Uang Harian	29,000,000	0	26,790,000	2,210,000	29,000,000	100.00 0
000367. Uang Penginapan Gol III	16,000,000	0	12,980,459	2,214,390	15,194,849	94.97 % 805,151
000368. Transportasi Darat	10,000,000	0	7,764,964	2,235,000	9,999,964	100.00 36
000369. Taksi Jakarta	1,000,000	0	292,000	0	292,000	29.20 % 708,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 135 **KEMENTERIAN HUKUM**

Unit Organisasi 01 **SEKRETARIAT JENDERAL**

Satuan Kerja : 692006 **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**

Hal 16 dari 18

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000370. Taksi Semarang	1,000,000	0	81,000	0	81,000	8.10 %	919,000
EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4,600,000	0	676,000	3,800,000	4,476,000	97.30 %	124,000
051 Penyusunan Renstra Kantor Wilayah	3,896,000	0	0	3,800,000	3,800,000	97.54 %	96,000
051.0A Penyusunan Renstra Kantor Wilayah	3,896,000	0	0	3,800,000	3,800,000	97.54 %	96,000
521211 Belanja Bahan	3,896,000	0	0	3,800,000	3,800,000	97.54 %	96,000
000421. Penggandaan, Penjilidan dan Pembuatan Laporan	3,896,000	0	0	3,800,000	3,800,000	97.54 %	96,000
052 Penyusunan RKA-K/L Kantor Wilayah	704,000	0	676,000	0	676,000	96.02 %	28,000
052.0A Penyusunan RKA-K/L Kantor Wilayah	704,000	0	676,000	0	676,000	96.02 %	28,000
521211 Belanja Bahan	704,000	0	676,000	0	676,000	96.02 %	28,000
000429. Konsumsi Kudapan	704,000	0	676,000	0	676,000	96.02 %	28,000
EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	10,502,000	0	6,107,200	4,388,240	10,495,440	99.94 %	6,560
051 Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Kantor Wilayah	7,192,000	0	2,797,200	4,388,240	7,185,440	99.91 %	6,560
051.0A Penyusunan Laporan Keuangan	7,192,000	0	2,797,200	4,388,240	7,185,440	99.91 %	6,560
521211 Belanja Bahan	7,192,000	0	2,797,200	4,388,240	7,185,440	99.91 %	6,560
000384. Bahan Pendukung Kegiatan (ATK)	7,192,000	0	2,797,200	4,388,240	7,185,440	99.91 %	6,560
052 Penyusunan Laporan Keuangan Semester 2 Kantor Wilayah	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000	100.00	0
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000	100.00	0
000391. Transport Dalam Kota	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000	100.00	0
054 Tindak Lanjut Temuan BPK dan Inspektorat Jenderal	1,960,000	0	1,960,000	0	1,960,000	100.00	0
054.0A TANPA SUB KOMPONEN	1,960,000	0	1,960,000	0	1,960,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	1,360,000	0	1,360,000	0	1,360,000	100.00	0
000398. Konsumsi Kudapan	1,360,000	0	1,360,000	0	1,360,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
000399. Transport Dalam Kota	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja	36,410,000	0	31,326,750	4,970,025	36,296,775	99.69 %	113,225
051 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	2,491,000	0	0	2,486,400	2,486,400	99.82 %	4,600

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 135 **KEMENTERIAN HUKUM**

Unit Organisasi 01 **SEKRETARIAT JENDERAL**

Satuan Kerja : 692006 **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**

Hal 17 dari 18

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	2,491,000	0	0	2,486,400	2,486,400	99.82 %	4,600
521211 Belanja Bahan	2,491,000	0	0	2,486,400	2,486,400	99.82 %	4,600
000400. Bahan Pendukung Kegiatan (ATK)	2,491,000	0	0	2,486,400	2,486,400	99.82 %	4,600
052 Pembentukan Satker WBK/WBBM	30,739,000	0	30,648,250	0	30,648,250	99.70 %	90,750
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	30,739,000	0	30,648,250	0	30,648,250	99.70 %	90,750
521211 Belanja Bahan	7,207,000	0	7,206,750	0	7,206,750	100.00	250
000456. Penggandaan, Penjilidan dan Pembuatan Laporan	7,207,000	0	7,206,750	0	7,206,750	100.00	250
522141 Belanja Sewa	11,322,000	0	11,322,000	0	11,322,000	100.00	0
000458. Genset	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
000459. AC	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	100.00	0
000460. Dekorasi Taman	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
000539. Sewa Televisi	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
000540. Sewa Taman	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	100.00	0
000541. Sewa Kain Kursi	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
000542. Sewa Kain Meja	522,000	0	522,000	0	522,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12,210,000	0	12,119,500	0	12,119,500	99.26 %	90,500
000407. Uang Harian	7,070,000	0	6,990,000	0	6,990,000	98.87 %	80,000
000408. Uang Penginapan Gol III	3,288,000	0	3,280,000	0	3,280,000	99.76 %	8,000
000409. Tiket Pesawat	1,224,000	0	1,222,000	0	1,222,000	99.84 %	2,000
000410. Taksi Jakarta	146,000	0	145,500	0	145,500	99.66 %	500
000411. Taksi Semarang	91,000	0	91,000	0	91,000	100.00	0
000526. Transport Darat	391,000	0	391,000	0	391,000	100.00	0
053 Pembangunan Budaya Anti Korupsi dan Unit Pemberantasan Pungli dan Gratifikasi	3,180,000	0	678,500	2,483,625	3,162,125	99.44 %	17,875
053.0A TANPA SUB KOMPONEN	3,180,000	0	678,500	2,483,625	3,162,125	99.44 %	17,875
521211 Belanja Bahan	3,180,000	0	678,500	2,483,625	3,162,125	99.44 %	17,875
000416. Konsumsi Kudapan	680,000	0	678,500	0	678,500	99.78 %	1,500

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 135 **KEMENTERIAN HUKUM**

Unit Organisasi 01 **SEKRETARIAT JENDERAL**

Satuan Kerja : 692006 **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**

Hal 18 dari 18

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000543. Bahan Pendukung Kegiatan (ATK)	2,500,000	0	0	2,483,625	2,483,625	99.34 %	16,375
EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	3,506,000	0	300,000	3,202,645	3,502,645	99.90 %	3,355
052 Pengawasan dan Pemusnahan Kearsipan	3,506,000	0	300,000	3,202,645	3,502,645	99.90 %	3,355
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	3,506,000	0	300,000	3,202,645	3,502,645	99.90 %	3,355
521211 Belanja Bahan	3,206,000	0	0	3,202,645	3,202,645	99.90 %	3,355
000568. Bahan Pendukung Kegiatan (ATK)	2,356,000	0	0	2,352,645	2,352,645	99.86 %	3,355
000569. Konsumsi Snack	850,000	0	0	850,000	850,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
000383. Transport Dalam Kota	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 135 **KEMENTERIAN HUKUM**

Unit Organisasi : 04 **DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Satuan Kerja : 692046 **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**

Hal 1 dari 6

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	2,270,828,000	0	1,612,137,683	658,660,886	2,270,798,569	100.00 %	29,431
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	2,270,828,000	0	1,612,137,683	658,660,886	2,270,798,569	100.00	29,431
BF.7110 Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	2,270,828,000	0	1,612,137,683	658,660,886	2,270,798,569	100.00	29,431
BAH Pelayanan Publik Lainnya	985,680,000	0	539,559,058	446,114,476	985,673,534	100.00	6,466
BAH.001 Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	985,680,000	0	539,559,058	446,114,476	985,673,534	100.00	6,466
051 Layanan Kewarganegaraan	63,722,000	0	44,585,010	19,135,990	63,721,000	100.00	1,000
051.0A Pengambilan Sumpah Kewarganegaraan	29,164,000	0	27,035,010	2,128,990	29,164,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	29,164,000	0	27,035,010	2,128,990	29,164,000	100.00	0
000040. Kudapan	4,697,000	0	4,690,000	7,000	4,697,000	100.00	0
000041. ATK	10,247,000	0	8,125,010	2,121,990	10,247,000	100.00	0
000042. Tinta Printer	3,470,000	0	3,470,000	0	3,470,000	100.00	0
000394. Makan	10,750,000	0	10,750,000	0	10,750,000	100.00	0
051.0B Layanan Kewarganegaraan	34,558,000	0	17,550,000	17,007,000	34,557,000	100.00	1,000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	12,300,000	0	9,900,000	2,400,000	12,300,000	100.00	0
000051. Ketua	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
000052. Wakil Ketua	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
000053. Anggota	9,600,000	0	7,200,000	2,400,000	9,600,000	100.00	0
522141 Belanja Sewa	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000393. Sewa Kendaraan Insidentil Roda 4 (Layanan Kewarganegaraan)	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22,257,000	0	7,650,000	14,607,000	22,257,000	100.00	0
000055. Transport Antar Kab/Kota (Semarang - Cilacap)	1,764,000	0	1,090,000	674,000	1,764,000	100.00	0
000056. Uang Harian	8,160,000	0	3,460,000	4,700,000	8,160,000	100.00	0
000057. Biaya Penginapan Eselon II	3,900,000	0	1,000,000	2,900,000	3,900,000	100.00	0
000058. Biaya Penginapan Eselon III/Gol. IV	1,900,000	0	0	1,900,000	1,900,000	100.00	0
000059. Biaya Penginapan Eselon IV/Gol. III	5,783,000	0	1,800,000	3,983,000	5,783,000	100.00	0
000060. Uang Representasi Eselon II	750,000	0	300,000	450,000	750,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 135 **KEMENTERIAN HUKUM**

Unit Organisasi 04 **DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Satuan Kerja : 692046 **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**

Hal 2 dari 6

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
053 Pelantikan Notaris	55,041,000	0	55,035,975	4,000	55,039,975	100.00	1,025
053.0A Tanpa Sub Komponen	55,041,000	0	55,035,975	4,000	55,039,975	100.00	1,025
521211 Belanja Bahan	30,441,000	0	30,435,975	4,000	30,439,975	100.00	1,025
000070. Makan	13,120,000	0	13,120,000	0	13,120,000	100.00	0
000071. Kudapan	11,856,000	0	11,852,000	4,000	11,856,000	100.00	0
000072. ATK	3,994,000	0	3,993,225	0	3,993,225	99.98 %	775
000073. Tinta Printer	1,471,000	0	1,470,750	0	1,470,750	99.98 %	250
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000	100.00	0
000074. Rohaniawan	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000	100.00	0
522141 Belanja Sewa	19,800,000	0	19,800,000	0	19,800,000	100.00	0
000395. Sewa Ganset	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	100.00	0
000396. Sewa AC	6,400,000	0	6,400,000	0	6,400,000	100.00	0
000397. TV	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
000398. Misty Fan	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000	100.00	0
000399. Tenda Plafon	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	100.00	0
054 Layanan AHU Lainnya	140,083,000	0	33,256,640	106,826,290	140,082,930	100.00	70
054.0A Layanan AHU Lainnya	84,482,000	0	33,256,640	51,225,290	84,481,930	100.00	70
521211 Belanja Bahan	18,230,000	0	6,265,330	11,964,600	18,229,930	100.00	70
000077. Makan	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	100.00	0
000078. Kudapan	5,115,000	0	656,500	4,458,500	5,115,000	100.00	0
000079. ATK	5,628,000	0	3,627,480	2,000,500	5,627,980	100.00	20
000080. Tinta Printer	4,487,000	0	1,981,350	2,505,600	4,486,950	100.00	50
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	64,002,000	0	24,741,310	39,260,690	64,002,000	100.00	0
000083. Transport Antar Kab/Kota (Semarang - Cilacap)	10,190,000	0	4,191,310	5,998,690	10,190,000	100.00	0
000084. Uang Harian	39,795,000	0	13,850,000	25,945,000	39,795,000	100.00	0
000085. Biaya Penginapan Eselon II	3,425,000	0	1,800,000	1,625,000	3,425,000	100.00	0
000086. Biaya Penginapan Eselon III/Gol. IV	740,000	0	0	740,000	740,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 135 **KEMENTERIAN HUKUM**

Unit Organisasi : 04 **DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Satuan Kerja : 692046 **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**

Hal 3 dari 6

	Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000087. Biaya Penginapan Eselon IV/Gol. III	7,752,000	0	4,000,000	3,752,000	7,752,000	100.00	0
	000088. Uang Representasi Eselon II	2,100,000	0	900,000	1,200,000	2,100,000	100.00	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,250,000	0	2,250,000	0	2,250,000	100.00	0
	000089. Transport Lokal	2,250,000	0	2,250,000	0	2,250,000	100.00	0
054.0B	Pengawasan Kepatuhan Penerapan PMPJ	55,601,000	0	0	55,601,000	55,601,000	100.00	0
521211	Belanja Bahan	3,097,000	0	0	3,097,000	3,097,000	100.00	0
	000090. Penggandaan	600,000	0	0	600,000	600,000	100.00	0
522141	000091. Penjilidan	600,000	0	0	600,000	600,000	100.00	0
	000092. ATK	1,509,000	0	0	1,509,000	1,509,000	100.00	0
524111	000093. Tinta Printer	388,000	0	0	388,000	388,000	100.00	0
	Belanja Sewa	800,000	0	0	800,000	800,000	100.00	0
	000094. Sewa Kendaraan Insidentil Roda 4 (Audit PMPJ)	800,000	0	0	800,000	800,000	100.00	0
	000096. Transport Antar Kab/Kota (Semarang - Cilacap)	5,413,000	0	0	5,413,000	5,413,000	100.00	0
524113	000097. Uang Harian	29,684,000	0	0	29,684,000	29,684,000	100.00	0
	000098. Biaya Penginapan Eselon II	2,612,000	0	0	2,612,000	2,612,000	100.00	0
057	000099. Biaya Penginapan Eselon III/Gol. IV	1,845,000	0	0	1,845,000	1,845,000	100.00	0
	000100. Biaya Penginapan Eselon IV/Gol. III	8,400,000	0	0	8,400,000	8,400,000	100.00	0
521211	000101. Uang Representasi Eselon II	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	100.00	0
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,250,000	0	0	2,250,000	2,250,000	100.00	0
	000102. Transport Lokal	2,250,000	0	0	2,250,000	2,250,000	100.00	0
	Publikasi, Pameran dan Helpdesk	352,846,000	0	268,517,500	84,324,129	352,841,629	100.00	4,371
057.0A	Publikasi dan Pameran	90,661,000	0	54,002,500	36,654,129	90,656,629	100.00	4,371
521211	Belanja Bahan	5,659,000	0	0	5,659,000	5,659,000	100.00	0
	000259. Leaflet/Poster/Spanduk/Brosur	5,659,000	0	0	5,659,000	5,659,000	100.00	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	17,212,000	0	13,212,500	3,996,000	17,208,500	99.98 %	3,500
	000263. Biaya Siaran pada Media Elektronik	17,212,000	0	13,212,500	3,996,000	17,208,500	99.98 %	3,500

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 135 **KEMENTERIAN HUKUM**

Unit Organisasi 04 **DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Satuan Kerja : 692046 **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**

Hal 4 dari 6

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
522191 Belanja Jasa Lainnya	40,790,000	0	40,790,000	0	40,790,000	100.00	0
000269. Perlengkapan Pelaksanaan Publikasi Berupa Pameran	40,790,000	0	40,790,000	0	40,790,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	27,000,000	0	0	26,999,129	26,999,129	100.00	871
000276. Transport Lokal	27,000,000	0	0	26,999,129	26,999,129	100.00	871
057.0B Helpdesk Layanan AHU	262,185,000	0	214,515,000	47,670,000	262,185,000	100.00	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	262,185,000	0	214,515,000	47,670,000	262,185,000	100.00	0
000277. Jasa Penyelenggaraan Helpdesk Layanan AHU	262,185,000	0	214,515,000	47,670,000	262,185,000	100.00	0
058 Koordinasi	373,988,000	0	138,163,933	235,824,067	373,988,000	100.00	0
058.0A Koordinasi Dengan Instansi Terkait	144,711,000	0	43,383,854	101,327,146	144,711,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	2,650,000	0	0	2,650,000	2,650,000	100.00	0
000282. ATK	1,150,000	0	0	1,150,000	1,150,000	100.00	0
000283. Tinta Printer	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	142,061,000	0	43,383,854	98,677,146	142,061,000	100.00	0
000284. Transport Antar Kab/Kota (Semarang - Cilacap)	26,250,000	0	9,572,000	16,678,000	26,250,000	100.00	0
000285. Uang Harian	77,700,000	0	24,420,000	53,280,000	77,700,000	100.00	0
000286. Biaya Penginapan Eselon II	2,211,000	0	734,174	1,476,826	2,211,000	100.00	0
000287. Biaya Penginapan Eselon III/Gol. IV	1,400,000	0	450,000	950,000	1,400,000	100.00	0
000288. Biaya Penginapan Eselon IV/Gol. III	31,500,000	0	6,707,680	24,792,320	31,500,000	100.00	0
000289. Uang Representasi Eselon II	3,000,000	0	1,500,000	1,500,000	3,000,000	100.00	0
058.0B Koordinasi Dengan Unit Pusat	229,277,000	0	94,780,079	134,496,921	229,277,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	229,277,000	0	94,780,079	134,496,921	229,277,000	100.00	0
000290. Tiket	71,190,000	0	30,175,932	41,014,068	71,190,000	100.00	0
000291. Biaya Taksi Semarang PP	2,160,000	0	1,350,000	810,000	2,160,000	100.00	0
000292. Biaya Taksi Jakarta PP	6,000,000	0	2,000,000	4,000,000	6,000,000	100.00	0
000293. Uang Harian (DKI Jakarta)	90,000,000	0	36,890,000	53,110,000	90,000,000	100.00	0
000294. Biaya Penginapan Eselon II	2,400,000	0	1,030,000	1,370,000	2,400,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 135 **KEMENTERIAN HUKUM**

Unit Organisasi 04 **DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Satuan Kerja : 692046 **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**

Hal 5 dari 6

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000295. Biaya Penginapan Eselon III/Gol. IV	3,427,000	0	1,713,001	1,713,999	3,427,000	100.00	0
000296. Biaya Penginapan Eselon IV/Gol. III	51,100,000	0	19,221,146	31,878,854	51,100,000	100.00	0
000297. Uang Representasi Eselon II	3,000,000	0	2,400,000	600,000	3,000,000	100.00	0
BCB Perkara Hukum Lembaga	1,448,000	0	1,448,000	0	1,448,000	100.00	0
BCB.001 Penanganan Perkara terkait Produk Layanan AHU di Wilayah	1,448,000	0	1,448,000	0	1,448,000	100.00	0
051 Advokasi Perkara terkait Produk Layanan AHU di Wilayah	1,448,000	0	1,448,000	0	1,448,000	100.00	0
051.0A Advokasi	1,448,000	0	1,448,000	0	1,448,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,448,000	0	1,448,000	0	1,448,000	100.00	0
000299. Transport Antar Kab/Kota (Semarang - Cilacap)	338,000	0	338,000	0	338,000	100.00	0
000300. Uang Harian	1,110,000	0	1,110,000	0	1,110,000	100.00	0
BIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1,283,700,000	0	1,071,130,625	212,546,410	1,283,677,035	100.00	22,965
BIC.001 Pengawasan Kenotariatan oleh Majelis Pengawas di Wilayah	1,283,700,000	0	1,071,130,625	212,546,410	1,283,677,035	100.00	22,965
051 Dukungan Kesekretariatan dan Pengawasan MPW	53,520,000	0	44,600,000	8,920,000	53,520,000	100.00	0
051.0A Pembinaan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Kenotariatan pada MPW	53,520,000	0	44,600,000	8,920,000	53,520,000	100.00	0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	53,520,000	0	44,600,000	8,920,000	53,520,000	100.00	0
000309. Ketua	8,160,000	0	6,800,000	1,360,000	8,160,000	100.00	0
000310. Wakil Ketua	10,440,000	0	8,700,000	1,740,000	10,440,000	100.00	0
000311. Anggota	27,720,000	0	23,100,000	4,620,000	27,720,000	100.00	0
000313. Sekretaris	2,250,000	0	1,950,000	300,000	2,250,000	100.00	0
000314. Anggota	4,950,000	0	4,050,000	900,000	4,950,000	100.00	0
052 Dukungan Kesekretariatan dan Pengawasan MPD	1,217,158,000	0	1,019,930,625	197,226,410	1,217,157,035	100.00	965
052.0A Pembinaan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Kenotariatan pada MPD	1,175,498,000	0	978,570,625	196,926,410	1,175,497,035	100.00	965
521211 Belanja Bahan	17,663,000	0	13,745,625	3,916,410	17,662,035	99.99 %	965
000360. ATK dan Komputer Supplies	17,663,000	0	13,745,625	3,916,410	17,662,035	99.99 %	965
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	1,157,835,000	0	964,825,000	193,010,000	1,157,835,000	100.00	0
000362. Ketua	154,560,000	0	128,800,000	25,760,000	154,560,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 135 **KEMENTERIAN HUKUM**

Unit Organisasi : 04 **DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Satuan Kerja : 692046 **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**

Hal 6 dari 6

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000363. Wakil Ketua	248,250,000	0	207,000,000	41,250,000	248,250,000	100.00	0
000364. Anggota	654,225,000	0	545,025,000	109,200,000	654,225,000	100.00	0
000366. Sekretaris	50,400,000	0	42,000,000	8,400,000	50,400,000	100.00	0
000367. Anggota	50,400,000	0	42,000,000	8,400,000	50,400,000	100.00	0
052.0B Pelantikan MPD	41,660,000	0	41,360,000	300,000	41,660,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	35,360,000	0	35,360,000	0	35,360,000	100.00	0
000374. Makan	26,400,000	0	26,400,000	0	26,400,000	100.00	0
000375. Kudapan	8,960,000	0	8,960,000	0	8,960,000	100.00	0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	6,300,000	0	6,000,000	300,000	6,300,000	100.00	0
000376. Rohaniawan	6,300,000	0	6,000,000	300,000	6,300,000	100.00	0
053 Dukungan Kesekretariatan dan Pengawasan MKNW	13,022,000	0	6,600,000	6,400,000	13,000,000	99.83 %	22,000
053.0A Penanganan permasalahan kenotariatan pada MKNW	13,022,000	0	6,600,000	6,400,000	13,000,000	99.83 %	22,000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	13,022,000	0	6,600,000	6,400,000	13,000,000	99.83 %	22,000
000380. Ketua	2,212,000	0	1,000,000	1,200,000	2,200,000	99.46 %	12,000
000381. Wakil Ketua	1,810,000	0	800,000	1,000,000	1,800,000	99.45 %	10,000
000382. Anggota	7,200,000	0	3,600,000	3,600,000	7,200,000	100.00	0
000384. Sekretaris	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
000385. Anggota	1,200,000	0	600,000	600,000	1,200,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 135 **KEMENTERIAN HUKUM**

Unit Organisasi 05 **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Satuan Kerja : 692993 **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**

Hal 1 dari 5

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	923,825,000	0	625,187,208	297,321,902	922,509,110	99.86 %	1,315,890
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	923,825,000	0	625,187,208	297,321,902	922,509,110	99.86 %	1,315,890
BF.7121 Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	923,825,000	0	625,187,208	297,321,902	922,509,110	99.86 %	1,315,890
BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	786,005,000	0	487,575,516	297,321,902	784,897,418	99.86 %	1,107,582
BDC.001 Diseminasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual di Wilayah	347,527,000	0	272,139,108	75,246,275	347,385,383	99.96 %	141,617
052 Pelaksanaan Diseminasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual di Wilayah	347,527,000	0	272,139,108	75,246,275	347,385,383	99.96 %	141,617
052.0A Diseminasi Desain Industri	22,012,000	0	22,011,165	0	22,011,165	100.00	835
521211 Belanja Bahan	8,574,000	0	8,573,665	0	8,573,665	100.00	335
000263. Backdrop/Spanduk/Banner	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100.00	0
000264. Konsumsi Makan	3,375,000	0	3,375,000	0	3,375,000	100.00	0
000265. Konsumsi Kudapan	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
000266. ATK	2,999,000	0	2,998,665	0	2,998,665	99.99 %	335
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13,438,000	0	13,437,500	0	13,437,500	100.00	500
000009. Uang Harian	7,160,000	0	7,160,000	0	7,160,000	100.00	0
000014. Transportasi Darat Antar Kabupaten (Kota Semarang - Kab. Cilacap)	500,000	0	500,000	0	500,000	100.00	0
000295. Biaya Penginapan Eselon III/Gol. IV	876,000	0	876,000	0	876,000	100.00	0
000296. Biaya Penginapan Eselon IV/Gol. III	2,794,000	0	2,794,000	0	2,794,000	100.00	0
000297. Transportasi Darat Antar Kabupaten (Kota Semarang - Kab. Cilacap)	2,108,000	0	2,107,500	0	2,107,500	99.98 %	500
052.0B Diseminasi Kekayaan Intelektual	80,803,000	0	80,801,443	0	80,801,443	100.00	1,557
521211 Belanja Bahan	43,086,000	0	43,085,170	0	43,085,170	100.00	830
000271. Konsumsi Makan	28,286,000	0	28,286,000	0	28,286,000	100.00	0
000272. Konsumsi Kudapan	12,305,000	0	12,305,000	0	12,305,000	100.00	0
000273. ATK	2,495,000	0	2,494,170	0	2,494,170	99.97 %	830
522151 Belanja Jasa Profesi	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000	100.00	0
000050. Honorarium Narasumber Eselon II Eksternal	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000	100.00	0
000293. Honorarium Moderator Eksternal	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 135 **KEMENTERIAN HUKUM**

Unit Organisasi 05 **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Satuan Kerja : 692993 **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**

Hal 2 dari 5

	Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28,567,000	0	28,566,273	0	28,566,273	100.00	727
	000052. Uang Harian	11,970,000	0	11,970,000	0	11,970,000	100.00	0
	000053. Biaya Penginapan Eselon II	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000	100.00	0
	000054. Biaya Penginapan Eselon III/Gol. IV	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000	100.00	0
	000056. Uang Representasi Eselon II	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
	000274. Biaya Penginapan Eselon IV/Gol. III	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
	000275. Transportasi Darat Antar Kabupaten (Kota Semarang - Kota Surakarta)	5,451,000	0	5,450,724	0	5,450,724	99.99 %	276
	000289. Uang Harian Narasumber Internal Eselon II	1,110,000	0	1,110,000	0	1,110,000	100.00	0
	000290. Biaya Penginapan Narasumber Eksternal Eselon II (Sebelum Kegiatan)	1,620,000	0	1,620,000	0	1,620,000	100.00	0
	000291. Tiket Pesawat (PP)	1,826,000	0	1,825,549	0	1,825,549	99.98 %	451
	000292. Taksi Jakarta (PP)	90,000	0	90,000	0	90,000	100.00	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,650,000	0	1,650,000	0	1,650,000	100.00	0
	000287. Transport Lokal	1,650,000	0	1,650,000	0	1,650,000	100.00	0
052.0C	Pelaksanaan Agenda RuKI (Guru Kekayaan Intelektual)	7,700,000	0	0	7,700,000	7,700,000	100.00	0
521211	Belanja Bahan	7,700,000	0	0	7,700,000	7,700,000	100.00	0
	000090. Konsumsi Kudapan	1,700,000	0	0	1,700,000	1,700,000	100.00	0
	000091. Backdrop/Spanduk/Banner/Leaflet	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	100.00	0
	000092. Goodie Bag/Seminar Kit	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	100.00	0
052.0D	Penyebarluasan Informasi Kekayaan Intelektual	237,012,000	0	169,326,500	67,546,275	236,872,775	99.94 %	139,225
522141	Belanja Sewa	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000	100.00	0
	000281. Sewa Sewa Booth dan Perlengkapan Pameran	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000	100.00	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	223,012,000	0	155,326,500	67,546,275	222,872,775	99.94 %	139,225
	000100. Jasa Penyelenggara Kegiatan Sosialisasi (Peresmian Posbankum, Paralegal dan Menteri Hukum Goes to Campuss serta Pameran Hukum Laya	212,685,000	0	145,000,000	67,546,275	212,546,275	99.93 %	138,725
	000282. Talkshow di Media Radio dan Televisi	10,327,000	0	10,326,500	0	10,326,500	100.00	500
BDC.002	Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah	438,478,000	0	215,436,408	222,075,627	437,512,035	99.78 %	965,965

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 135 **KEMENTERIAN HUKUM**

Unit Organisasi 05 **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Satuan Kerja : 692993 **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**

Hal 3 dari 5

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
051 Pendampingan Pengajuan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	438,478,000	0	215,436,408	222,075,627	437,512,035	99.78 %	965,965
051.0A Koordinasi Layanan Kekayaan Intelektual	303,238,000	0	99,446,473	203,007,627	302,454,100	99.74 %	783,900
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	303,238,000	0	99,446,473	203,007,627	302,454,100	99.74 %	783,900
000125. Biaya Penginapan Eselon II	4,520,000	0	1,425,200	3,094,500	4,519,700	99.99 %	300
000126. Biaya Penginapan Eselon III/Gol. IV	9,814,000	0	0	9,798,752	9,798,752	99.84 %	15,248
000127. Biaya Penginapan Eselon IV/Gol. III	26,012,000	0	930,600	25,081,400	26,012,000	100.00	0
000128. Tiket Semarang - Jakarta (PP)	55,127,000	0	12,648,000	42,479,000	55,127,000	100.00	0
000129. Taksi Jakarta (PP)	4,386,000	0	1,185,420	3,148,958	4,334,378	98.82 %	51,622
000130. Taksi Semarang (PP)	926,000	0	158,000	730,000	888,000	95.90 %	38,000
000131. Uang Representasi Eselon II	3,150,000	0	1,800,000	1,350,000	3,150,000	100.00	0
000132. Uang Harian	68,550,000	0	38,300,000	30,250,000	68,550,000	100.00	0
000133. Biaya Penginapan Eselon II	7,795,000	0	4,499,753	3,239,000	7,738,753	99.28 %	56,247
000134. Biaya Penginapan Eselon III/Gol. IV	5,568,000	0	4,890,000	400,000	5,290,000	95.01 %	278,000
000135. Biaya Penginapan Eselon IV/Gol. III	20,810,000	0	9,709,500	10,892,342	20,601,842	99.00 %	208,158
000136. Uang Representasi Eselon II	750,000	0	450,000	300,000	750,000	100.00	0
000137. Transportasi Darat Antar Kabupaten (Kota Semarang - Kota Tegal)	19,530,000	0	9,200,000	10,203,675	19,403,675	99.35 %	126,325
000139. Uang Harian DKI Jakarta	76,300,000	0	14,250,000	62,040,000	76,290,000	99.99 %	10,000
051.0B Pendampingan Pengajuan Permohonan Kekayaan Intelektual	135,240,000	0	115,989,935	19,068,000	135,057,935	99.87 %	182,065
521211 Belanja Bahan	7,515,000	0	7,390,935	0	7,390,935	98.35 %	124,065
000143. Backdrop/Spanduk/Banner	3,695,000	0	3,694,080	0	3,694,080	99.98 %	920
000284. ATK	3,820,000	0	3,696,855	0	3,696,855	96.78 %	123,145
522191 Belanja Jasa Lainnya	124,000,000	0	104,874,000	19,068,000	123,942,000	99.95 %	58,000
000150. Layanan Helpdesk Pelayanan Publik	124,000,000	0	104,874,000	19,068,000	123,942,000	99.95 %	58,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,725,000	0	3,725,000	0	3,725,000	100.00	0
000159. Uang Harian	2,220,000	0	2,220,000	0	2,220,000	100.00	0
000164. Transportasi Darat Antar Kabupaten (Kota Semarang - Kab. Rembang)	1,505,000	0	1,505,000	0	1,505,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 135 **KEMENTERIAN HUKUM**

Unit Organisasi 05 **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Satuan Kerja : 692993 **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**

Hal 4 dari 5

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025			SISA ANGGARAN	
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode		
BKB Pemantauan produk	137,820,000	0	137,611,692	0	137,611,692	99.85 %	208,308
BKB.001 Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah	137,820,000	0	137,611,692	0	137,611,692	99.85 %	208,308
051 Pengawasan Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah	38,154,000	0	37,948,830	0	37,948,830	99.46 %	205,170
051.0A Tanpa Sub Komponen	38,154,000	0	37,948,830	0	37,948,830	99.46 %	205,170
521211 Belanja Bahan	6,546,000	0	6,353,085	0	6,353,085	97.05 %	192,915
000294. ATK	3,267,000	0	3,074,145	0	3,074,145	94.10 %	192,855
000298. Backdrop/Spanduk/Banner/Leaflet	3,279,000	0	3,278,940	0	3,278,940	100.00	60
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31,608,000	0	31,595,745	0	31,595,745	99.96 %	12,255
000212. Uang Harian	18,140,000	0	18,140,000	0	18,140,000	100.00	0
000215. Biaya Penginapan Eselon IV/III	7,012,000	0	7,011,193	0	7,011,193	99.99 %	807
000216. Uang Representasi Eselon II	450,000	0	450,000	0	450,000	100.00	0
000217. Transportasi Darat Antar Kabupaten (Kota Semarang - Kota Magelang)	6,006,000	0	5,994,552	0	5,994,552	99.81 %	11,448
052 Pendampingan Penanganan Aduan/Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	99,666,000	0	99,662,862	0	99,662,862	100.00	3,138
052.0A Tanpa Sub Komponen	99,666,000	0	99,662,862	0	99,662,862	100.00	3,138
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	99,666,000	0	99,662,862	0	99,662,862	100.00	3,138
000227. Biaya Penginapan Eselon II	1,280,000	0	1,279,253	0	1,279,253	99.94 %	747
000229. Biaya Penginapan Eselon IV/III	676,000	0	675,048	0	675,048	99.86 %	952
000230. Tiket Semarang - Jakarta (PP)	7,584,000	0	7,583,246	0	7,583,246	99.99 %	754
000231. Taksi Jakarta (PP)	974,000	0	974,000	0	974,000	100.00	0
000233. Uang Representasi Eselon II	750,000	0	750,000	0	750,000	100.00	0
000234. Uang Harian	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000	100.00	0
000235. Biaya Penginapan Eselon II	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	100.00	0
000236. Biaya Penginapan Eselon III/Gol. IV	6,650,000	0	6,650,000	0	6,650,000	100.00	0
000237. Biaya Penginapan Eselon IV/III	15,090,000	0	15,089,841	0	15,089,841	100.00	159
000238. Uang Representasi Eselon II	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
000239. Transportasi Darat Antar Kabupaten (Kota Semarang - Kab. Wonosobo)	14,752,000	0	14,751,474	0	14,751,474	100.00	526

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 135 KEMENTERIAN HUKUM

Unit Organisasi 05 DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Satuan Kerja : 692993 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

Hal 5 dari 5

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025			SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	
000241. Uang Harian DKI Jakarta	14,310,000	0	14,310,000	0	14,310,000	100.00
						0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 135 **KEMENTERIAN HUKUM**

Unit Organisasi : 03 **DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Satuan Kerja : 693026 **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**

Hal 1 dari 5

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	196,040,000	0	156,840,696	37,002,405	193,843,101	98.88 %	2,196,899
BB Program Pembentukan Regulasi	196,040,000	0	156,840,696	37,002,405	193,843,101	98.88 %	2,196,899
BB.7129 Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	196,040,000	0	156,840,696	37,002,405	193,843,101	98.88 %	2,196,899
ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	139,399,000	0	133,214,166	4,091,115	137,305,281	98.50 %	2,093,719
ABD.001 Rekomendasi Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah	139,399,000	0	133,214,166	4,091,115	137,305,281	98.50 %	2,093,719
051 Persiapan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah	4,000	0	0	0	0	0.00 %	4,000
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	4,000	0	0	0	0	0.00 %	4,000
521211 Belanja Bahan	4,000	0	0	0	0	0.00 %	4,000
000002. ATK	4,000	0	0	0	0	0.00 %	4,000
052 Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah	108,717,000	0	102,543,286	4,091,115	106,634,401	98.08 %	2,082,599
052.0B Pelaksanaan Harmonisasi	108,717,000	0	102,543,286	4,091,115	106,634,401	98.08 %	2,082,599
521211 Belanja Bahan	10,576,000	0	6,454,100	4,091,115	10,545,215	99.71 %	30,785
000012. Kudapan Rapat Harmonisasi Raperda	4,549,000	0	3,199,600	1,320,000	4,519,600	99.35 %	29,400
000013. Makan Rapat Harmonisasi Raperda	3,255,000	0	3,254,500	0	3,254,500	99.98 %	500
000409. ATK	2,772,000	0	0	2,771,115	2,771,115	99.97 %	885
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	98,141,000	0	96,089,186	0	96,089,186	97.91 %	2,051,814
000026. Uang Harian	1,480,000	0	1,480,000	0	1,480,000	100.00	0
000029. Uang Harian	1,480,000	0	1,480,000	0	1,480,000	100.00	0
000030. Biaya Transportasi	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
000032. Uang Harian	1,480,000	0	1,480,000	0	1,480,000	100.00	0
000033. Biaya Transportasi	1,161,000	0	1,161,000	0	1,161,000	100.00	0
000037. Uang Penginapan Eselon IV	860,000	0	860,000	0	860,000	100.00	0
000048. Biaya Transportasi	800,000	0	800,000	0	800,000	100.00	0
000049. Uang Harian	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
000052. Uang Harian	1,480,000	0	1,480,000	0	1,480,000	100.00	0
000053. Uang Penginapan Eselon IV	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 135 **KEMENTERIAN HUKUM**

Unit Organisasi : 03 **DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Satuan Kerja : 693026 **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**

Hal 2 dari 5

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000054. Biaya Transportasi	800,000	0	800,000	0	800,000	100.00	0
000056. Uang Harian	1,480,000	0	1,480,000	0	1,480,000	100.00	0
000058. Uang Penginapan Eselon IV	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
000059. Biaya Transportasi	800,000	0	800,000	0	800,000	100.00	0
000061. Uang Harian	1,480,000	0	1,480,000	0	1,480,000	100.00	0
000062. Uang Penginapan Eselon IV	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
000063. Biaya Transportasi	800,000	0	800,000	0	800,000	100.00	0
000065. Uang Harian	1,480,000	0	1,480,000	0	1,480,000	100.00	0
000066. Uang Penginapan Eselon IV	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
000067. Biaya Transportasi	800,000	0	800,000	0	800,000	100.00	0
000068. Uang Harian	9,370,000	0	8,770,000	0	8,770,000	93.60 %	600,000
000070. Uang Harian	1,480,000	0	1,480,000	0	1,480,000	100.00	0
000071. Uang Penginapan Eselon IV	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
000072. Biaya Transportasi	800,000	0	800,000	0	800,000	100.00	0
000074. Uang Harian	1,480,000	0	1,480,000	0	1,480,000	100.00	0
000075. Uang Penginapan Eselon IV	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
000076. Biaya Transportasi	800,000	0	800,000	0	800,000	100.00	0
000078. Uang Harian	2,960,000	0	2,960,000	0	2,960,000	100.00	0
000079. Uang Penginapan Eselon IV	7,120,000	0	7,116,300	0	7,116,300	99.95 %	3,700
000080. Uang Penginapan Eselon IV	2,400,000	0	2,174,800	0	2,174,800	90.62 %	225,200
000081. Biaya Transportasi	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	100.00	0
000083. Uang Harian	2,960,000	0	2,960,000	0	2,960,000	100.00	0
000084. Uang Penginapan Eselon IV	2,400,000	0	1,200,000	0	1,200,000	50.00 %	1,200,000
000085. Biaya Transportasi	1,600,000	0	1,597,750	0	1,597,750	99.86 %	2,250
000087. Uang Harian	1,480,000	0	1,480,000	0	1,480,000	100.00	0
000089. Biaya Transportasi	800,000	0	800,000	0	800,000	100.00	0
000090. Biaya Transportasi	800,000	0	800,000	0	800,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 135 **KEMENTERIAN HUKUM**

Unit Organisasi : 03 **DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Satuan Kerja : 693026 **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**

Hal 3 dari 5

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000092. Uang Harian	1,480,000	0	1,480,000	0	1,480,000	100.00	0
000094. Biaya Transportasi	210,000	0	208,600	0	208,600	99.33 %	1,400
000096. Uang Harian	1,480,000	0	1,480,000	0	1,480,000	100.00	0
000100. Uang Harian	1,390,000	0	1,390,000	0	1,390,000	100.00	0
000105. Uang Harian	1,480,000	0	1,480,000	0	1,480,000	100.00	0
000109. Uang Harian	2,960,000	0	2,960,000	0	2,960,000	100.00	0
000110. Uang Penginapan Eselon IV	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
000111. Biaya Transportasi	1,360,000	0	1,356,500	0	1,356,500	99.74 %	3,500
000112. Uang Harian	1,480,000	0	1,480,000	0	1,480,000	100.00	0
000114. Uang Harian	2,960,000	0	2,960,000	0	2,960,000	100.00	0
000115. Uang Penginapan Eselon IV	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	100.00	0
000116. Biaya Transportasi	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	100.00	0
000118. Uang Harian	2,480,000	0	2,480,000	0	2,480,000	100.00	0
000119. Uang Penginapan Eselon IV	1,480,000	0	1,478,000	0	1,478,000	99.86 %	2,000
000120. Biaya Transportasi	1,010,000	0	1,001,462	0	1,001,462	99.15 %	8,538
000122. Uang Harian	1,480,000	0	1,480,000	0	1,480,000	100.00	0
000123. Uang Penginapan Eselon IV	1,140,000	0	1,135,276	0	1,135,276	99.59 %	4,724
000127. Uang Harian	2,960,000	0	2,960,000	0	2,960,000	100.00	0
000128. Uang Penginapan Eselon IV	630,000	0	629,998	0	629,998	100.00	2
000129. Biaya Transportasi	570,000	0	569,500	0	569,500	99.91 %	500
000131. Uang Harian	2,960,000	0	2,960,000	0	2,960,000	100.00	0
053 Pelaksanaan Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Daerah	30,678,000	0	30,670,880	0	30,670,880	99.98 %	7,120
Perencanaan Kegiatan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan							
053.0D Pembinaan Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah	30,678,000	0	30,670,880	0	30,670,880	99.98 %	7,120
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30,678,000	0	30,670,880	0	30,670,880	99.98 %	7,120
000147. Uang representasi Eselon II	350,000	0	350,000	0	350,000	100.00	0
000148. Uang Harian	18,030,000	0	18,029,428	0	18,029,428	100.00	572

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 135 **KEMENTERIAN HUKUM**

Unit Organisasi : 03 **DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Satuan Kerja : 693026 **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**

Hal 4 dari 5

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000149. Uang Penginapan Eselon II	3,798,000	0	3,798,000	0	3,798,000	100.00	0
000150. Uang Penginapan Eselon IV/Gol III	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
000151. Biaya Tiket Kereta Api	5,500,000	0	5,493,452	0	5,493,452	99.88 %	6,548
ADG Standarisasi Profesi dan SDM	11,521,000	0	10,929,850	500,000	11,429,850	99.21 %	91,150
ADG.001 Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah	11,521,000	0	10,929,850	500,000	11,429,850	99.21 %	91,150
051 Persiapan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	15,000	0	0	0	0	0.00 %	15,000
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	15,000	0	0	0	0	0.00 %	15,000
521211 Belanja Bahan	15,000	0	0	0	0	0.00 %	15,000
000153. ATK	15,000	0	0	0	0	0.00 %	15,000
052 Pelaksanaan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	11,506,000	0	10,929,850	500,000	11,429,850	99.34 %	76,150
052.0B Pendalaman Materi Pembinaan Perancang Peraturan Daerah dan Perancang Peraturan Daerah	10,396,000	0	9,819,850	500,000	10,319,850	99.27 %	76,150
521211 Belanja Bahan	10,396,000	0	9,819,850	500,000	10,319,850	99.27 %	76,150
000156. Kudapan Rapat Pendalaman Materi	4,816,000	0	4,244,850	500,000	4,744,850	98.52 %	71,150
000157. Makan Rapat Pendalaman Materi	5,580,000	0	5,575,000	0	5,575,000	99.91 %	5,000
052.0D PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM	1,110,000	0	1,110,000	0	1,110,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,110,000	0	1,110,000	0	1,110,000	100.00	0
000169. Uang Harian	1,110,000	0	1,110,000	0	1,110,000	100.00	0
FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	45,120,000	0	12,696,680	32,411,290	45,107,970	99.97 %	12,030
FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah	45,120,000	0	12,696,680	32,411,290	45,107,970	99.97 %	12,030
051 Persiapan Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah	1,300,000	0	697,080	598,290	1,295,370	99.64 %	4,630
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	1,300,000	0	697,080	598,290	1,295,370	99.64 %	4,630
521211 Belanja Bahan	1,300,000	0	697,080	598,290	1,295,370	99.64 %	4,630
000178. ATK	1,300,000	0	697,080	598,290	1,295,370	99.64 %	4,630
052 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah	43,320,000	0	11,999,600	31,313,000	43,312,600	99.98 %	7,400
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	43,320,000	0	11,999,600	31,313,000	43,312,600	99.98 %	7,400
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	43,320,000	0	11,999,600	31,313,000	43,312,600	99.98 %	7,400

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 135 **KEMENTERIAN HUKUM**

Unit Organisasi : 03 **DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Satuan Kerja : 693026 **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**

Hal 5 dari 5

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000183. Uang Harian	3,700,000	0	1,480,000	2,220,000	3,700,000	100.00	0
000184. Uang Penginapan Eselon IV	2,200,000	0	1,200,000	1,000,000	2,200,000	100.00	0
000185. Biaya Transportasi	1,400,000	0	800,000	600,000	1,400,000	100.00	0
000187. Uang Harian	3,960,000	0	1,000,000	2,960,000	3,960,000	100.00	0
000188. Uang Penginapan Eselon IV	1,560,000	0	560,000	1,000,000	1,560,000	100.00	0
000189. Biaya Transportasi	600,000	0	0	600,000	600,000	100.00	0
000191. Uang Harian	2,220,000	0	0	2,220,000	2,220,000	100.00	0
000192. Uang Penginapan Eselon IV	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	100.00	0
000193. Uang Harian	3,480,000	0	520,000	2,960,000	3,480,000	100.00	0
000194. Biaya Transportasi	620,000	0	0	620,000	620,000	100.00	0
000204. Uang Penginapan Eselon IV	2,200,000	0	1,200,000	1,178,000	2,378,000	108.09	-178,000
000205. Uang Harian	2,960,000	0	0	2,960,000	2,960,000	100.00	0
000206. Uang Penginapan Eselon IV	1,400,000	0	0	1,400,000	1,400,000	100.00	0
000207. Biaya Transportasi	800,000	0	0	800,000	800,000	100.00	0
000213. Uang Harian	2,960,000	0	0	2,960,000	2,960,000	100.00	0
000214. Uang Penginapan Eselon IV	1,400,000	0	0	1,400,000	1,400,000	100.00	0
000215. Biaya Transportasi	1,331,000	0	531,000	800,000	1,331,000	100.00	0
000216. Biaya Transportasi	800,000	0	0	614,600	614,600	76.82 %	185,400
000218. Uang Harian	4,660,000	0	2,439,600	2,220,400	4,660,000	100.00	0
000219. Uang Penginapan Eselon IV	2,200,000	0	1,200,000	1,000,000	2,200,000	100.00	0
000220. Biaya Transportasi	1,869,000	0	1,069,000	800,000	1,869,000	100.00	0
053 Pelaporan Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah	500,000	0	0	500,000	500,000	100.00	0
053.0A TANPA SUB KOMPONEN	500,000	0	0	500,000	500,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	500,000	0	0	500,000	500,000	100.00	0
000222. Penggandaan dan Penjilidan	500,000	0	0	500,000	500,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 135 **KEMENTERIAN HUKUM**

Unit Organisasi : 11 **BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Satuan Kerja : 693094 **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**

Hal 1 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	4,676,178,000	0	3,493,084,969	1,111,432,750	4,604,517,719	98.47 %	71,660,281
BB Program Pembentukan Regulasi	15,000,000	0	14,999,500	0	14,999,500	100.00	500
BB.7133 Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	15,000,000	0	14,999,500	0	14,999,500	100.00	500
ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	15,000,000	0	14,999,500	0	14,999,500	100.00	500
ABD.001 Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum di Daerah	15,000,000	0	14,999,500	0	14,999,500	100.00	500
052 Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum	15,000,000	0	14,999,500	0	14,999,500	100.00	500
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	15,000,000	0	14,999,500	0	14,999,500	100.00	500
521211 Belanja Bahan	15,000,000	0	14,999,500	0	14,999,500	100.00	500
000007. BIAYA KONSUMSI KUDAPAN RAPAT	450,000	0	450,000	0	450,000	100.00	0
000008. BIAYA KONSUMSI MAKAN RAPAT	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000	100.00	0
000009. BIAYA PENGGANDAAN DAN PENJILIDAN	110,000	0	110,000	0	110,000	100.00	0
000010. BIAYA PEMBELIAN ATK	150,000	0	150,000	0	150,000	100.00	0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	15,000,000	0	14,999,500	0	14,999,500	100.00	500
000012. HONOR KETUA POKJA (EKSTERNAL)	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
000013. HONOR ANGGOTA POKJA (EKSTERNAL)	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15,000,000	0	14,999,500	0	14,999,500	100.00	500
000017. BIAYA UANG HARIAN	2,960,000	0	2,960,000	0	2,960,000	100.00	0
000018. BIAYA TRANSPORT ANTAR KAB/KOTA	960,000	0	960,000	0	960,000	100.00	0
000019. BIAYA PENGINAPAN ESELON IV/GOL III ke bawah	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
000021. BIAYA UANG HARIAN	2,350,000	0	2,350,000	0	2,350,000	100.00	0
000022. BIAYA TRANSPORT ANTAR KAB/KOTA	1,990,000	0	1,989,500	0	1,989,500	99.97 %	500
000023. BIAYA PENGINAPAN ESELON IV/GOL III ke bawah	780,000	0	780,000	0	780,000	100.00	0
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	4,661,178,000	0	3,478,085,469	1,111,432,750	4,589,518,219	98.46 %	71,659,781
BF.7136 Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	4,661,178,000	0	3,478,085,469	1,111,432,750	4,589,518,219	98.46 %	71,659,781
BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	15,000,000	0	14,998,135	0	14,998,135	99.99 %	1,865
BDB.001 Pengelolaan anggota JDIHN di wilayah	15,000,000	0	14,998,135	0	14,998,135	99.99 %	1,865

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 135 KEMENTERIAN HUKUM

Unit Organisasi 11 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Satuan Kerja : 693094 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

Hal 2 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025			SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	
051 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Wilayah	15,000,000	0	14,998,135	0	14,998,135 99.99 %	1,865
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	15,000,000	0	14,998,135	0	14,998,135 99.99 %	1,865
521211 Belanja Bahan	8,900,000	0	8,898,135	0	8,898,135 99.98 %	1,865
000100. Biaya Seminar Kit	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000 100.00	0
000101. Biaya Pembelian ATK	200,000	0	198,135	0	198,135 99.07 %	1,865
000363. Snack Rapat Biasa	1,020,000	0	1,020,000	0	1,020,000 100.00	0
000364. Makan Rapat Biasa	3,180,000	0	3,180,000	0	3,180,000 100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	6,100,000	0	6,100,000	0	6,100,000 100.00	0
000103. Honor Narasumber Eksternal Eselon III ke bawah / yang disetarakan	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000 100.00	0
000365. Honorarium Moderator	700,000	0	700,000	0	700,000 100.00	0
BDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	139,758,000	0	24,859,944	112,979,750	137,839,694 98.63 %	1,918,306
BDD.001 Layanan penyuluhan hukum di Daerah	47,712,000	0	9,642,000	37,404,470	47,046,470 98.61 %	665,530
051 Penyiapan bahan kegiatan Penyuluhan Hukum	11,425,000	0	0	11,407,470	11,407,470 99.85 %	17,530
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	11,425,000	0	0	11,407,470	11,407,470 99.85 %	17,530
521211 Belanja Bahan	11,425,000	0	0	11,407,470	11,407,470 99.85 %	17,530
000169. BIAYA PENCETAKAN BANNER/LEAFLET/POSTER	5,000,000	0	0	4,995,000	4,995,000 99.90 %	5,000
000369. Biaya Pembelian Spanduk	6,425,000	0	0	6,412,470	6,412,470 99.80 %	12,530
052 Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum	21,287,000	0	0	21,114,500	21,114,500 99.19 %	172,500
052.0A PENYULUHAN HUKUM LANGSUNG	21,287,000	0	0	21,114,500	21,114,500 99.19 %	172,500
521211 Belanja Bahan	2,727,000	0	0	2,719,500	2,719,500 99.72 %	7,500
000180. Biaya Penggandaan dan Penjilidan	2,727,000	0	0	2,719,500	2,719,500 99.72 %	7,500
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18,560,000	0	0	18,395,000	18,395,000 99.11 %	165,000
000190. Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol. III kebawah	6,000,000	0	0	5,995,000	5,995,000 99.92 %	5,000
000191. Biaya Uang Harian	6,000,000	0	0	5,980,000	5,980,000 99.67 %	20,000
000370. Tiket PP	4,400,000	0	0	4,400,000	4,400,000 100.00	0
000371. Taksi Asal	600,000	0	0	460,000	460,000 76.67 %	140,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 135 **KEMENTERIAN HUKUM**

Unit Organisasi : 11 **BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Satuan Kerja : 693094 **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**

Hal 3 dari 7

	Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000372. Taksi Tujuan	1,560,000	0	0	1,560,000	1,560,000	100.00	0
053	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Penyuluhan Hukum	15,000,000	0	9,642,000	4,882,500	14,524,500	96.83 %	475,500
053.0A	TANPA SUB KOMPONEN	15,000,000	0	9,642,000	4,882,500	14,524,500	96.83 %	475,500
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15,000,000	0	9,642,000	4,882,500	14,524,500	96.83 %	475,500
	000207. Biaya Uang Harian	6,000	0	0	0	0	0.00 %	6,000
	000208. Biaya Taksi Provinsi Tujuan	4,000	0	0	0	0	0.00 %	4,000
	000209. Biaya Taksi Provinsi Asal	4,000	0	0	0	0	0.00 %	4,000
	000210. Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Gol. IV	1,000,000	0	706,000	0	706,000	70.60 %	294,000
	000211. Tiket PP	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	100.00	0
	000212. Biaya Uang Harian	3,000,000	0	280,000	2,569,000	2,849,000	94.97 %	151,000
	000213. Biaya Taksi Provinsi Asal	200,000	0	0	200,000	200,000	100.00	0
	000214. Biaya Taksi Provinsi Tujuan	600,000	0	0	589,500	589,500	98.25 %	10,500
	000216. Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Gol. IV	4,000	0	0	0	0	0.00 %	4,000
	000217. Tiket PP	2,000	0	0	0	0	0.00 %	2,000
	000330. Biaya Uang Harian	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	100.00	0
	000331. Transport Antar Kab/Kota	2,180,000	0	1,656,000	524,000	2,180,000	100.00	0
BDD.002	Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	92,046,000	0	15,217,944	75,575,280	90,793,224	98.64 %	1,252,776
052	Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	92,046,000	0	15,217,944	75,575,280	90,793,224	98.64 %	1,252,776
052.0A	Pengukuhan Desa/Kelurahan Binaan Menuju Desa/Kelurahan Sadar Hukum	35,266,000	0	15,217,944	18,918,280	34,136,224	96.80 %	1,129,776
521211	Belanja Bahan	23,154,000	0	7,420,000	14,618,680	22,038,680	95.18 %	1,115,320
	000322. Biaya Konsumsi Kudapan Rapat (ABT)	1,440,000	0	1,400,000	0	1,400,000	97.22 %	40,000
	000323. Biaya Konsumsi Makan Rapat (ABT)	6,120,000	0	6,020,000	0	6,020,000	98.37 %	100,000
	000324. Biaya Penggandaan dan Penjilidan	594,000	0	0	593,680	593,680	99.95 %	320
	000333. Biaya Konsumsi Kudapan Rapat	4,250,000	0	0	3,825,000	3,825,000	90.00 %	425,000
	000334. Biaya Konsumsi Rapat	10,750,000	0	0	10,200,000	10,200,000	94.88 %	550,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,000,000	0	720,000	275,000	995,000	99.50 %	5,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 135 **KEMENTERIAN HUKUM**

Unit Organisasi : 11 **BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Satuan Kerja : 693094 **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**

Hal 4 dari 7

	Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000156. Biaya penghargaan (pembelian plakat / piala)	1,000,000	0	720,000	275,000	995,000	99.50 %	5,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11,112,000	0	7,077,944	4,024,600	11,102,544	99.91 %	9,456
	000319. Biaya Penginapan Pejabat Negara Lainnya/Pejabat Eselon II (ABT)	4,860,000	0	4,857,944	0	4,857,944	99.96 %	2,056
	000320. Biaya Uang Harian (ABT)	2,220,000	0	2,220,000	0	2,220,000	100.00	0
	000321. Biaya uang representasi pejabat eselon II	4,000	0	0	0	0	0.00 %	4,000
	000366. Tiket (PP)	4,028,000	0	0	4,024,600	4,024,600	99.92 %	3,400
052.0B	PERESMIAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM	56,780,000	0	0	56,657,000	56,657,000	99.78 %	123,000
521211	Belanja Bahan	32,500,000	0	0	32,425,000	32,425,000	99.77 %	75,000
	000367. Kudapan Rapat	7,500,000	0	0	7,425,000	7,425,000	99.00 %	75,000
	000368. Seminar KIT	25,000,000	0	0	25,000,000	25,000,000	100.00	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	24,280,000	0	0	24,232,000	24,232,000	99.80 %	48,000
	000162. BIAYA PENGHARGAAN DESA SADAR HUKUM	24,280,000	0	0	24,232,000	24,232,000	99.80 %	48,000
BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	20,000,000	0	6,190,500	13,789,000	19,979,500	99.90 %	20,500
BIB.001	Penyelenggaraan Paralegal Justice Awards di Wilayah	20,000,000	0	6,190,500	13,789,000	19,979,500	99.90 %	20,500
052	Pelaksanaan Seleksi dan Penyampaian Rekomendasi Peserta PJA	20,000,000	0	6,190,500	13,789,000	19,979,500	99.90 %	20,500
052.0A	TANPA SUB KOMPONEN	20,000,000	0	6,190,500	13,789,000	19,979,500	99.90 %	20,500
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20,000,000	0	6,190,500	13,789,000	19,979,500	99.90 %	20,500
	000225. Biaya Uang Harian	5,180,000	0	5,180,000	0	5,180,000	100.00	0
	000226. Biaya Transport antar Kab/Kota	1,840,000	0	860,500	979,000	1,839,500	99.97 %	500
	000227. Biaya Penginapan Pejabat Negara Lainnya/Pejabat Eselon II	3,510,000	0	0	3,510,000	3,510,000	100.00	0
	000228. Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Gol. IV	1,600,000	0	0	1,600,000	1,600,000	100.00	0
	000229. Tiket PP	4,204,000	0	0	4,204,000	4,204,000	100.00	0
	000230. Biaya Uang Harian	2,120,000	0	0	2,100,000	2,100,000	99.06 %	20,000
	000231. Biaya Taksi Provinsi Asal	300,000	0	0	300,000	300,000	100.00	0
	000232. Biaya Taksi Provinsi Tujuan	796,000	0	0	796,000	796,000	100.00	0
	000233. Biaya Uang Representasi Pejabat Eselon I/II	450,000	0	150,000	300,000	450,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 135 KEMENTERIAN HUKUM

Unit Organisasi 11 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Satuan Kerja : 693094 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

Hal 5 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025			SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	
BIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	15,000,000	0	14,713,600	0	14,713,600 98.09 %	286,400
BIC.001 Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah	15,000,000	0	14,713,600	0	14,713,600 98.09 %	286,400
051 Persiapan Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum Tingkat Daerah	15,000,000	0	14,713,600	0	14,713,600 98.09 %	286,400
051.0A Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Hukum Tingkat Daerah	15,000,000	0	14,713,600	0	14,713,600 98.09 %	286,400
521211 Belanja Bahan	15,000,000	0	14,713,600	0	14,713,600 98.09 %	286,400
000239. BIAYA ATK	6,791,000	0	6,782,100	0	6,782,100 99.87 %	8,900
000241. BIAYA KONSUMSI MAKAN RAPAT	8,209,000	0	7,931,500	0	7,931,500 96.62 %	277,500
BMA Data dan Informasi Publik	15,000,000	0	12,790,950	2,100,000	14,890,950 99.27 %	109,050
BMA.001 Inventarisasi Permasalahan Hukum di Wilayah	15,000,000	0	12,790,950	2,100,000	14,890,950 99.27 %	109,050
051 Inventarisasi data Permasalahan Hukum	15,000,000	0	12,790,950	2,100,000	14,890,950 99.27 %	109,050
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	15,000,000	0	12,790,950	2,100,000	14,890,950 99.27 %	109,050
521211 Belanja Bahan	8,244,000	0	7,784,950	450,000	8,234,950 99.89 %	9,050
000273. Biaya Konsumsi Kudapan Rapat	1,360,000	0	1,360,000	0	1,360,000 100.00	0
000274. Biaya Konsumsi Makan Rapat	4,050,000	0	3,600,000	450,000	4,050,000 100.00	0
000275. Biaya Penggandaan dan Penjilidan	4,000	0	0	0	0 0.00 %	4,000
000276. Biaya Pembelian ATK	2,830,000	0	2,824,950	0	2,824,950 99.82 %	5,050
522151 Belanja Jasa Profesi	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000 100.00	0
000277. Honorarium Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional	900,000	0	900,000	0	900,000 100.00	0
000278. Honorarium Narasumber Eksternal Pejabat Eselon III/yang disetarakan	900,000	0	900,000	0	900,000 100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,306,000	0	3,206,000	0	3,206,000 96.98 %	100,000
000279. Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol. III kebawah	800,000	0	706,000	0	706,000 88.25 %	94,000
000280. Biaya Uang Harian	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000 100.00	0
000281. Biaya Transport antar Kab/Kota	406,000	0	400,000	0	400,000 98.52 %	6,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,650,000	0	0	1,650,000	1,650,000 100.00	0
000282. Biaya Transport Lokal	1,650,000	0	0	1,650,000	1,650,000 100.00	0
FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	15,000,000	0	14,436,350	553,000	14,989,350 99.93 %	10,650

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 135 KEMENTERIAN HUKUM

Unit Organisasi 11 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Satuan Kerja : 693094 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

Hal 6 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum	15,000,000	0	14,436,350	553,000	14,989,350	99.93 %	10,650
051 Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum	15,000,000	0	14,436,350	553,000	14,989,350	99.93 %	10,650
051.0A Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Wilayah	15,000,000	0	14,436,350	553,000	14,989,350	99.93 %	10,650
521211 Belanja Bahan	7,430,000	0	7,420,350	0	7,420,350	99.87 %	9,650
000289. BIAYA PEMBELIAN ATK	7,430,000	0	7,420,350	0	7,420,350	99.87 %	9,650
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,570,000	0	4,016,000	553,000	4,569,000	99.98 %	1,000
000292. Biaya Uang Harian	4,090,000	0	3,660,000	430,000	4,090,000	100.00	0
000293. Biaya Transport antar Kab/Kota	480,000	0	356,000	123,000	479,000	99.79 %	1,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
000294. BIAYA TRANSPORT LOKAL	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
QBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	3,565,119,000	0	2,875,420,720	665,800,000	3,541,220,720	99.33 %	23,898,280
QBA.U01 Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	3,565,119,000	0	2,875,420,720	665,800,000	3,541,220,720	99.33 %	23,898,280
051 Pemeriksaan dan Upaya Hukum Biasa	3,565,119,000	0	2,875,420,720	665,800,000	3,541,220,720	99.33 %	23,898,280
051.0A Tahap Penyidikan/Gugatan/Pemeriksaan Pendahuluan/Putusan Pengadilan Tingkat I/Upaya Hukum Biasa	3,565,119,000	0	2,875,420,720	665,800,000	3,541,220,720	99.33 %	23,898,280
522131 Belanja Jasa Konsultan	3,565,119,000	0	2,875,420,720	665,800,000	3,541,220,720	99.33 %	23,898,280
000298. Layanan Bantuan Hukum Litigasi	1,119,000	0	0	0	0	0.00 %	1,119,000
000316. Layanan Bantuan Hukum Litigasi	3,564,000,000	0	2,875,420,720	665,800,000	3,541,220,720	99.36 %	22,779,280
QBC Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat	876,301,000	0	514,675,270	316,211,000	830,886,270	94.82 %	45,414,730
QBC.U01 Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	876,301,000	0	514,675,270	316,211,000	830,886,270	94.82 %	45,414,730
051 Penyebarluasan Informasi dan Penanganan Perkara di luar Pengadilan	817,701,000	0	480,475,270	297,811,000	778,286,270	95.18 %	39,414,730
051.0A Penyuluhan Hukum/Pemberdayaan Masyarakat/Penelitian Hukum/Mediasi/Negosiasi/Pendampingan di luar Pengadilan/Drafting Dokumen Hukum/Investigasi Perkara	817,701,000	0	480,475,270	297,811,000	778,286,270	95.18 %	39,414,730
522131 Belanja Jasa Konsultan	817,701,000	0	480,475,270	297,811,000	778,286,270	95.18 %	39,414,730
000300. Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	201,000	0	0	0	0	0.00 %	201,000
000317. Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	817,500,000	0	480,475,270	297,811,000	778,286,270	95.20 %	39,213,730
052 Konseling	58,600,000	0	34,200,000	18,400,000	52,600,000	89.76 %	6,000,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 135 **KEMENTERIAN HUKUM**

Unit Organisasi 11 **BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Satuan Kerja : 693094 **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**

Hal 7 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				% SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
052.0A Konsultasi Hukum	58,600,000	0	34,200,000	18,400,000	52,600,000	89.76 %	6,000,000
522131 Belanja Jasa Konsultan	58,600,000	0	34,200,000	18,400,000	52,600,000	89.76 %	6,000,000
000327. Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	58,600,000	0	34,200,000	18,400,000	52,600,000	89.76 %	6,000,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 135 **KEMENTERIAN HUKUM**

Unit Organisasi : 12 **BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM**

Satuan Kerja : 693128 **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**

Hal 1 dari 2

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	100,000,000	0	99,384,101	604,395	99,988,496	99.99 %	11,504
WA Program Dukungan Manajemen	100,000,000	0	99,384,101	604,395	99,988,496	99.99 %	11,504
WA.7143 Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	100,000,000	0	99,384,101	604,395	99,988,496	99.99 %	11,504
ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	94,270,000	0	93,766,101	492,840	94,258,941	99.99 %	11,059
ABD.001 Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	94,270,000	0	93,766,101	492,840	94,258,941	99.99 %	11,059
051 Analisis Strategi Kebijakan Hukum	94,270,000	0	93,766,101	492,840	94,258,941	99.99 %	11,059
051.0A Analisis Evaluasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	12,320,000	0	12,320,000	0	12,320,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12,320,000	0	12,320,000	0	12,320,000	100.00	0
000006. Transportasi Darat Antar Kabupaten (Kota Semarang - Kab. Semarang)	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	100.00	0
000007. Uang Harian	5,920,000	0	5,920,000	0	5,920,000	100.00	0
000008. Biaya Penginapan Gol. III/IV	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000	100.00	0
051.0B Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM	14,963,000	0	14,960,200	0	14,960,200	99.98 %	2,800
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14,963,000	0	14,960,200	0	14,960,200	99.98 %	2,800
000016. Biaya Taksi Jakarta	121,000	0	120,200	0	120,200	99.34 %	800
000023. Tiket Kereta Api	5,440,000	0	5,440,000	0	5,440,000	100.00	0
000024. Uang Harian	6,360,000	0	6,360,000	0	6,360,000	100.00	0
000026. Biaya Penginapan Gol. III/IV	3,042,000	0	3,040,000	0	3,040,000	99.93 %	2,000
051.0D Kesekretariatan Indeks Reformasi Hukum di Wilayah	66,987,000	0	66,485,901	492,840	66,978,741	99.99 %	8,259
521211 Belanja Bahan	786,000	0	291,000	492,840	783,840	99.73 %	2,160
000038. ATK dan Komputer Suplies	786,000	0	291,000	492,840	783,840	99.73 %	2,160
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	66,201,000	0	66,194,901	0	66,194,901	99.99 %	6,099
000043. Transportasi Darat Antar Kabupaten (Kota Semarang - Kab. Semarang)	13,008,000	0	13,005,000	0	13,005,000	99.98 %	3,000
000044. Uang Harian	31,200,000	0	31,200,000	0	31,200,000	100.00	0
000045. Biaya Penginapan Gol. III/IV	21,993,000	0	21,989,901	0	21,989,901	99.99 %	3,099
AEF Sosialisasi dan Diseminasi	5,730,000	0	5,618,000	111,555	5,729,555	99.99 %	445
AEF.001 Diskusi Strategi Kebijakan Hukum	5,730,000	0	5,618,000	111,555	5,729,555	99.99 %	445

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 135 **KEMENTERIAN HUKUM**

Unit Organisasi 12 **BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM**

Satuan Kerja : 693128 **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**

Hal 2 dari 2

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
051 Persiapan Sosialisasi	112,000	0	0	111,555	111,555	99.60 %	445
051.0A Tanpa Sub Komponen	112,000	0	0	111,555	111,555	99.60 %	445
521211 Belanja Bahan	112,000	0	0	111,555	111,555	99.60 %	445
000051. ATK dan Komputer Suplies	112,000	0	0	111,555	111,555	99.60 %	445
052 Pelaksanaan Sosialisasi	5,618,000	0	5,618,000	0	5,618,000	100.00	0
052.0A Tanpa Sub Komponen	5,618,000	0	5,618,000	0	5,618,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	3,375,000	0	3,375,000	0	3,375,000	100.00	0
000055. Konsumsi (Makan)	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
000056. Konsumsi (Kudapan)	750,000	0	750,000	0	750,000	100.00	0
000064. Souvenir/Dorprize	825,000	0	825,000	0	825,000	100.00	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	503,000	0	503,000	0	503,000	100.00	0
000059. Biaya Pembelian Lisensi Aplikasi Video Teleconference (Zoom Meeting)	503,000	0	503,000	0	503,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	1,740,000	0	1,740,000	0	1,740,000	100.00	0
000060. Honorarium Narasumber Eksternal Eselon III ke bawah	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000	100.00	0
000065. Honorarium Moderator Eksternal	420,000	0	420,000	0	420,000	100.00	0
000066. Honorarium Pembawa Acara / Juru Bahasa Isyarat (JBI) Eksternal	240,000	0	240,000	0	240,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.